

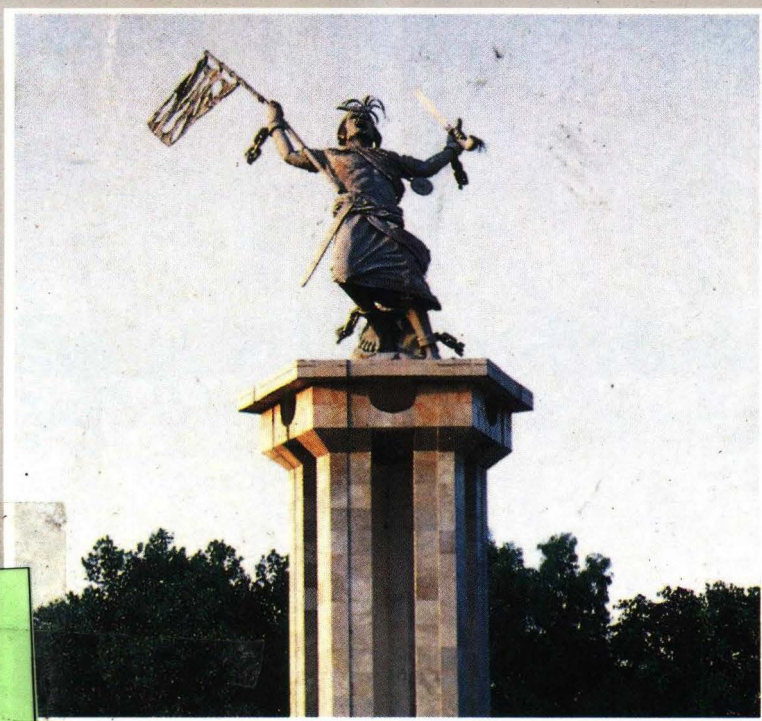


SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT TIMOR TIMUR

Sekolah Menengah Umum

Dr. Anhar Gonggong

Susanto Zuhdi, S.S., M.A.



Direktorat
Budayaan

7

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
PROYEK SLTP (INDUK) TIMOR TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

**SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT
TIMOR TIMUR**

**SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT
TIMOR TIMUR**
untuk Sekolah Menengah Umum

Penulis
**Dr. Anhar Gonggong
Susanto Zuhdi, SS. MA.**

Cetakan ke-3

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
PROYEK SLTP (INDUK) TIMOR TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

KATA PENGANTAR

Buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur ini ditulis berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI No. 482/Kep/1992, dimaksudkan sebagai buku pelengkap mata pelajaran sejarah bagi siswa-siswa di Propinsi Timor Timur. Buku ini disusun sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah umum. Penulisan buku ini sangat penting karena belum ada buku pelajaran yang menampung sejarah Timor Timur bagi siswa-siswa khususnya di Propinsi Timor Timur. Materi pelajaran yang ditulis dalam buku ini memperlihatkan bahwa Timor Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia lainnya sejak zaman prasejarah. Karena itu ruang lingkup pembahasan buku pelajaran ini dimulai dari masa prasejarah sampai periode Pembangunan Nasional (sekitar 1988).

Setelah melakukan penelitian kepustakaan, naskah pertama ditulis oleh sebuah tim. Draft pertama itu kemudian diseminarkan di Dili pada bulan Januari 1993. Dalam seminar pertama ini hadir pelbagai pihak termasuk para pelaku, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang telah memberikan pelbagai data dan informasi tentang pelbagai peristiwa, baik yang menyangkut periode pemerintahan Portugal maupun proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta data tentang pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, tim penulis menyempurnakan naskah dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari seminar pertama itu. Penyempurnaan draft pertama juga ditunjang dengan hasil yang diperoleh dari lapangan oleh Tim Pengumpul Data Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur.

Penulisan kembali dengan menggunakan informasi-informasi tersebut di atas pada akhirnya berhasil diselesaikan naskah draft

kedua. Sebagai mana ketentuan proyek, draft kedua dicetak dalam jumlah terbatas untuk bahan uji coba. Setelah uji coba dilaksanakan, diperoleh gambaran bahwa secara umum, buku ini dapat dipahami oleh pembaca dan tidak terdapat kesalahan prinsipal. Walaupun demikian, dari hasil uji coba itu diperoleh pula beberapa saran yang patut mendapat perhatian tim penulis.

Selanjutnya tim penulis kembali mengolah draft kedua untuk menjadi draft ketiga berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari hasil uji coba serta sumber-sumber tertulis yang diperoleh kemudian.

Setelah bekerja beberapa waktu, draft ketiga berhasil diselesaikan. Sebenarnya draft ketiga ini akan diseminarkan di Dili, tetapi karena kesalahan teknis, maka draft ketiga tidak dapat dibagikan. Untuk mengatasi masalah ini kemudian dibagikan naskah yang telah dicetak untuk diujicobakan.

Pada awal bulan Nopember 1993, diadakan seminar kedua. Seminar ini juga dihadiri oleh pelbagai pihak termasuk para pelaku, bupati dan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Suasana seminar cukup tegang karena terjadi perbedaan pendapat di antara peserta seminar, bahkan ada yang menghendaki agar buku ini jangan dulu diedarkan. Akhirnya seminar kedua ini memperoleh kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. perubahan judul, dari Sejarah Perjuangan Timor Timur menjadi Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur.
2. perbaikan kerangka penulisan, dan
3. penambahan anggota tim penulis dalam rangka penyempurnaan draft ketiga; anggota tim yang dimaksud harus putra daerah Timor Timur.

Di samping itu peserta seminar menyarankan agar dapat segera ditulis sebuah buku sejarah Timor Timur, yaitu "Sejarah Induk".

Anggota tim putra daerah yang ditunjuk oleh Gubernur Timor Timur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur adalah:

1. Domingos M. Dores Soares, SH, MS
2. Pe. Jose Antonio da Costa
3. Drs. Florentino Sarmento

Dalam perkembangan kemudian Drs. Florentino Sarmento mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Selanjutnya tim penulis, bersama kedua putra daerah itu melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan naskah draft keempat. Perbaikan yang prinsipal ialah pada penulisan nama-nama tokoh dan istilah-istilah tertentu yang dianggap kurang tepat.

Demikianlah, buku ini disusun melalui proses kerja yang cukup memakan waktu lama.

Pada akhirnya tim penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Jakarta, 22 Januari 1995
Tim Penulis

**SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI TIMOR TIMUR**

Dengan berkat dan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, kita telah dapat menyelesaikan penyempurnaan Buku Sejarah Perjuangan Timor Timur (yang telah dicetak pada tahun anggaran 1992/1993) menjadi Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur.

Buku yang diterbitkan kali ini adalah hasil akhir dari segala upaya yang telah ditempuh oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur.

Namun kami tetap menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik yang menyangkut materi, pencetakan maupun ilustrasi yang ada.

Untuk itu kepada para pembaca atau pemakai buku ini kami mohon untuk tetap memberikan sumbang saran maupun kritik yang membangun demi makin sempurnanya buku ini.

Kepada semua pihak dan khususnya anggota Tim Penulis yang telah berpartisipasi dalam upaya menyempurnakan dan menerbitkan buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga buku ini banyak manfaatnya dalam rangka pembangunan bangsa.

Dili, Januari 1994
Kepala Kantor Wilayah



R. TRI SUWARTANTA
NIP. 130 163 013

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI TIMOR TIMUR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek SLTP (induk) Timor Timur tahun anggaran 1995/1996 telah dapat memperbaiki dan mencetak ulang buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur. Pada tahun anggaran 1995/1996 dicetak buku untuk SD, SLTP dan SMU yang seluruhnya berjumlah 22.000 buku.

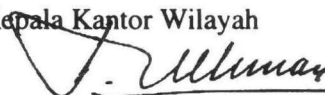
Semoga buku yang telah mengalami perbaikan-perbaikan ini, baik dari segi kalimat, gambar-gambar maupun mutu pencetakannya dapat berguna dan membantu para siswa, guru, maupun para pembaca untuk lebih mudah memahaminya. Buku ini di samping sebagai pegangan para siswa juga diharapkan dapat menambah pengertian serta wawasan yang benar tentang Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur dalam usaha membebaskan diri dari cengkeraman penjajah.

Kepada tim penulis dan semua pihak yang telah banyak memberi saran, serta masukan-masukan demi sempurnanya buku ini kami ucapkan terima kasih. Kami menyadari meskipun sudah berulang kali mengalami perbaikan, tentu masih banyak kekurangannya. Untuk itu masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini masih kami harapkan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan bangsa, khususnya di Propinsi Timor Timur tercinta. Kiranya Tuhan selalu berkenan memberkati semua usaha-usaha mulia ini.

Dili, - Januari 1995
Kepala Kantor Wilayah




Drs. M. Soekarman S., M.Ed
NIP. 130 160 743

SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

Atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, kami menyambut baik atas usaha-usaha yang telah ditempuh oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Timor Timur, yang dengan segala daya dan upaya telah dapat menyempurnakan Draft Buku Sejarah Perjuangan Timor Timur, menjadi Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur.

Kami berterima kasih pula kepada Pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berkenaan mengangkat 3 (tiga) orang putra daerah sebagai anggota Tim Penulis, sehingga lebih memperkuat dan dapat menambah bobot isi buku ini.

Memang sampai saat ini, belum ada Buku Sejarah Timor Timur atau semacamnya yang dapat dipergunakan sebagai pegangan yang pasti bagi para pendidik maupun para siswa di Propinsi Timor Timur.

Oleh karena itu, kami anjurkan buku ini agar dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan yang ada bagi sekolah-sekolah di Propinsi Timor Timur.

Kami memahami bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kepada para pembaca/pemakai buku ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbang saran maupun kritik demi kesempurnaan buku ini.

Kepada semua pihak dan khususnya kepada Tim Penulis buku ini, kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala upaya dan dayanya demi terwujudnya buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Timor Timur guna menyongsong hari esok yang lebih cerah.

Dili, 12 Januari 1994



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR

BILIO JOSE OSORIO SOARES

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	v
KATA SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD TIM TIM	ix
KATA SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD TIM TIM	xi
KATA SAMBUTAN GUBERNUR KDH TK. I TIM TIM	xiii
SURAT PERSETUJUAN DPRD TK. I TIM TIM	xv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1. Lingkungan Alam dan Penduduk	1
2. Prasejarah	10
3. Kerajaan-kerajaan Tradisional.....	13
BAB II PENJAJAHAN PORTUGIS	19
1. Masa Awal Kehadiran Portugis	19
2. Perkembangan Agama Katolik	21
3. Orang-orang Tupas	26
4. Propinsi Portugis.....	28
BAB III PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP PORTUGIS	41
1. Perlawanan Rakyat Oekusi, 1765-1768	42
2. Perlawanan Raja Luca, 1779	43
3. Peristiwa di Atabae 1899	44
4. Perlawanan Raja Manufahi, Dom Boaventura	44
5. Perlawanan di Los Palos	47
6. Perlawanan Viqueque, 1959	47
BAB IV DEKOLONISASI.....	53
1. "Revolucao dos Cravos" atau "Revolusi Bunga"	53
2. Pembentukan Partai-Partai Politik.....	55
3. Sikap Indonesia, Portugal dan Australia	59

BAB V	PROSES PENENTUAN NASIB SENDIRI	67
	1. Pendekatan Melalui Perundingan	67
	2. Perang Saudara	71
BAB VI	KEMBALI KE PANGKUAN IBU PERTIWI	75
	1. Proklamasi Balibo	75
	2. Pemerintah Sementara Timor Timur	81
	3. Pembentukan Propinsi ke-27	91
	4. Gubernur Pertama dan Aparat Pemerintahan	92
BAB VII	MASA PEMBANGUNAN	97
	1. Anggaran Pembangunan	97
	2. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	100
	a. Pertanian, Perdagangan dan Koperasi	100
	b. Tenaga Kerja	108
	c. Pembangunan Desa	109
	3. Bidang Sosial Budaya	110
	a. Pendidikan	110
	b. Pelayanan Sosial	116
	c. Kehidupan Beragama	124
	4. Perhubungan	126
	a. Transportasi	126
	1) Perhubungan darat	127
	2) Perhubungan Udara	128
	3) Perhubungan laut	129
	b. Penerangan	130
	c. Pos dan Telekomunikasi	133
	SUMBER PENULISAN	146
	LAMPIRAN	149

BAB I

LATAR BELAKANG

1. Lingkungan Alam dan Penduduk

Timor Timur, yang sebelum integrasi disebut Timor Portugis, adalah propinsi ke-27 Negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepulauan Indonesia, yang dahulu dikenal juga dengan nama Nusantara, terletak di antara 6° garis lintang utara dan 11° garis lintang selatan, memanjang dari barat ke timur antara 95° – 140° garis bujur timur. Kepulauan Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia.

Wilayah Timor Timur terletak membujur dari Barat Daya ke Timur Laut antara 8° 17' dan 10° 22' Lintang Selatan dan antara 123° 25' dan 127° 19' Bujur Timur.

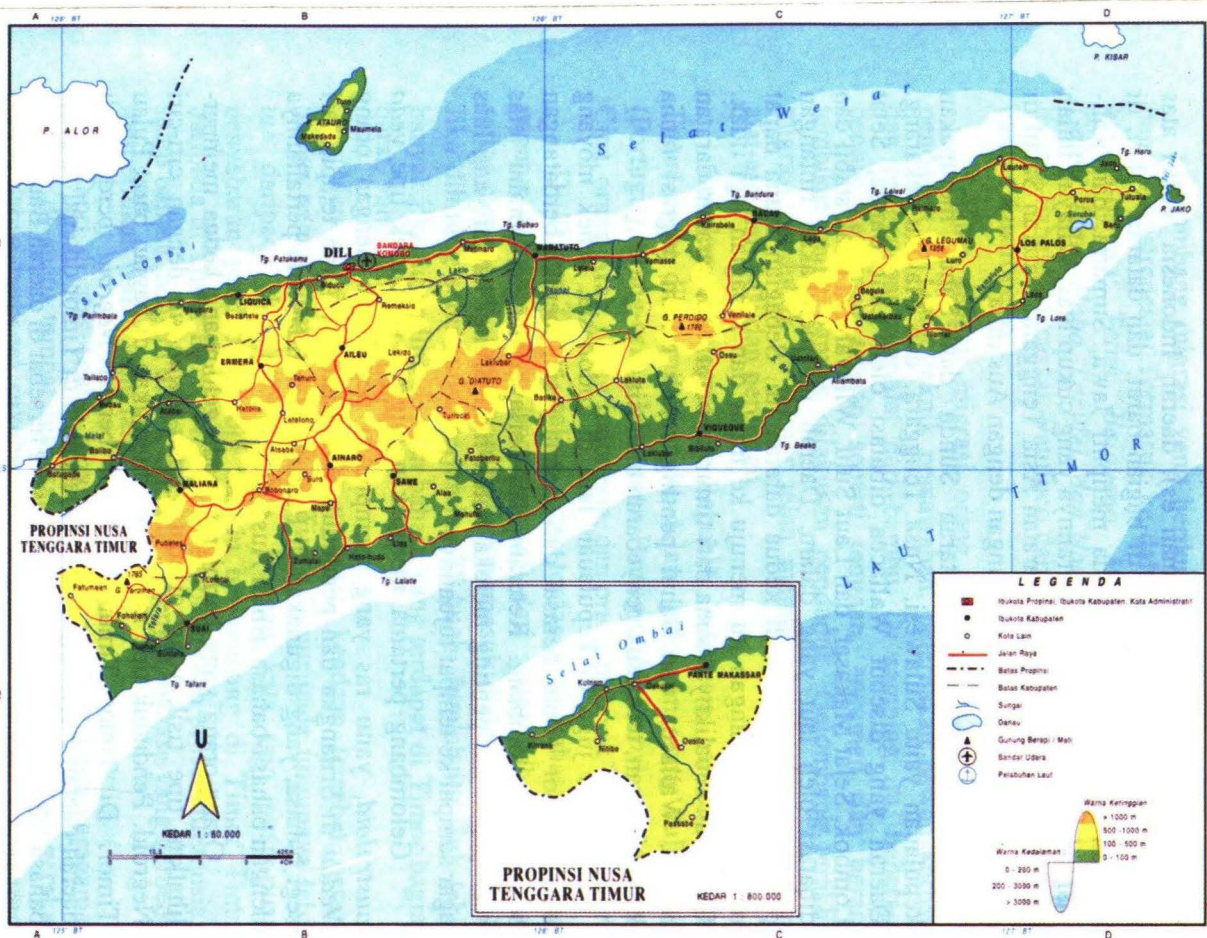
Luas keseluruhan wilayah Propinsi Timor Timur $\pm 14.609 \text{ km}^2$, termasuk Kabupaten Ambenu $\pm 778 \text{ km}^2$, Pulau Atauro $\pm 150 \text{ km}^2$ dan Pulau Jako $\pm 11 \text{ km}^2$. Ambenu adalah salah satu Kabupaten Propinsi Timor Timur yang letaknya di Propinsi Nusa Tenggara Timur terpisah dari daratan Timor Timur.

Di sebelah utara wilayah darat Timor Timur adalah Selat Ombai dan Wetar. Di selat ini terletak Pulau Atauro, sedangkan Pulau Jako berada di sebelah timur Pulau Timor. Berturut-turut batas-batas wilayah Timor Timur sebelah timur adalah Laut Banda, di sebelah selatan dengan Laut Timor dan di sebelah barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Orang Timor menyebut "Laut Perempuan" untuk Selat Ombai dan Wetar karena airnya yang tenang. Sebaliknya, mereka menyebut "Laut Lelaki" untuk Laut Timor yang bergelombang besar. Laut ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia.

Peta Indonesia





LEGENDA

- Wilayah Propinsi; Ibu kota Kabupaten; Kota Administratif
- Ibu kota Kabupaten
- Kota Lain
- Jalan Raya
- - - Batas Propinsi
- - - Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau
- ▲ Gunung Berapi; Mah
- ⊕ Bandar Udara
- ⊖ Pelabuhan Laut

Warna Ketinggian

- > 1000 m
- 500 - 1000 m
- 100 - 500 m
- 0 - 100 m

Warna Kedalaman

- 0 - 200 m
- 200 - 3000 m
- > 3000 m

Pada masa glasial (zaman es), daerah Indonesia terdiri atas dataran Sunda, yang berada di bagian barat, dan dataran Sahul, di sebelah timur. Dataran Sunda meliputi Jawa, Sumatra, dan Kalimantan dengan wilayah perairannya yang cukup luas. Wilayah inilah yang berhubungan dengan daratan Asia Tenggara. Dataran Sahul di sebelah timur dahulu berhubungan dengan Australia.

Daerah di antara dataran Sunda dan Sahul merupakan kepulauan yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku sekarang. Daerah yang disebut Wallacea dibatasi oleh Laut Banda, Selat Lombok, Selat Makasar, dan Laut Sulu. Wilayahnya tidak stabil dan dibatasi oleh laut yang dalam. Daerah ini merupakan rintangan penyaring bagi fauna di kedua daratan itu. Sebagian fauna dapat melampaui rintangan itu menuju ke timur dan sebagian lagi tidak. Demikian sebaliknya fauna dari timur ke barat. Jadi peranan dataran Sunda, Wallacea dan Sahul penting sekali dalam migrasi fauna kedua jurusan, termasuk penyebaran manusia.

Seperti juga di kepulauan lain di Indonesia, nenek moyang orang Timor Timur berasal dari Benua Asia, mereka berdatangan secara bergelombang. Keterampilan berlayar dengan perahu jela merupakan hal penting mereka untuk mengarungi lautan yang luas agar sampai ke tempat tujuannya.

Gelombang pertama merupakan migrasi penduduk tipe *vedo australoid*, yaitu ras yang mempunyai persamaan dengan orang *Vedda* di Srilangka dan penduduk asli Australia. Akan tetapi, dari segi bahasa, yang digunakan di Pulau Timor tidak ada pertaliannya dengan bahasa-bahasa asli di Australia.

Orang-orang yang bermigrasi pada gelombang kedua memperlihatkan tipe fisik yang disebut *Papua-Melanesia* dengan ciri-ciri Negroid. Penduduk tipe ini banyak ditemukan di bagian barat Pulau Timor. Di Timor Timur penduduk berciri *Negroid* berdiam di daerah-daerah pegunungan. Dalam tahap ini di Timor dikenal ada tiga bahasa "Papua" yaitu bahasa *Macassae* tersebar di daerah Baucau dan sebagian di Viqueque, bahasa *Fatuluco* di daerah Lautem, dan bahasa *Bunaq* di daerah antara Bobonaro, Fatululic dan Zumalai.

Gelombang migrasi yang berikut adalah penduduk yang berbahasa Austronesia. Termasuk ke dalam rumpun bahasa ini adalah bahasa-bahasa: *Tetun, Baiqueno, Mambai, Quemaq, Tecodede, Galoli, Idate, Habo, Laculei, dan Naueti*. Dalam perkembangannya bahasa-bahasa Macassai, Fatuluco dan Bunaq juga dipengaruhi oleh bahasa Austronesia.

Sejalan dengan migrasi orang Austronesia, dikenallah oleh penduduk di Timor teknik persawahan, peternakan hewan kerbau, dan penggunaan alat-alat dari bambu. Di samping itu, beberapa bentuk kerajinan tangan seperti tenunan, anyaman dan barang tembikar mulai banyak dilakukan penduduk. Gelombang terakhir migrasi penduduk ke Timor telah membawa teknologi membuat alat-alat dari besi dan perunggu.

Sebelum berintegrasi ke Republik Indonesia, penduduk Timor Timur dapat dikelompokkan ke dalam golongan orang kulit putih (Portugis), orang-orang keturunan Portugis (*Mesticos*), orang-orang Cina, orang Arab, orang Indonesia, dan orang pribumi Timor Timur.

Di Timor Timur, paling tidak terdapat 15 bahasa yang bagi penutur berbahasa satu (monolingual) dari setiap bahasa itu tidak saling dimengerti. Jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek. Jika dihitung seluruhnya berjumlah 35 buah. Jumlah itu jauh lebih banyak jika dibanding dengan bahasa yang terdapat di Timor bagian barat, yang hanya 3 buah saja.

Menurut salah satu teori migrasi, keadaan tersebut berarti bahwa pemukiman penduduk di Timor Timur pada umumnya lebih tua daripada di Timor-Belanda. Dengan kata lain pusat-pusat penyebaran penduduk lebih dahulu berkembang di Timor Timur daripada di Timor Barat. Hal ini disebabkan oleh proses difereusiasi suatu bahasa menjadi dialek kemudian menjadi bahasa yang berbeda, memerlukan waktu yang lama sekali.

Teori di atas belum tentu benar, mengingat keanekaragaman bahasa di suatu tempat bisa saja karena menjadi sasaran gerakan perpindahan berbagai sukubangsa. Kenyataan itu juga bisa berarti bahasa-bahasa Austronesia di Timor Timur merupakan satu

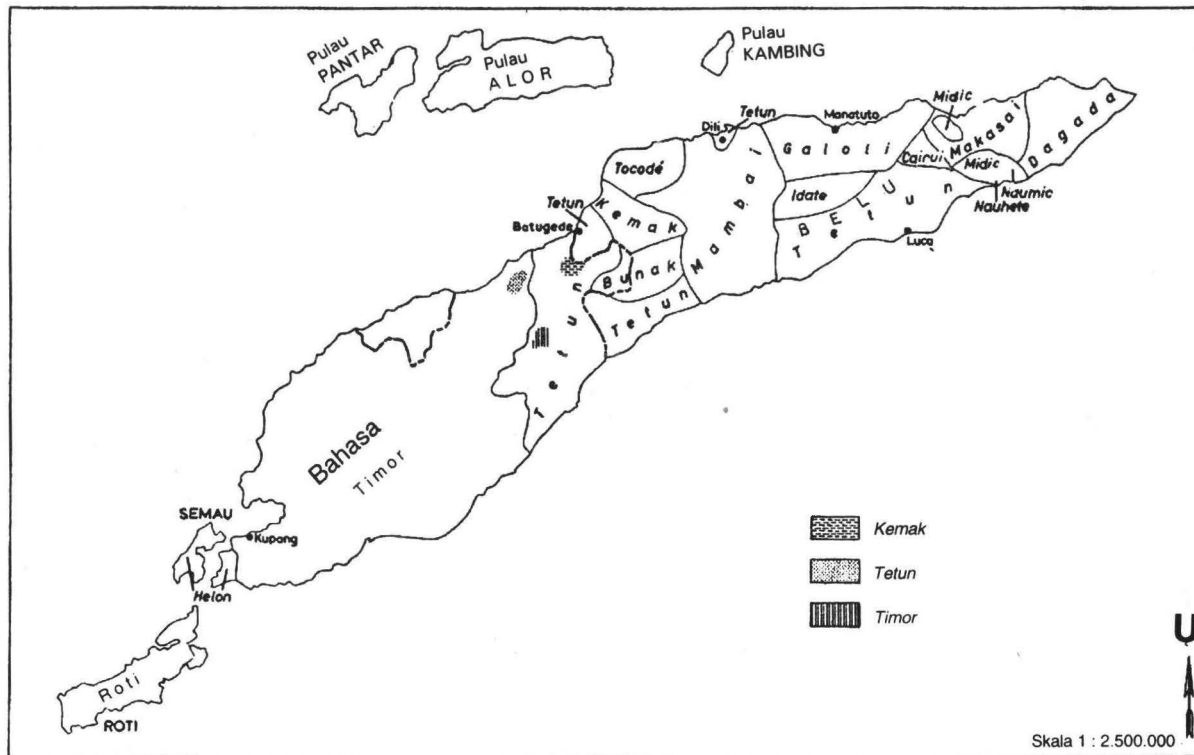
golongan dengan bahasa Atoni, Helon, dan Rote di Timor Barat dan dengan bahasa Sikka dan Solor di Flores dan Kepulauan Solor dan Alor. Semua bahasa tersebut merupakan satu golongan dengan bahasa Aru dan Kei, Seram dan Buru, sehingga membentuk satu golongan yang luas, yaitu golongan bahasa Ambon Timor. Gambaran itu memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk berbahasa Austronesia lebih luas daripada yang Non-Austronesia.

Carreia seorang ahli Antropologi bangsa Portugis mengatakan bahwa bahasa-bahasa di Timor dapat dikelompokkan dalam delapan kelompok bahasa:

1. bahasa Tetun, Kemak, Nogo-Nogo, Mambai, dan Tokodede;
2. bahasa-bahasa Galoli, Lacolei, dan Idate;
3. bahasa Macassai dan Nauteti;
4. bahasa Medic, Waima dan Habu;
5. bahasa Bunak;
6. bahasa Dagada;
7. bahasa Marai;
8. bahasa Becais, Lo-lei, Naurace, Dadua, Ossu-moces, Maceler, Saaun, dan Louai-epulu.

Di antara kelompok-kelompok bahasa di atas yang paling luas persebarannya dan daerah penggunaannya serta paling banyak mempunyai dialek bahasa adalah bahasa-bahasa Tetun, Mambai, Kemak, Bunak, Tokodede, dan Dagoda.

Kebanyakan bahasa di Indonesia terikat dalam golongan kekerabatan, yaitu Austronesia atau Melayu-Polinesia. Golongan bahasa tersebut meliputi bahasa-bahasa di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusatenggara, kecuali sejumlah bahasa di Halmahera dan Irian Jaya. Bahasa-bahasa yang disebut terakhir adalah bahasa non-Austronesia. Golongan bahasa ini tidak dengan sendirinya merupakan satu golongan kekerabatan, tetapi terdiri dari sejumlah kelompok yang tidak memperlihatkan hubungan satu sama lain.



Peta Bahasa-Bahasa di Pulau Timor dan Timor Timur

Bahasa-bahasa yang terdapat di Timor Timur dapat dibagi ke dalam suatu golongan Austronesia dan non-Austronesia.

Kedua golongan itu meliputi bahasa-bahasa sebagai berikut Austronesia:

- (1) *Tetun*
- (2) *Galole*
- (3) *Mambai*
- (4) *Tokodede*

Non Austronesia

- (5) *Bunak*
- (6) *Kemak*
- (7) *Makasai*
- (8) *Dagada*
- (9) *Idate*
- (10) *Kairui*
- (11) *Midiki (Naumiki, Nauhete)*

Dengan masuknya orang Portugis, bahasa Portugis mulai dikenal oleh orang Timor Timur. Pada zaman penjajahan Portugis bahasa Portugis merupakan bahasa resmi dan bahasa tulisan. Bahasa Portugis digunakan juga untuk komunikasi dalam bidang pemerintahan. Bahasa Portugis juga merupakan bahasa pergaulan antarsuku bangsa bagi golongan yang terpelajar. Pada saat integrasi tahun 1976, kira-kira 7,4 persen orang Timor Timur yang berpendidikan masih dapat berbahasa Portugis.

Walaupun bahasa Portugis digunakan secara luas namun bahasa Tetun, Mambai, Kemak, Bunak, Tokodede, dan Dagada tetap bertahan dan merupakan bahasa yang paling luas pemakaiannya. Bahkan bahasa-bahasa itu mempunyai peranan besar dalam kaitannya dengan perkembangan agama Katolik di Timor Timur.

Sebagian besar penduduk Timor Timur menganut agama animisme yaitu *Halo Lulik* pemujaan terhadap roh-roh halus dan benda-benda yang dianggap berkekuatan gaib. Kepercayaan orang Tetun dikenal dengan *Maromak*. Mereka memuja matahari, bulan dan roh nenek moyang. Ada empat golongan roh yang dikenal oleh

orang Tetun, yaitu (a) *nitu* atau roh nenek moyang dari suatu klen yang patrilineal; (b) *rai na'in* atau roh yang terdapat di tempat tertentu seperti di batu, hutan, dan sebagainya; (c) *buan* atau roh jahat yang tidak diketahui wujudnya. Roh jahat ini bertempat di hutan belantara yang jauh dari manusia dan kerjanya memakan roh orang yang tersesat; (d) *swangi* yaitu roh orang yang pada masa hidupnya banyak melakukan kejahatan, sehingga mati secara tidak wajar. Roh ini mengembara terus dan hidup dengan memakan manusia.

Orang Tetun juga mengenal adanya dukun yang disebut *buan* atau *matan do ok*. *Matan* berarti melihat dan *do ok* berarti jauh. Jadi, seorang yang dapat melihat jauh ke depan atau meramal masa depan. Di samping itu, ia juga dianggap dapat menyembuhkan orang sakit dan menolak segala kekuatan jahat.

Selain percaya kepada dukun, di setiap kerajaan terdapat seorang tokoh agama tradisional yang dinamakan *macair lulik*. Jabatan ini khusus diperuntukkan bagi laki-laki. Tugas utama *macair lulik* adalah menjamin hubungan yang baik antara penduduk kerajaan dan roh-roh yang berkuasa di kerajaan tersebut. Untuk menjalankan tugas itu, dia mengadakan upacara mewakili penduduk kerajaan setempat.

Pada masa penjajahan Portugis, misionaris banyak melakukan penyebaran agama Katolik secara intensif. Mereka mendirikan sekolah-sekolah mulai tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan pertama. Kesulitan penyebaran agama Katolik adalah faktor perhubungan yang buruk ditambah lagi oleh kesulitan berkomunikasi dengan penduduk setempat.

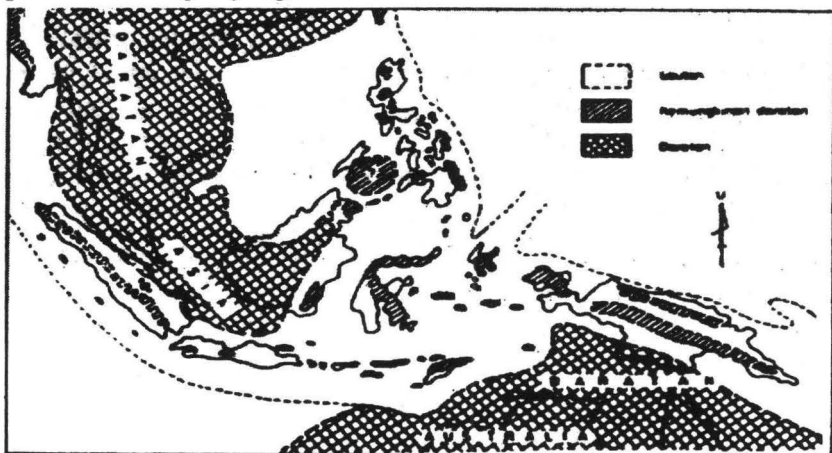
Meskipun orang Tetun banyak yang sudah menganut agama Katolik upacara-upacara tradisional yang berasal dari agama asli mereka masih dijalankan. Mereka masih juga percaya pada roh-roh yang menghuni alam sekelilingnya, seperti di batu-batu, hutan, dan di pohon-pohon.

Dalam perkembangannya, agama Katolik banyak membantu meningkatkan taraf pengetahuan orang Timor Timur. Peranan agama ini juga besar dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

2. Prasejarah

Dalam zaman-zaman geologi yang lampau Kepulauan Indonesia selalu dipengaruhi proses-proses alam yang menyebabkan perubahan daratan menjadi lautan atau sebaliknya. Perubahan-perubahan itu disebabkan oleh gerakan-gerakan pengangkatan dan penurunan atau disebut orogenesis; oleh kegiatan berbagai gunung berapi, gempa bumi, perubahan aliran sungai, dan sebagainya. Salah satu proses orogenesis yang dinamakan orogenesis Larami menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan selama zaman berikutnya yaitu zaman Tersier. Daratan Asia terletak di sebelah barat laut dan daratan Australia terletak di sebelah tenggara lautan tersebut.

Pulau Timor sejak zaman dahulu telah dihuni oleh manusia. Hal itu dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan-peninggalan mereka. Benda-benda itu merupakan alat yang dipergunakan untuk mengolah alam. Teknologi manusia pada tingkat permulaan memang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yaitu untuk mengolah bahan makanan berupa daging binatang dan umbi-umbian. Alat-alat itu dibuat dari kayu, batu dan tulang dengan cara sederhana. Bahan baku itu tentu dengan mudah dapat diperoleh dari alam sekitarnya. Peninggalan prasejarah yang ditemukan di daerah Timor Timur banyak mempunyai persamaan dengan yang ditemukan di daerah Indonesia lain.



Peta: Asia Tenggara pada Permulaan Zaman Tersier

Corak kehidupan manusia sesudah bumi mengalami zaman peng-es-an atau sesudah zaman *Pleistosen* tidak dapat ditelusuri seluruhnya, kecuali beberapa aspeknya saja. Dari segi teknologis masa- masa berburu (teknologi *paleolitik*) dapat ditemukan alat-alat yang terbuat dari batu. Pada tingkat ini di Indonesia dikenal tradisi pembuatan alat-alat dua macam bentuk pokok: tradisi kapak *perimbas* dan tradisi *serpih*. Pada kala plestosen akhir alat-alat lain yang digunakan manusia berasal dari tulang dan tanduk binatang. Bukti-bukti itu ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

Di antara perkakas-perkakas batu hasil buatan manusia plestosen yang menonjol di Indonesia ialah kapak perimbas, yakni sejenis kapak yang digenggam, berbentuk besar, dan kuat. Tradisi kapak perimbas di Indonesia mempunyai persebaran yang luas dan khususnya berkembang di tempat-tempat yang banyak mengandung bahan batuan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penemuan-penemuan di Sumatra Selatan (Lahat), Lampung (Kalianda), Kalimantan Selatan (Awang-bangkal), Sulawesi Selatan (Cabbengge), Bali (Sembiran, Trunyan) Sumbawa (Batutring), Flores (Wangka, Maumere, Ruteng), dan Timor (Atambua, Kafememanu, Noelbaki).

Alat-alat serpih yang pernah ditemukan di Pulau Timor dapat digolongkan sebagai alat masif karena berukuran besar dan tebal. Alat-alat semacam itu terdapat pula di Flores, tetapi berbentuk kerucut dan melebar. Alat-alat ini terutama ditemukan di daerah Atambua, di daratan Belu sebelah utara. Diduga temuan itu berasal dari zaman Plestosen, mengingat letaknya dalam lapisan kerikil Ainaro, yang ternyata mengandung sisa-sisa fosil *stegodon* (Gajah Purba).

Alat-alat yang tergolong serpih bilah ditemukan di sekitar danau air asin bernama Gassi Liu (atau *Gassi Issi*) Danau itu terletak di pantai utara Timor Timur antara 20-25 km di sebelah timur Baucau. Jenis- jenis serpih bilah itu meliputi penusuk (lancipan), serut dan pisau. Serpihan bilah yang diduga dari tingkat paleolitik ditemukan di sekitar Sagadat, sebelah tenggara Laga yang berada kira-kira 15 km di sebelah timur Baucau.



Kapak Genggam Temuan ceruh III

Pada masa prasejarah di Timor Timur, ditemukan bukti-bukti lukisan dinding di gua-gua yang juga ditemukan di tempat-tempat lain di Indonesia. Di Timor Timur lukisan di dinding gua itu terdapat di gua Ili Kere Kere, di Tutuala Kabupaten Lautem.

Bukti-bukti lain pada masa prasejarah di Timor yang ada hubungannya dengan temuan di tempat lain di Indonesia adalah manik-manik. Di Indonesia pemakaian manik-manik umum sekali, sejak dahulu hingga sekarang. Pada tingkat kehidupan manusia di gua-gua, manik-manik dibuat dari bermacam-macam bahan, seperti kerang atau batu akik, kaca dan tanah liat yang dibakar.

G.P. Rouffaer telah menulis tentang jenis manik dari kaca yang disebut *mutisalah* yang berasal dari Kepulauan Timor. Dari penelitiannya, ia berpendapat bahwa *mutisalah* di Timor sama dengan *mutisalah* yang ditemukan di Cambay. Kemungkinan besar dari Cambay ini *mutisalah* menyebar ke Timor pada abad ke-15.

Pada masa lalu manik-manik berfungsi sebagai benda pusaka atau sebagai alat tukar (jual beli) oleh karena itu hanya orang kaya yang memilikinya. Di Timor istri-istri pemuka masyarakat mengenakan manik-manik pada acara-acara pesta.

3. Kerajaan-kerajaan Tradisional

Bukti-bukti bahwa daerah Timor Timur tidak dapat dipisahkan dari wilayah Indonesia lainnya, semakin jelas terlihat pada abad ke-14.

Menurut catatan sejarah, Pulau Timor sudah dikenal oleh orang-orang di kepulauan lainnya di Nusantara ini, setidaknya sejak abad ke-14. Jadi, jauh sebelum masuknya orang Portugis. Di dalam naskah *Negarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca (1365) dapat dibaca bahwa Pulau Timor disebut bersama-sama dengan pulau-pulau Nusantara lainnya. Pulau itu dikelompokkan ke dalam nama tempat yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikatakan pula bahwa penduduk pulau itu mengirim hasil-hasil buminya ke istana kerajaan Majapahit di Pulau Jawa.

Pengiriman hasil-hasil bumi seperti itu disebut *upeti*. Artinya, suatu pemberian dari pihak yang satu kepada pihak yang lain diikat oleh hubungan tertentu. Hubungan itu dapat antara "bawahan" dengan "atasan" dan itu berarti bahwa yang satu merasa dilindungi dan yang lain melindungi keamanannya. Hubungan itu dapat juga berarti adanya persahabatan antara dua kerajaan. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang pada abad ke-14 sedang berjaya menguasai dan "diakui" kekuasaannya oleh "seluruh" kerajaan di Kepulauan Nusantara. Apa pun bentuk hubungan itu, yang penting untuk dicatat adalah bahwa Timor telah dikenal oleh penduduk yang menetap di lain pulau di Nusantara. Sebaliknya, penduduk Timor pun berarti telah mengenal pula penduduk lain yang menetap di pulau-pulau lain.

Sebelum kedatangan orang Portugis, penduduk Timor telah mengenal tata-cara mengatur pemerintahan. Mereka mengenal sistem kekuasaan tunggal, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya, kekuasaan pusatnya hanya merupakan lambang persatuan saja. Dalam prakteknya lebih berkaitan dengan upacara kepercayaan, tata cara hubungan di antara kelompok-kelompok suku-bangsa yang berlainan. Hal itu membuktikan adanya kesatuan wilayah yang lebih besar dan luas yang dapat merangkul berbagai suku bangsa yang mendiami Pulau Timor.

Sebagian besar penduduk Timor percaya bahwa dirinya berasal dari Wehale, di daerah Belu Selatan. Kekuasaan tunggal yang disebut *Maromak O'an* diakui bersama, baik oleh suku bangsa Atoni maupun suku bangsa Belu. Dalam studi H.G. Schulte Nordholt disimpulkan bahwa kekuasaan *Maromak O'an* diakui bersama oleh suku bangsa Atoni dan suku bangsa Belu; atau oleh dua sukubangsa terbesar di Pulau Timor. Di daerah Atoni kekuasaan tunggal tersebut dikenal dengan nama *Liurai-Sonba'i*.

Masyarakat tradisional Timor percaya bahwa seorang *liurai* sebagai keturunan dari "Yang Maha Terang". Kekuasaannya dipandang bersifat religius-magis. Pandangan inilah yang menjadi dasar pengangkatan *liurai* berdasarkan garis keturunan. Susunan masyarakat adat menempatkan *liurai* pada puncak kekuasaan kerajaan. Sebuah kerajaan membawahi beberapa *dato* atau disebut juga kepala reino yang bersifat mandiri dalam hal mengatur wilayah kekuasaannya. Dalam hierarki selanjutnya di bawah *dato* terdapat sejumlah kepala suku. Berturut-turut kepala-kepala di bawah kepala suku adalah *knua* dan kepala keluarga di setiap "*uma kain*".

Berdasarkan hasil penelitian L. Berthe dan C. Friedberg mengenai orang Bunaq, suku bangsa ini juga pernah mengakui kekuasaan tertinggi yang berpusat di Wehale. Orang Bunaq yang mendiami daerah Lamaknen (Timor Barat) menganggap dirinya sebagai vasal atau kerajaan di bawah pengaruh dari kekuasaan Wehale. Di wilayah Timor Timur, orang Bunaq yang mendiami daerah sekitar Gunung Lakus semuanya mengakui sebagai vasal dari Suai (suku bangsa Belu), sedangkan Suai sendiri merupakan bagian dari Wehale juga. Di samping itu, orang Bunaq di Lamaknen mengatakan bahwa pusat suku bangsa Kemak di Marobo pun termasuk wilayah Wehale.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Wehale pernah memainkan peranan penting dalam menyatukan Pulau Timor di bawah satu kekuasaan tunggal. Perkiraan di atas diperkuat dengan adanya sumber Portugis yang mengatakan bahwa di sebelah timur Pulau Jawa terdapat pulau-pulau dalam jumlah yang banyak sekali,

di antaranya ada sebuah (pulau) yang mereka namakan Timor yang mempunyai seorang raja yang berdiri sendiri.

Seperti telah dikatakan di atas, kekuasaan tunggal bukan merupakan kekuasaan absolut atau mutlak. Ia hanya sebagai lambang persatuan saja. Ia dianggap sebagai penjaga benda-benda adat yang suci (sakral). Itu berarti bahwa ia juga memiliki sifat-sifat yang sakral sehingga tidak diperbolehkan meninggalkan tempatnya. Ia hanya boleh "makan dan minum, duduk dan tidur" saja. Kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan raja-raja setempat.

Uraian di atas menjadi jelas ketika berita Fa-Hien dari Cina (1436) yang mengatakan bahwa Pulau Timor yang terletak di sebelah timur Pulau Madura mempunyai dua belas pelabuhan (bandar) atau pusat perdagangan, masing-masing di bawah seorang kepala.

Menurut kepercayaan setempat, Maromak O'an berasal dari langit. Hal itu murip dengan pandangan orang Belu sebab nama Maromak O'an berartit "putera Tuhan". Orang Atoni juga mengatakan bahwa pemimpin datang dari luar, yakni datang dari timur, tempat matahari terbit (*neon sair*), sedangkan penduduk yang lebih dahulu menetap dianggap "muncul dari bawah tanah".

Di samping Maromak O'an yang "hanya boleh makan, minum dan tidur untuk menjaga benda-benda sakral di dalam *uma lulik* (rumah pemalik)", ada juga penguasa aktif dengan sebutan liurai. Liurai adalah penguasa kerajaan (*rai* atau *reino*). Di setiap kerajaan terdapat dua orang penguasa kerajaan terdapat dua orang penguasa yang masing-masing dinamakan *macair fukun* dan *dato uain*. Kedua tokoh ini masing-masing berasal dari-dua klen bangsawan yang ada di kerajaan tersebut dan tinggal di desa-desa yang berbeda. Masing-masing membawahi sejumlah kepala-kepala yang memimpin berbagai kelompok seketurunan.

Macair Fukun dan *dato uain* kedua-duanya duduk dalam berbagai pertemuan yang diadakan oleh kerajaan. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam pertemuan itu. Di samping itu, mereka mempunyai peranan sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan yang timbul

di wilayah kekuasaan masing-masing. Dalam pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil, mereka tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dengan cara bermusyawarah dengan para orang tua terutama dari golongan bangsawan.

Orang Waiwiku-Wehale menganggap ada tiga liurai, yakni yang berkedudukan di Fatu Aruin (sebelah utara Wehale), Sonba'i (pemimpin orang Atoni), dan seorang liurai di Suai-Kamanasa (daerah Belu yang terletak di Timor Timur). Dalam sistem politik tradisional ini ditemukan ada empat unsur: Maromak O'an bersama tiga liurainya. Jumlah empat itu menarik jika dikaitkan dengan catatan Pigafetta ketika pada 1522 berlabuh di Batugede, pantai utara Timor Timur, yang menulis: di balik pulau ada empat orang bersaudara yang menjadi raja dari pulau (Timor) itu.

Dalam tradisi-tradisi setempat kita selalu kembali kepada angka empat sebagai daerah inti Wehale-Waiwiku. Dari sudut orang Atoni, istilah liurai dipakai untuk menunjukkan seluruh wilayah Waiwiku-Wehale dan daerah pengaruhnya di tanah Belu. Dengan demikian istilah Liurai-Sonba'i meliputi gabungan atau federasi dari wilayah kekuasaan keduanya, baik yang dikuasai oleh liurai (orang Belu) maupun oleh Sonba'i (orang Atoni).

Pembagian inti dalam dua unsur dan kemudian membelah lagi menjadi empat bagian merupakan struktur dasar pada masyarakat tradisional. Pandangan serba dua juga mempengaruhi alam pikiran dan tata kehidupan masyarakat Pulau Timor. Kedua unsur itu dilihat sebagai pasangan, seperti Laut Sawu yang cukup teduh disebut sebagai laut betina atau perempuan, sedangkan Laut Timor yang ganas bergelombang disebut sebagai laut laki-laki.

Pada tahun 1642, kekuasaan tertinggi di Wehale jatuh akibat serangan orang Tupas yang dibantu oleh tentara Portugis dan kaum penginjil Ordo Dominikan. Sejak itu para liurai setempat bertindak sebagai penguasa tertinggi di daerahnya masing-masing. Besar kecilnya kekuasaan liurai tergantung pada kondisi lokal dan kepribadian liurai itu sendiri. Itu juga berarti soal kemampuan pribadi liurai untuk dapat bertindak sebagai seorang penguasa sangat menentukan.

Pada zaman penjajahan Portugis, kedudukan liurai makin lama makin terdesak. Ini dapat dimengerti karena Portugis tidak menginginkan liurai mempunyai kekuatan yang dapat mengancam kedudukannya di Timor Timur. Para liurai yang boleh meneruskan pemerintahannya harus mengakui kedaulatan Portugal. Mereka menerima pengangkatan dari gubernur Portugal dan diberi sebutan *cornel* (kolonel). Para penasihatnya kemudian disebut sebagai *conselheiro* dan pembesar lain juga diangkat oleh pemerintah kolonial setelah liurai memberi persetujuannya.

Selain kedua pimpinan tradisional di atas, juga ada yang disebut *chefe de suco*. Kedudukan pemimpin tradisional ini sama dengan pemimpin eksekutif kerajaan, yaitu *macair fukun* dan *dato uain* yang disebut di atas. Namun, di dalam kenyataannya kedudukan *macair fukun* dan *dato uain* itu lebih efektif dari *chefe de suco* dalam hal mengurus dan mengatur masalah-masalah pemerintahan yang ada di wilayah desa.

Pengangkatan *chefe de suco* berdasarkan pemilihan dari warga kerajaan yang bersangkutan. Berbeda dengan pemilihan atas *macair fukun* dan *dato uain*, pengesahkan kedudukan *chefe de suco* harus diberikan oleh pemerintah kolonial Portugis. Tugas dari *chefe de suco* ialah menyampaikan surat-surat perintah, memungut pajak dan membantu mengkoordinasi pelaksanaan sensus. Dalam pelaksanaan tugas, kedudukan *chefe de suco* lebih merupakan sebagai perantara antara lingkungan pemerintah kolonial Portugis dengan lingkungan penduduk pribumi.

RANGKUMAN

Asal-usul penduduk yang berdiam di Timor Timur sama dengan penduduk yang berada di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya memang terlihat adanya perbedaan ciri-ciri fisik. Akan tetapi, jika diperhatikan ciri-ciri itu sama dengan ciri penduduk yang hidup di kepulauan bagian timur Indonesia. Demikian pula dengan bahasa yang ada di Timor Timur. Asal-usul bahasa di Timor Timur sama dengan bahasa yang

berkembang di lain wilayah di Indonesia. Meskipun terdapat banyak perbedaan, jika diperhatikan tampak masih ada persamaannya.

Dilihat dari kondisi alamnya, kesuburan tanah Timor Timur berbeda-beda dari satu daerah yang satu dengan daerah lainnya. Pada umumnya pertanian merupakan lapangan kegiatan orang Timor Timur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, cara bercocok tanamnya masih sangat sederhana. Selain bertani dan berladang, orang Timor Timur juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang-bidang peternakan, perdagangan dan usaha-usaha lain. Hampir sama dengan bidang pertanian, bidang-bidang yang disebut itu juga dilakukan secara sederhana. Meskipun wilayah Timor Timur dikelilingi oleh laut; tampaknya potensi lautnya belum dikelola dengan sebaik-baiknya untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan hidupnya.

PERTANYAAN

1. Dari mana asal-usul penduduk Timor Timur? Terangkan dengan jelas!
2. Di mana letak wilayah daerah Wallacea? Dan apa ciri daerah Wallacea itu? Sebutkan dan terangkan dengan jelas.
3. Coba jelaskan gelombang-gelombang datangnya migrasi dari Benua Asia ke bagian timur Indonesia!
4. Mengapa pada umumnya tanah di Timor Timur kurang cocok untuk bercocok tanam? Dengan teknologi macam apa tanah Timor Timur dapat digarap dengan sebaik-baiknya? Terangkan dengan jelas.
5. Ada berapa golongan roh yang dikenal oleh orang Timor Timur? Sebutkan dan terangkan dengan jelas.

BAB II

PENJAJAHAN PORTUGIS

Abad ke-16 dan ke-17 merupakan awal penaklukan negeri-negeri Asia oleh bangsa-bangsa kulit putih, khususnya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mereka memang bangsa "penguasa laut", dengan kapal-kapal layar yang khas, datang ke negeri-negeri Asia, terutama untuk kepentingan ekonomi perdagangan dan kemudian juga untuk penyebaran agama, khususnya agama Kristen-Katolik.

Di dalam hubungannya dengan perjalanan sejarah Indonesia, di antara bangsa-bangsa kulit putih yang akan mempunyai sejarah yang panjang di dalam penjajahan di negeri kita adalah Belanda dan Portugis.

1. Masa Awal Kehadiran Portugis

Kehadiran Portugis di Timor Timur tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran penduduknya di kota pelabuhan Malaka. Karena keinginannya yang kuat ke Asia untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa, setelah menduduki Malaka pada tahun 1511 itu, Portugis melanjutkan pencahariannya ke daerah-daerah sebelah timur. Tujuannya adalah Maluku yang terkenal dengan hasil cengkihnya; dan Portugis memang bangsa asing pertama yang menemukan Maluku.

Di dalam perjalanannya ke Maluku itu, bangsa Portugis dipandu oleh seorang nakhoda berkebangsaan Melayu, bernama Ismail sebagai petunjuk jalan. Ia memang mengetahui jalur lintas di daerah ini. Dari Malaka, ia menyusuri pantai utara Jawa, Bali, Lombok melewati pulau yang kemudian dinamakan Flores (berarti bunga), kemudian melewati Alor, Wetar, Kisar dan menyeberang sampai ke Pulau Banda.

Tome Pires, seorang penulis Portugis, di dalam bukunya: *Suma Oriental* (1514) telah menyebutkan pulau-pulau tertentu penghasil utama barang dagangan yang sangat dibutuhkan. Disebutkan Timor adalah penghasil kayu cendana, Banda penghasil utama pala dan Maluku penghasil utama cengkih. Tentang Timor, juga ada yang menyebutkan hasilnya yang penting ialah madu dan lilin. Berita ini berawal dari seorang Kapitan Portugis di Malaka yang dikirim kepada Raja Manuel. Di samping itu juga diberitahukan bahwa untuk melakukan perjalanan ke Timor diperlukan kapal berukuran besar yang dapat memuat 500 ton barang. Seorang yang bernama Duarte Barbosa memberitahukan bahwa pulau ini ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Arab dan Jawa untuk mengambil kayu cendana. Keadaan yang ditulis oleh Duarte Barbosa termuat dalam '*Livro em que se da relacao do que viu e Ouviu no Oiente*'. (buku tentang apa yang dilihat dan didengar di negeri Timur). Sejak itu telah lahir berbagai dokumen yang memberitakan hubungan dengan Malaka dan Timor. Walaupun telah menemukan Timor dan telah melakukan hubungan perdagangan secara "tetap", Portugis belum mendirikan sebuah pelabuhan dagang di pulau ini. Hal itu disebabkan antara lain oleh hal-hal seperti berikut.

1. Untuk meletakkan dasar kekuasaan di sebelah timur dari Goa dan Malaka, konsentrasi usaha dipusatkan di Maluku (Ternate).
2. Karena kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa bertambah kuat dan meluas, Portugis memilih jalan pelayaran menyusuri pantai selatan Kalimantan dan Sulawesi; jalur ini lebih singkat untuk sampai ke Ternate.
3. Karena pertimbangan ekonomis dan ketiadaan personal yang cukup.

Dapat dikatakan bahwa pada abad ke-16 belum ada pemukiman Portugis di Pulau Timor, memang pernah ada usaha untuk menetap di Mena, tetapi tidak berhasil. Diberitakan pula bahwa pada tahun 1556 Padre Antonio Taveira telah membaptis 5.000 orang di Timor, tetapi tidak dijelaskan tempat tinggal dari orang-orang yang berhasil dibaptis tersebut. Pada periode ini kegiatan Portugis di kawasan ini lebih bersifat penyebaran Injil dan perdagangan kayu cendana dari pada kegiatan politik dan militer.

2. Perkembangan Agama Katolik

Penyebaran agama Katolik yang merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Timor Timur telah mengalami perkembangan, sejalan dengan datangnya orang-orang kulit putih, khususnya orang Portugis.

Di atas disebutkan nama Padre Antonio Taveira yang berhasil membaptis sekitar 5.000 orang Timor Timur. Pater yang amat besar jasanya sejak awal perkembangan agama Katolik itu pada mulanya menetap di Oecussi. Karena itu, namanya berhubungan erat dengan awal menetapnya orang Portugis di daerah ini. Dari sumber lain juga diketahui bahwa terdapat juga pedagang yang berhasil membaptis penduduk asli sebanyak 200 orang di Flores pada tahun 1559.

Di samping itu diberitakan pula bahwa telah ada orang Yesuit yang mencoba melakukan kegiatannya, tetapi gagal karena dicegah oleh pater-pater Dominikan. Demikian pula pada tahun 1559 itu ada seorang Pater yang bernama Melchior da Luz telah mengunjungi pantai Utara Timor, yaitu di daerah Muia.

Jika kita memperhatikan berbagai sumber, dapat diketahui bahwa sampai tahun 1561, kegiatan-kegiatan misi tidak dilakukan secara teratur. Pada tahun 1558 uskup pertama yang bernama Jorge de Santa Luzia untuk Malaka dan tiba di tempat tugasnya pada tahun 1561. Di dalam langkahnya untuk penyebaran injil di Timor, ia mengirimkan misionaris Dominikan yang pertama ke Solor; misionaris Dominikan yang pertama itu ialah; Pater Simao das Chagas dan Bruse Aleixo. Dengan kedatangan misionaris Dominikan itu, imam-imam Yesuit yang menetap di Sabu dan Rote harus meninggalkan daerah itu, karena adanya ketidaksenangan dari pater-pater Dominikan itu.

Untuk melaksanakan tugas penginjilannya, para pater Dominikan itu mendapat bantuan dari orang-orang Portugis yang lama menetap di sana. Sebagai warga yang sebangsa dan seagama, mereka bekerja sama membangun rumah tempat tinggal, gereja berukuran kecil, dan sebuah benteng di Solor. Bangunan benteng itu diperlukan karena adanya tantangan dari penduduk yang beragama Islam. Pada

waktu itu memang pekerjaan misi tidak berjalan dengan lancar karena adanya tantangan dari orang-orang Islam di daerah itu.

Walaupun demikian, pekerjaan penginjilan pater-pater Dominikan itu tetap berjalan. Hal itu terlihat ketika Pater Simao da Chagas pada tahun 1583, melanjutkan pengiriman missionaris tiap tahun dari Orde Dominikan sebanyak dua orang ke daerah ini. Selanjutnya pada bulan April 1587 didatangkan lagi lima orang pater ke Solor. Kapitan benteng yang pertama di Solor ini berasal dari ordo dominikan di Malaka dan disahkan oleh Capitao-Mor Portugis di Malaka. Cara pengangkatan ini berlangsung sampai tahun 1576, karena selanjutnya berlaku peraturan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan peraturan itu menetapkan Kapitan benteng di Solor langsung berada di bawah Raja muda di Goa. Tentu saja Ordo Dominikan tidak senang dengan peraturan baru ini, tetapi pengaruhnya yang telah dimiliki selama ini tetap dapat dilanjutkan.

Masyarakat campuran Portugis-Kristen (Katolik) makin meluas dan pada sekitar 1600 terdapat 27 kampung di Solor, Flores dan pulau-pulau sekitarnya berada di bawah pengaruh Ordo Dominikan. Pada waktu itu Solor merupakan pusat kegiatan utama Portugis, sedangkan Ende merupakan pusat kegiatan utama yang kedua. Walaupun mengalami berbagai rintangan yang tidak ringan, kegiatan penginjilan dilanjutkan. Pada tahun 1641 Pater Antonio de Santo Jacinto berangkat ke kerajaan-kerajaan Mena, Lifao dan Amanaban. Setelah beberapa hari tiba di Mena, pada tanggal 24 Juni 1641, ia berhasil mempermandikan Ratu Mena bersama putra sulungnya Yohannes; dan bersamaan dengan itu ikut pula dipermandikan beberapa orang rakyatnya. Beberapa saat sebelum kapal tumpangan Pater Jacinto meninggalkan Mena kembali ke Larantuka, utusan raja Amanaban datang dan meminta untuk mengajarkan ajaran agama Katolik.

Pada bulan Agustus 1641 Pater Jacinto mengirimkan missionaris dari Larantuka ke beberapa tempat. Pater Bento Serrao dan Pater Manuel da Resurreicao dikirim ke Mena. Pater Pedro de Santo Jose dan Pater Alvaro de Tavarro yang berdiam di *Lifau* dikirim ke Ambeno.

Selanjutnya, yang dikirimkan ke Amanaban ialah Pater Jacintao de Saonto Demingos dan Crisostomo de Santiago. Dengan demikian, pada akhirnya raja-raja di kerajaan-kerajaan Mena, Lifau dan Amanaban berhasil dibaptis pada waktu itu. Setelah raja-raja ini berhasil dikristenkan, diadakan perjanjian-perjanjian dengan Portugis. Menurut seorang penulis, Schulte Nordholt, adanya perjanjian persepakatan antara Portugis (Ordo Dominikan) dengan raja-raja setempat itu, berarti pula sejak itu kerajaan-kerajaan ini menjadi sekutu-sekutu Portugis yang kuat dan dapat dipercaya. Raja-raja setempat itu juga tidak lagi perlu membayar upeti, sebagai pernyataan takluk kepada dua raja tradisional yang dianggap terkuat, yaitu kepada Wehale dan Sonba'i.

Pada tahun 1642 sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh seorang pater: Lucas da Cruz, bersama 90 orang prajurit dipimpin oleh Francisco berangkat ke Wehale. Tujuan rombongan ini tidak hanya untuk melakukan penyebaran injil tetapi juga untuk menaklukkan kerajaan ini. Penaklukan itu diperlukan oleh Portugis, karena ternyata Raja Wehale bersekutu dengan Kerajaan Tallo, yaitu kerajaan kembar bersama Goa yang memiliki pelabuhan utama Makasar. Ekspedisi pertama ke pedalaman Timor ini berhasil dengan baik, karena pada akhirnya Raja Wehale beserta keluarga dan warga Kerajaan Wehale pada tahun 1642 itu, berakhirlah kekuatan kerajaan tradisional di daerah ini.

Pada tahun 1642, kota pelabuhan Malaka jatuh dari tangan Portugis ke Belanda akibatnya sebagian besar Indo-Portugis meninggalkan kota ini dan menetap di kota pelabuhan Makasar. Namun kota pelabuhan Makasar tidak aman lagi bagi orang-orang Indo-Portugis (mestico) ini karena Belanda berusaha menguasai Sulawesi Selatan; karena itu mereka pindah ke Larantuka. Karena ketertarikan pada perdagangan kayu cendana, ada di antara mereka yang berusaha untuk menetap di Pulau Timor, terutama di Mena dan Lifau, tetapi mereka belum mendirikan benteng. Baru pada sekitar tahun 1645, seorang Pater Dominikan bekerja sama dengan beberapa keluarga *Mestico* memilih sebuah tempat di dekat Kupang sebagai pemukiman. Di tempat inilah mereka mendirikan sebuah benteng.

Dalam perkembangan selanjutnya, langkah-langkah kegiatan missionaris antara lain dengan kunjungan uskup Malaka Manuel de Santo Antonio, ke Pulau Timor dan ke missionaris di Lifau Ambeno. Kunjungan itu menunjukkan pertanda besarnya perhatian pimpinan gereja terhadap perkembangan kegiatan pengkristenan di Timor Timur.

Di tengah-tengah giatnya pekerjaan misionaris di Timor Timur, lahir perbedaan pendapat di antara uskup Manuel dos Santos Antonio dengan Gubernur Francisco de Mello da Costa. Sebagai akibat pertentangan itu, Pater Manuel de Pello dari Dili dan Pater Bartolomeu Pereira dari Batugede melakukan penentangan terhadap gubernur baru dan keduanya mendapat bantuan dari penduduk asli yang telah berada di bawah pengaruhnya.

Dalam abad ke-18 ini dapat dikatakan agama Katolik telah berkembang dengan sangat pesat. Hal itu dapat dibuktikan oleh berita tertulis yang menyebutkan bahwa tahun 1780 di Pulau Timor telah didirikan tidak kurang dari 50 bangunan gereja. Dalam akhir abad ke-18 ini juga terjadi kesulitan karena adanya pertentangan antara pihak misionaris dengan gubernur. Pertentangan itu ber-sumber pada adanya tuduhan dari gubernur bahwa Pater Francisco Luis da Cunha yang telah diangkat sebagai Vikaris Jenderal telah mendorong Raja Manatuto untuk melawan orang-orang Portugis.

Setelah melalui krisis-krisis pada abad ke-18, memasuki abad 19, walaupun masih terdapat kesulitan yang harus dihadapi, terjadi juga hal yang memperlancar jalannya kegiatan pengkristenan. Tahun 1820, Superior Dominikan Pater Frela di Dili diangkat sebagai penasihat untuk mengangkat para gubernur jenderal. Selanjutnya 39 tahun kemudian, yaitu pada 1859, telah terjadi perjanjian baru antara Portugis dengan VOC-Belanda yang memberikan jalan yang lebih terbuka bagi misionaris Katolik untuk berkarya.

Dengan tujuan untuk lebih memperlancar kegiatan-kegiatan misionaris di Timor, pada 1874 Timor dimasukkan ke dalam Diosis Macao. Uskup Macao ternyata sangat berminat untuk memperluas kegiatan-kegiatan misionaris dan untuk maksud itu ia menugaskan Pater Antonio Joaquim de Medeiros melakukan kunjungan pastoral

ke pelbagai tempat kegiatan misionaris di seluruh wilayah Timor. Hasil laporan kunjungan pastoral ini, diangkatlah Pater Meideiros menjadi vikaris jenderal dan menugaskannya ke Timor bersama tujuh orang imam lainnya. Mereka yang ditugaskan itu telah membagi wilayah tugasnya masing-masing di Timor.

Di dalam melaksanakan tugasnya itu, misionaris tidak hanya menyebarkan ajaran-ajaran dan ritual-ritual agama Katolik, tetapi juga melangkah untuk memperbaiki aspek-aspek kehidupan yang lain. Aspek yang mendapat cukup perhatian ialah bidang pendidikan. Dibukalah sekolah-sekolah, antara lain di Dili, di Monatuto, Bariquca, Liquica, dan Bazartete.

Abad ke-20 memberikan suatu proses yang kemudian melahirkan Diosis Dili berdasarkan *Bula Solemnibus Conventionibus* dari Paus XII pada 4 September 1940. Berdasarkan ketentuan itu, pada 18 Januari 1941 diangkatlah Administrator Apostolik yang pertama, yaitu Pater Jaime Garcia Gorelart. Pada tahun 1945 ia kemudian diangkat sebagai Uskup Diosis Dili yang pertama.



Gereja Moteal Dili

3. Orang-orang Tupas

Pada tahun 1566 pater-pater dari Ordo Dominikan berhasil mendirikan benteng batu di Solor, dengan tujuan untuk melindungi orang-orang atau kampung-kampung Kristen yang telah ada dan mulai berkembang di sana. Ketika mereka datang ke Timor (Solor) ini, para pater itu membawa orang-orang lain dengan pelbagai macam pekerjaan, seperti pedagang, pembantu, dan budak. Mereka yang dibawa serta itu tidak semua berbangsa Portugis, tetapi berasal dari Afrika, daratan Asia Tenggara dan ada juga dari India. Para pedagang, pembantu, dan budak itu menetap di sekitar benteng dan kawin dengan penduduk asli (pribumi).

Perkawinan mereka melahirkan anak-anak keturunan yang berkembang menjadi penduduk bermasyarakat sendiri di kampung-kampung sekitar benteng; terciptalah masyarakat *berdarah campuran* yang beragama Katolik dan berada di bawah naungan pemerintah Portugis. Masyarakat ini kemudian dikenal dengan nama: *Tupas* atau sering juga disebut dengan nama *Gente de Chapeu* orang yang memakai topi karena topi itu merupakan ciri khas dari penduduk Kristen di tempat ini. Istilah yang disebut terakhir itu (*Gente de Chapeu*), menurut seorang ahli, Charles Boxer, nama *Tupas* tidak ada hubungannya dengan *topi* tetapi berasal dari kata *Dravidia Tupassi* yang berarti juru bahasa. Kelompok masyarakat Tupas itu kemudian disebut oleh Belanda dengan istilah *Portugis Hitam*.

Di dalam perkembangannya kemudian kelompok masyarakat Tupas ini menjadi suatu kekuatan yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan politik di Timor. Di dalam persaingan yang terjadi di Timor karena perebutan pengaruh dan kekuasaan, golongan Tupas sering tampil sebagai penentu. Mereka tersebar di pusat-pusat perdagangan Portugis di benteng milik Ordo Dominikan di Solor. Sebenarnya, pusat pemukimannya di Larantuka. Sekitar dua abad kelompok masyarakat ini mampu mendominasi kekuasaan di kawasan Laut Sawu. Kelompok ini memang mampu mengembangkan kekuatannya bahkan juga bersaing dengan Ordo Dominikan, yang ratusan tahun yang lalu membawa mereka ke Timor Timur.

Hubungan perkawinannya dengan keluarga raja-raja setempat juga memberi kesempatan kepada mereka untuk memperoleh dukungan dari penduduk setempat.

Di dalam perkembangannya kemudian golongan Tupas mampu menanamkan pengaruh kekuasaannya di Pulau Flores dan juga ke Pulau Timur. Di dalam percaturan politik kekuasaan di daerah-daerah ini terdapat dua hal yang tampak dari golongan Tupas ini.

1. Posisi dan pengaruh golongan Tupas makin kuat. Hal ini justru makin memperkuat posisi Portugis. Karena mereka beragama Katolik mereka memihak Portugis. Akibatnya, usaha Belanda untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya dapat dicegah.
2. Kesatuan tradisional dari kerajaan-kerajaan asli (pribumi) telah dikalahkan dan dipecah belah. Akan tetapi, di lain pihak kekuatan kerajaan-kerajaan pantai yang memiliki pelabuhan makin menonjol. Oleh karena itu, kedudukan Sonba'i makin kuat. Dalam pada itu golongan Tupas juga memperkuat diri melalui perkawinan dengan putri raja-raja di pantai yang memiliki pelabuhan. Dengan demikian, golongan Tupas ini pun dapat pula menguasai perdagangan di daerah-daerah kekuasaannya.

Pada hakikatnya golongan Tupas memegang pimpinan kekuasaan politik dalam jangka waktu yang cukup lama dalam abad ke-18. Cara yang ditempuhnya terkadang dengan menyerang Portugis atau merangkul Belanda. Selain itu mereka sering melakukan serangan terhadap kerajaan-kerajaan pribumi. Namun, tidak jarang pula terjadi peperangan di antara mereka sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 1735 dan 1745, golongan Tupas melancarkan serangan terhadap Kupang, tempat pusat kekuasaan Belanda. Serangan yang cukup besar ialah serangan yang dilakukan pada tahun 1749. Serangan ini dikenal dengan Perang Penfui. Dalam perang itu golongan Tupas mengerahkan pasukan sekitar 50.000 orang di bawah pimpinan keluarga da Costa. Mereka mendapat bantuan dari beberapa raja, seperti Amarasi, Ambeno, Larantuka, dan Belu. Banyaknya bantuan dari pelbagai raja menunjukkan betapa

besarnya pengaruh golongan Tupas di Timor. Walaupun golongan Tupas mengerahkan pasukan yang berjumlah besar, kemampuan pengaturan siasat perang dari Belanda yang jauh lebih baik menyebabkan golongan Tupas mengalami kekalahan. Bahkan pimpinan utamanya Gaspar da Costa tertembak mati.

Kekalahan golongan Tupas dalam Perang Penfui pada tahun 1749 itu menyebabkan kekuatan dan pengaruh Portugis dan golongan Tupas menurun dan melemah. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa Belanda berhasil menguasai keadaan politik secara keseluruhan. Walaupun Perang Penfui mengakibatkan pergeseran kekuatan dan kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat, belum dapat dipastikan siapakah di antara mereka yang terkuat. Sebagai akibat dari Perang Penfui, semua raja yang memihak kepada golongan Tupas diasingkan oleh Belanda ke luar daerah Timor. Namun, masih saja terjadi perlawanan, misalnya pada tahun 1752, Amasari dan Amakano menyerang Belanda, tetapi dapat dikalahkan.

Untuk mempertahankan kekuasaannya, pada tahun 1756, Kompeni Belanda mengirimkan utusannya ke Timor yang berhasil mengadakan perjanjian dengan beberapa raja terkemuka, antara lain dengan Sonbai. Raja Sonbai tampaknya berusaha mengembangkan kekuasaannya dengan bersekutu dengan Belanda. Hal itu dilakukannya untuk mengimbangi kekuatan golongan Tupas. Setelah berhasil mengatasi kekuatan Tupas, Sonbai berbalik menentang Belanda, tetapi akhirnya Raja Sonbai ditangkap dan diasingkan ke Tanjung Harapan.

4. Propinsi Portugis

Dalam abad XVII tampaknya persaingan antara Portugis dan Belanda untuk menanamkan kekuasaan dan pengaruhnya di Nusantara berkembang lebih tajam. Salah satu daerah yang diperebutkan ialah Timor Timur. Untuk melancarkan usaha mereka melebarkan pengaruh dan kekuasaannya, kedua bangsa kolonial itu saling menyerang dengan menggunakan kekuatan senjata. Pada tahun 1602 para pedagang Belanda mendirikan organisasi (kongsi) dagang dengan nama *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau lebih

dikenal dengan nama *Kompeni*. Di dalam kenyataannya, Kompeni yang sebenarnya merupakan kongsi dagang ini juga diperlengkapi dengan kekuatan militer. Karena itu, di dalam melebarkan kekuasaan dan pengaruhnya, VOC juga menggunakan kekuatan militer.

Pada tahun 1613 Belanda (VOC) melakukan serangan ke pusat kekuatan Portugis di benteng Solor dan ini menyebabkan berpindahnya kekuatan mereka ke Larantuka. Dalam jarak waktu sampai tahun 1662, benteng di Solor berkali-kali mendapat serangan dan karena itu berkali-kali pula pindah tangan, dari Portugis ke Belanda dan sebaliknya dari Belanda ke Portugis. Ternyata keadaan yang demikian ini disadari sebagai hal yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pada tahun 1662 ditandatangani sebuah perjanjian perdamaian antara keduanya. Dalam perjanjian itu, ternyata benteng Solor tetap berada di bawah kekuasaan Portugis. Dengan perjanjian itu, berarti di kawasan Nusa Tenggara terdapat dua kekuatan kolonial yang saling berhadapan, yaitu Portugis (Ordo Dominikan dan Tupas) yang berpusat di Larantuka dan Belanda (VOC) yang berkedudukan di Kupang, tempat mereka mendirikan benteng pada tahun 1656. Dari segi agama, kekuatan-kekuatan pribumi setempat yang mendukung VOC secara berangsur-angsur menerima pengaruh Belanda dan menganut agama Protestan, karena memang Belanda menganut agama Protestan. Sebaliknya, orang-orang pribumi yang mendukung Portugis adalah penganut agama Katolik.

Walaupun di atas telah disebutkan bahwa golongan Tupas yang berpusat di Larantuka, bekerjasama dengan Portugis (Ordo Dominikan), di dalam situasi tertentu, golongan Tupas ini juga terkadang menentang orang Portugis dan memihak kepada Belanda atau pribumi setempat. Hal itu dapat terjadi karena memang kekuatan golongan Tupas sendiri terbagi dua yang masing-masing mempunyai pengaruh di lingkungan masyarakatnya, yaitu Antonio de Hornay dan Mateus da Costa.

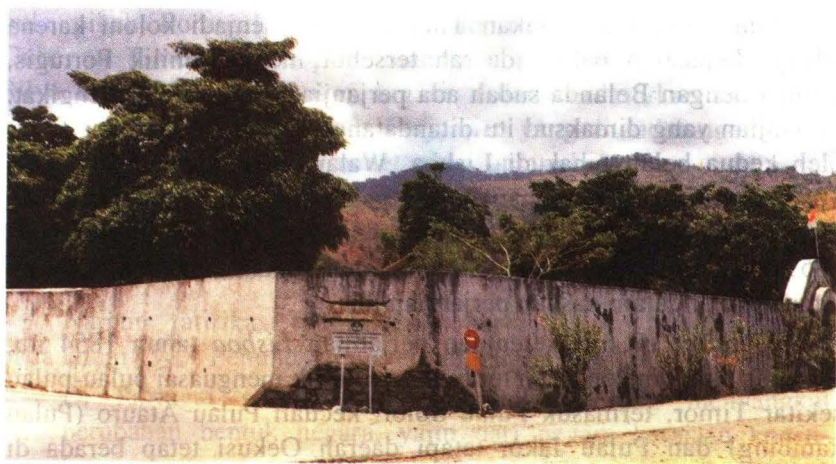
Tahun 1681 cara pemerintah Portugis di kawasan ini berubah karena sejak tahun itu daerah Solor dan Timor secara resmi dinyatakan sebagai bagian dari *Estado da India*; *Capitau-mor* dan

Timor secara resmi diakui sebagai daerah kekuasaan ibu kota Goa yang merupakan pusat kekuasaan Portugis di Asia. Langkah-langkah pemerintah di daerah ini sebagai *Capitau-mour* selalu mengalami kesulitan karena kedua kekuatan keluarga golongan Tupas, yaitu Hornay dan Costa tidak menghendakinya. Walaupun demikian, pada tahun 1702 pemerintah Portugis mengangkat Antonio Coelho Guerreiro sebagai penguasa setempat dan ia memilih Lifau sebagai tempat kediamannya. Kehadirannya ditentang oleh golongan Tupas, bahkan Lifau dikepung oleh Tupas, tetapi ia mampu bertahan sampai 1705. Karena itu Guerreiro dianggap sebagai awal mula pemerintahan Portugis di Pulau Timor. Karena adanya tantangan yang dihadapi, ia kemudian memindahkan tempat pemerintahannya ke Manututo dan memperkuat diri dengan mendirikan sebuah benteng.

Pada tahun 1769 pusat pemerintahan Portugis dipindahkan ke sebuah tempat yang dianggap lebih strategis yaitu Dili. Pemandahan pusat kekuasaan Portugis ini didasari oleh pertimbangan perdagangan kayu cendana dan kemudian juga didorong oleh kegiatan penyebaran agama Katolik oleh Ordo Dominikan.

Pada abad XIX Belanda mulai mengadakan eksplorasi pertambangan dan bidang ekonomi, seperti minyak, batu bara, garam. Demikian pula Portugis, telah mengambil ketetapan untuk tetap mempertahankan daerah-daerah yang telah dikuasainya selama ini. Kehendak mempertahankan kekuasaan itu, terutama juga karena dukungan kuat dari golongan Tupas yang memang telah mempunyai pengaruh yang amat kuat dan berbaur dengan penduduk setempat. Pertimbangan mempertahankan daerah kekuasaan itu lebih banyak didukung oleh alasan-alasan politik, agama, dan kebudayaan, tetapi tidak oleh alasan-alasan ekonomi.

Untuk memperkuat kedudukan, Portugis mulai memikirkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, khususnya Dili. Tahun 1834 Dili mulai dibangun dan pada tahun 1856 kota ini sudah berpenduduk 3017, di antaranya sejumlah 2047 telah beragama Katolik. Sementara itu pada tahun-tahun kemudian, telah terjadi perubahan dalam hal penempatan Timor Timur untuk pengaturan



Benteng Maubara di Kabupaten Liquica

jalan pemerintahannya. Sejak 1681 berada di bawah kekuasaan Portugis di Goa, tetapi ini hanya berlangsung beberapa tahun dan dipindahkan di bawah kekuasaan Portugis yang berpusat di Macao. Selanjutnya, pada tahun 1869 Gubernur yang berkedudukan sebagai penguasa di Timor Timur itu ditempatkan langsung dari pemerintah pusat di ibu kota Portugis, Lisboa.

Dalam abad ke-19 di Eropa juga terjadi banyak peristiwa yang memberikan pengaruh pada pemerintahan Portugis di Timor Timur. Berakhirnya perang Napoleon telah mendorong terjadinya beberapa perubahan karena adanya pendapat-pendapat baru di dalam negeri Portugis. Pada tahun 1821 telah diadakan perubahan yang amat penting bagi tata negara Portugis, yaitu perubahan konstitusi (undang-undang) yang melahirkan monarki yaitu lebih liberal dan dibentuknya Parlemen di negara ini. Konstitusi ini juga memperhatikan keadaan daerah seberang lautan dan sejalan dengan itu kedudukan Timor Portugis ditingkatkan menjadi *propinsi*.

Peningkatan kedudukan Timor Timur menjadi koloni karena adanya kepastian bahwa daerah tersebut menjadi milik Portugis, artinya dengan Belanda sudah ada perjanjian yang saling mengikat. Perjanjian yang dimaksud itu ditandatangani pada 16 Oktober 1854, oleh kedua belah pihak di Lisboa. Walaupun ditandatangani pada 1854, ratifikasi (pengesahan) untuk pelaksanaannya baru dilakukan oleh parlemen Belanda pada lima tahun kemudian, yaitu 20 April 1859. Itu pun setelah dilakukan perubahan dalam beberapa hal yang tercantum di dalam naskah perjanjian itu.

Menurut isi dan ketentuan perjanjian *Lisboa* tahun 1854 itu, Portugis harus melepaskan tuntutan untuk menguasai pulau-pulau sekitar Timor, termasuk Pulau Solor, kecuali Pulau Atauro (Pulau kambing) dan Pulau Jako, tetapi daerah Oekusi tetap berada di tangan Portugis. Demikian pula daerah Sutrana, Maubara menjadi wilayah Portugis. Sebaliknya, daerah Maukatar dipertahankan sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Ketentuan penting dari perjanjian ini ialah "*perbatasan besar*" yang membelah Timor menjadi dua bagian. Garis perbatasan itu dimulai di sebelah utara antara daerah Jenilu (Belanda) dan Kova (Portugis) sampai ke selatan antara wilayah Lakuen (Belanda) dan Suai (Portugis).

Di dalam masalah perbatasan ini, walaupun sudah ditentukan garis perbatasan besar pada tahun 1854 itu, tetap ada persoalan. Salah satu faktornya karena raja-raja pribumi setempat tidak diajak untuk ikut menentukan perbatasan yang ditentukan oleh kedua bangsa kolonial itu. Garis-garis perbatasan itu mengikuti perbatasan antara wilayah raja-raja pribumi, tetapi garis-garis perbatasan yang telah disetujui itu belum dianggap pasti. Karena itu, kebutuhan untuk perdamaian dengan membuat garis perbatasan yang lebih tepat semakin terasa. Sejalan dengan itu, pada tanggal 10 Juni 1893 diadakan perjanjian yang menetapkan bahwa kedua belah pihak bersedia mengadakan pengukuran dan pemetaan garis perbatasan setempat. Namun, di dalam kenyataannya, hasil perjanjian itu baru dilaksanakan pada lima tahun kemudian (1898). Waktu itu pemerintah Belanda menunjuk panitia yang dipimpin oleh F. Fokkens, Residen *Timor en Onderhoorigheden* (Timor dan kawasannya). Demikian

pula pihak Portugal menunjuk Dom Jose Celestino da Silva, Gubernur Timor. Panitia penentuan garis perbatasan F. Fokkens da Silva ini berhasil melakukan tugasnya dan berdasarkan itu kedua bangsa kolonial itu ditentukan. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1901 itu menetapkan, antara lain.

1. Belanda menyerahkan Maukatar kepada Portugis.
2. Portugis menyerahkan Noemuti, Tohakai, dan Tamiru Ailala kepada Belanda.

Namun, ratifikasi (pengesahan) perjanjian itu baru dilakukan pada tahun 1917. Penundaan itu terjadi karena dua hal:

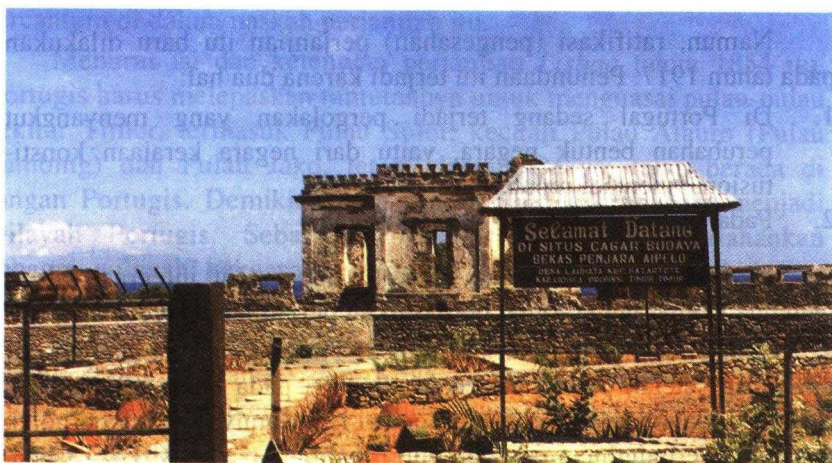
1. Di Portugal sedang terjadi pergolakan yang menyangkut perubahan bentuk negara, yaitu dari negara kerajaan konstitusional menjadi republik.
2. Pada tahun 1914 Perang Dunia I pecah.

Dengan demikian Pulau Timor, sampai saat integrasi dibagi oleh dua kekuasaan kolonial berdasarkan perjanjian tersebut di atas.

Konsolidasi kekuasaan Portugis di Timor Timur memang dapat dilakukan setelah proses pasifikasi diakhiri pada tahun 1912–1913. Namun di dalam negeri Portugis sendiri keadaannya sedang bergolak dan sulit. Terbunuhnya raja dan putra mahkota pada 1910 di Lisboa, demikian pula pecahnya Perang Dunia Pertama, dan juga proses pergantian bentuk negara kerajaan menjadi bentuk negara republik, merupakan faktor-faktor nasional dan internasional yang dihadapi oleh pemerintah Portugal ketika itu. Setelah melalui pergolakan, pada tahun 1926, pemerintah Portugal memperoleh seorang pemimpin yang kuat dan diktatorial, yaitu Presiden Antonio de Oliveira Salazar. Di bawah pemerintahan yang berusaha untuk membentuk Orde Baru yang disebut *Estado Novo* kedudukan Timor Timur dipertegas sebagai daerah jajahan. Tatanan masyarakat diubah, antara lain dengan membagi masyarakat dalam dua kelompok:

1. masyarakat yang disebut *Civilizado*. Kelompok yang (dianggap) telah "beradab",
2. masyarakat *Nao-Civilizado* kelompok yang (dianggap) belum beradab.

Dalam tatanan masyarakat itu terlihat adanya kelompok kecil yang disebut *civilizado* adalah mereka yang ikut dalam proses politik asimilasi ke dalam peradaban Portugis (*Civilizacao Portuguesa*). Untuk mencapai taraf peradaban itu mereka terlebih dahulu mengikuti pendidikan Portugis yang menanamkan nilai-nilai kebudayaan Portugis. Sedangkan sebagian besar anggota masyarakat disebut *Nao-civilizado* ("belum beradab").



Bekas Penjara Zaman Portugis di Aipelo

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Portugal ialah pengaturan administrasi di Timor Timur. Pengaturan yang dilakukan, antara lain di dalam undang-undang Kolonial (*Colonial Act*) tahun 1930 dan Piagam Organik Negara (*Organic Charter of The Empire*) tahun 1933. Dari dokumen-dokumen itu selalu terlihat adanya ketentuan dan usaha untuk menjadikan Timor Timur sebagai koloni dengan Portugis dalam satu kesatuan, yaitu kebangsaan Portugal (*Portuquese Nation*). Hal-hal yang demikian juga dianjurkan dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada tahun-tahun berikutnya, antara lain integrasi undang-undang kolonial dalam konstitusi pada tahun 1951 dan undang-undang Organik Daerah Seberang Lautan Portugis tahun 1953.

Hal yang amat penting sehubungan dengan langkah-langkah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Portugis ialah di bidang militer. Oleh karena itu, sejak tahun 1954 pemerintah kolonial memberikan izin kepada penduduk pribumi Timor Timur untuk menjadi anggota tentara yang dikenal dengan nama Tropas. Kebijakan itu kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan pelaksanaan *wajib militer* bagi rakyat Timor Timur. Sejak tahun 1961 pendidikan kemiliteran dilakukan secara lebih terorganisasi yaitu setiap tahun diadakan dua atau tiga kali angkatan pendidikan. Tiap-tiap angkatan pendidikan itu diikuti oleh 200 pelajar (calon) anggota Tropas. Sejak itu jumlah anggota Tropas dari penduduk pribumi makin bertambah dan sampai tahun 1975 telah ada 2.500 orang pribumi yang menjadi anggota Tropas, sedang orang Portugis yang menjadi Tropas di Timor Timur sebanyak 250 orang.

Di dalam kehidupan, di Timor Timur, telah ditempuh kebijaksanaan nasional utama dengan prinsip-prinsip kesatuan politik asimilasi spiritual dan budaya, disentralisasi pemerintah solidaritas ekonomi dan otonomi finansial.

Untuk menjalankan pemerintahannya pemerintah pusat di Timor Timur telah menyusun suatu sistem pemerintahan dengan *gubernur* sebagai "penguasa tunggal" dan tertinggi. Timor Timur merupakan salah satu propinsi seberang lautan *milik* Portugis. Sebagai penguasa tunggal gubernur memegang kekuasaan tertinggi yang menguasai lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Gubernur juga memegang jabatan sebagai *Chefe do Estado Maior*. Pengangkatan gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat di Lisboa atas usul Menteri Wilayah Seberang Lautan.

Di dalam melaksanakan tugasnya, gubernur dibantu oleh badan atau *lembaga perwakilan* dan badan atau *lembaga pemerintahan*. Badan perwakilan disebut *Concelho Legislativo* yang jumlah anggotanya sebanyak 14 orang dengan 11 orang dipilih dan 3 orang ditunjuk oleh gubernur. Badan Pemerintahan disebut *Concelho do Governo*. Anggotanya berjumlah 7 orang yang terdiri dari gubernur, panglima, pasukan militer, kepala keuangan dan kontabilites, keempatnya harus orang Portugis. Tiga anggota yang lain dari

kalangan raja, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Untuk menjalankan pemerintahan kolonial di propinsi ini dibentuk departemen-departemen atau dalam istilah Portugal disebut *Reparciao Provincial dos Servicos* yang terdiri atas.

1. *Servicos de Fazenda e Contrabilidade* = Penyelenggara Bidang Keuangan dan Perbendaharaan
2. *Servicos de Administracao* = Penyelenggara Bidang Administrasi Sipil
3. *Servicos de Florestas e Agricultura* = Penyelenggara Bidang Kehutanan dan Pertanian
4. *Servicos de Alfandegas* = Penyelenggara Bidang Bea dan Cukai
5. *Servicos de Economia* = Penyelenggara Bidang Ekonomi
6. *Servicos de Saude* = Penyelenggara Bidang Kesehatan
7. *Servicos de Obras Pabliqase e Transporter* = Penyelenggara Bidang Pekerjaan Umum dan Transportasi
8. *Servicos de Educacao* = Penyelenggara Bidang-bidang Pengajaran dan Pendidikan
9. *Servicos de Transportes Aereos Udara* = Penyelenggara Bidang Perhubungan
10. *Servicos de Meteorologia* = Penyelenggara Bidang Meteorologi
11. *Servicos de Veternaria* = Penyelenggara Bidang Kehewananan
12. *Servicos de C.T.T* = Penyelenggara Bidang PTT
13. *Servicos de Marinha* = Penyelenggara Bidang Pelayaran
14. *Servicos de Aeronautica Civil* = Penyelenggara Bidang Penerbangan Sipil
15. *Servicos de Gabineter* = Penyelenggara Administrasi Kantor Gubernur

Di samping ke-15 kantor yang membidangi pelbagai aspek kehidupan penyelenggara pemerintahan itu, masih terdapat kantor-kantor penyelenggara urusan dalam bidang-bidang geografi, kepolisian, baik polisi untuk ketertiban umum maupun polisi rahasia (PIDE), yang mengurus bidang keimigrasian, juga ada sebuah biro penyelenggara untuk turisme.

Dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah, Propinsi Timor Timur terbagi atas 12 *conselho* dan satu kota madya. Setiap *conselho* ini terbagi lagi dalam beberapa wilayah yang lebih kecil yang disebut *posto* (kecamatan). Ke-12 *concelho* dan *posto* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah
Timor Timur pada masa penjajahan Portugis (1963)

No. Concelho	Posto
1. Ainaro	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ainaro 2. Hato Bulico 3. Maubisse 4. Turisca
2. Baguia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Vila Salzar 2. Baucau 3. L a g a 4. Quilicai 5. Vemasse 6. Venilale
3. Bobonaro	<ul style="list-style-type: none"> 1. Maliana 2. Atabai 3. Balibo 4. Bobonaro 5. Cailaco 6. Lolotoi

- | | | |
|-----|----------|---|
| 4. | Covalima | 1. Suai
2. Fatu Lulic
3. Fatumea
4. Fohorem
5. Mape
6. Tilomar |
| 5. | Dili | 1. Dili
2. Aileu
3. Atauro
4. Remuxio |
| 6. | Ermera | 1. Ermera
2. Atsabe
3. Hotolia
4. Lete Foho |
| 7. | Liquica | 1. Liquica
2. Bazartete
3. Maubara |
| 8. | Lautem | 1. Lospalos
2. Iliomar
3. Lautem
4. Luro
5. Tutuala |
| 9. | Manatuto | 1. Manatuto
2. Barique
3. Lacro
4. Laclubar
5. Laleia |
| 10. | Oe Cusse | 1. Pante Macassar
2. Nitibe
3. Oe Silo
4. Passabe |

11. Same

1. Same
2. Alas
3. Fatu Berliu
4. Hato Udo

12. Viqueque

1. Viqueque
2. Lacluta
3. Ossu
4. Uato Carbau
5. Uato Lari

Pada tahun 1974 dibentuk sebuah *conselho* baru, yaitu Concelho Aileu dengan mengurangi *posto* yang menjadi bagian dari *Administrasi Dili*. Concelho Aileu mempunyai tiga wilayah tingkat *posto* yaitu Posto Romexio, Lekidoe, dan Laulara. Dengan pembagian baru itu, wilayah administrasi Dili hanya terdiri atas kota Dili dan Posto Atauro saja.

RANGKUMAN

Sejalan dengan perkembangan kolonialisme dunia pada abad 17-18, Portugis pun menampilkan diri sebagai salah satu bangsa kolonialis. Sebagai bangsa kolonialis, Portugis antara lain, berhasil menguasai peggalan dari Pulau Timor, yaitu Timor Timur. Hal itu terjadi setelah melalui persetujuan dengan bangsa kolonial yang lain, yaitu Belanda.

Sejak berada di dalam kekuasaan Portugis, Timor Timur telah mengalami pelbagai hal sebagai akibat dari sistem kolonial yang diciptakan oleh pemerintah Portugis di daerah ini. Misalnya, terjadinya kelompok masyarakat baru yang bernama golongan Tupas, yaitu golongan yang lahir dari perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang dibawa oleh golongan misionaris.

Demikian pula, telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan karena kaum kolonial telah menciptakan sistem baru yang menempatkannya sebagai pemegang kekuasaan. Selanjutnya, juga telah terjadi perubahan dalam bidang kebudayaan. Artinya, bangsa kolonial Portugis telah membawa budaya baru di tengah-tengah masyarakat tradisional pribumi Timor Timur.

Pertanyaan

1. Walaupun bangsa kolonial telah menemukan Pulau Timor dan telah melakukan hubungan perdagangan secara "tetap", mereka tidak segera mendirikan sebuah pelabuhan tetap di pulau ini. Mengapa? Terangkan dengan jelas.
2. Agama Katolik yang pada mulanya dibawa oleh bangsa Portugis telah menjadi agama yang pada akhirnya juga dianut oleh sebagian terbesar penduduk pribumi Timor Timur.
Apakah jasa besar dari misionaris Dominikan dalam penyebaran agama Katolik di Timor Timur itu? Terangkan dengan jelas.
3. Dalam perkembangannya setelah orang Portugis datang dan menetap di Timor Timur, lahirlah suatu penduduk yang menjadi kelompok kekuatan baru, yaitu orang-orang Tupas. Bagaimanakah proses terciptanya orang-orang Tupas ini sebagai sebuah kelompok baru dalam masyarakat Timor Timur?
4. Antara bangsa kolonial Belanda dengan bangsa kolonial Portugis telah terjadi persaingan untuk menguasai Pulau Timor. Mengapa persaingan itu terjadi?
Terangkan dengan jelas.
5. Di dalam melaksanakan tugasnya mengatur dan memimpin pemerintahan di Timor Timur gubernur dibantu oleh lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Sebutkan dan terangkan tugas lembaga-lembaga yang dimaksud.

BAB III

PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP PORTUGIS

Persaingan Portugis dan Belanda di Pulau Timor untuk memperoleh keuntungan ekonomi perdagangan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan penduduk setempat, menimbulkan berbagai bentuk reaksi dari penduduk pribumi. Reaksi-reaksi itu lahir karena ternyata, dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang asing itu tidak hanya menjadi rekan berdagang, melainkan lebih dari itu, mereka ingin menjadi bangsa *penguasa yang dipertuan*. Dengan kedudukan itu, mereka ingin memonopoli aspek kehidupan dalam masyarakat, terutama aspek politik, pemerintahan, dan perdagangan. Bahkan mereka juga menghendaki agar kebudayaan dan agama merekalah yang harus dianut oleh penduduk pribumi setempat.

Dengan adanya niat dan tindakan bangsa-bangsa pendatang itu, penduduk pribumi memberikan reaksi dalam pelbagai bentuk, ada yang senang menerima mereka, tetapi tidak sedikit pula yang tidak senang. Di antara mereka yang tidak senang itu, ada yang memiliki keberanian untuk menunjukkan ketidaksenangannya secara terbuka. Mereka melakukan perjuangan melalui pemberontakan menentang penjajahan orang-orang Portugis.

Perlawanan-perlawanan rakyat terhadap penjajahan Portugis telah dapat diketahui paling tidak sejak abad ke-18 sampai dengan abad ke-20, baik yang berskala kecil maupun besar. Terdapat ratusan pahlawan rakyat Timor Timur untuk mengusir Portugis dari daerahnya. Selain perlawanan-perlawanan yang digambarkan di sini, sejumlah perlawanan hanya dapat disebut seperti di bawah ini.

1. Perlawanan Raja Venilale meletus pada tahun 1807.
2. Perlawanan Raja Laga dan Raja Ermera tahun 1863.
3. Perlawanan Raja Cotobaba dan Raja Cova tahun 1881/1882.
4. Perlawanan Raja Laleia dan Raja Laclubar tahun 1879.
5. Perlawanan Raja Uai-Mori tahun 1883.
6. Perlawanan Raja Motael dan Raja Bidau tahun 1887.
7. Perlawanan Raja Simao Vessoru tahun 1892.
8. Perlawanan Raja Cailaco tahun 1892.
9. Perlawanan Raja Maubara tahun 1893.
10. Perlawanan Raja Duarte Manufahi tahun 1897.
11. Perlawanan Raja Ambeno tahun 1912.
12. Perlawanan Raja Cuelecai tahun 1913/1914.
13. Perlawanan Fonosahe, Viqueque tahun 1926/1927.

Akan tetapi dari sumber yang diperoleh, hanya beberapa perlawanan yang dapat diuraikan.

1. Perlawanan Rakyat Oekusi, 1765-1768

Kedatangan Portugis yang kemudian berhasil menjadikan dirinya "penguasa" di tengah-tengah rakyat Oekusi, melahirkan penderitaan. Penguasa baru justru tidak meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, sebaliknya membuat rakyat menderita. Mereka harus mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh orang-orang Portugis. Mereka harus membayar pajak, juga menyediakan makanan. Untuk mempertahankan kekuasaannya di wilayah yang dikuasainya, orang asing ini mendirikan benteng pertahanan. Dari balik benteng inilah para penguasa asing mengatur kekuasaan di daerah yang didudukinya. Pembangunan benteng itu tidak dikerjakan oleh pendaatang-pendatang asing itu sendiri, tetapi sebaliknya, justru menggunakan tenaga-tenaga penduduk pribumi setempat. Penggunaan tenaga rakyat ini bahkan dilakukan secara paksa.

Tekanan Portugis itu dirasakan oleh rakyat Oekusi, khususnya mereka yang menetap di Lifau, sehingga mendorong mereka untuk melakukan perjuangan dalam bentuk pemberontakan. Rakyat Oekusi

tidak dapat lagi membiarkan penindasan-penindasan yang mereka alami. Mereka pun berjuang melawan penindasan melalui pemberontakan. Perjuangan pertama dilakukan mereka pada tahun 1637 dan dipimpin oleh Ornai dan Domingos da Costa. Untuk memadamkan api perjuangan ini, tampaknya pasukan-pasukan Portugis yang ada di Timor Timur tidak mampu. Karena itu, penguasa Portugis terpaksa meminta bantuan dari Goa (India). Pada waktu itu, Goa memang merupakan pusat pemerintahan kekuasaan Portugis untuk daerah-daerah kekuasaannya di seberang lautan.

Setelah perjuangan tahun 1637 itu dipadamkan, tampaknya penderitaan rakyat tetap berlangsung. Portugis tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan melakukan penindasan pada penduduk pribumi. Karena, rakyat Oekusi kembali berusaha untuk melepaskan lagi pemberontakan. Pemberontakan ini agaknya lebih besar karena mendapat bantuan dari raja-raja pribumi dari Kupang, Rote, dan Alor. Demikian beratnya pemerintah Portugis menghadapi perjuangan rakyat, terlihat dari berpindahnya Gubernur Menezes dari Oekusi ke Dili. Walaupun begitu, pada akhirnya perjuangan ini berhasil dipadamkan. Setelah itu, pemerintah Portugis lebih bertindak otoriter, sehingga sejumlah rakyat Oekusi terpaksa melarikan diri ke daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Mereka memasuki daerah Timor Belanda itu secara sembunyi-sembunyi.

2. Perlawanan Raja Luca, 1779

Derita akibat penindasan penjajahan Portugis tampak semakin meluas. Ini terbukti dengan timbulnya perjuangan di tempat-tempat lain. Pada tahun 1779 lahir perjuangan di bagian timur dari Pulau Timor Timur yang dipimpin oleh *Raja Luca*. Perjuangan ini mempunyai ciri khas karena beberapa hal, antara lain.

- 1) pimpinannya menganggap dirinya sebagai "nabi", sebagai "Ratu Adil".
- 2) mendapat dukungan yang luas dari raja-raja pribumi di sekitarnya.

Di dalam sumber dokumen Portugis, perjuangan ini disebut dengan kata-kata *a guerra dos doidos* yang artinya "perang orang gila". Sebutan amat buruk yang diberikan oleh sumber Portugis itu mungkin sekali karena Raja Luca yang memimpin pemberontakan itu menyebut dirinya sebagai "nabi". Walaupun perjuangan itu disebut "pemberontakan orang gila", penguasa Portugis ternyata tidak dapat mengakhiri perjuangan Raja Luca dalam waktu yang singkat. Ini terlihat dari jarak waktu berlangsungnya, yaitu selama 6 tahun; perjuangan itu baru berakhir pada tahun 1785.

3. Peristiwa di Atabae 1899

Dari tradisi lisan yang dipercayai oleh masyarakat Bobonaro, pernah terjadi peristiwa Atabae pada tahun 1899. Di Atabae (kota lama) terdapat makam pasukan tentara kavaleri (pasukan berkuda). Portugis yang dipimpin oleh Letnan Dua Ao Aif Francisco Duarte. Ia dijuluki oleh penduduk setempat dengan sebutan "Arbiru". Dalam bahasa Tetun *arbiru* berarti "sembarangan" atau "serampangan". Dalam arti tingkah laku *arbiru*, berarti tindakan-tindakan yang didasarkan atas kesukaan sendiri saja. Dalam melaksanakan tugasnya "Arbiru" dibantu oleh beberapa tentara yang berasal dari orang pribumi disebut *Segundalinka*, di antaranya bernama Lokomea dan Kafir.

"Arbiru" banyak melakukan penangkapan dan memenjarakan orang pribumi ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu para tahanan disiksa amat kejam sehingga banyak yang mati. Setelah kejadian itu diketahui oleh Lokomea dan Kafir, keduanya merencanakan untuk membunuh "Arbiru". Rencana terwujud dengan terbunuhnya "Arbiru" pada tanggal 17 Juli 1899.

Dilihat dari pandangan penjajah, "Arbiru" tentu dianggap sebagai "pahlawan". Karena itu, pemerintah Portugis membuat patung dan sebuah prasasti untuk "Arbiru" di dekat gua itu. Gua itu pun dikenal sebagai gua Arbiru.

4. Perlawanan Raja Manufahi, Dom Boaventura

Penguasaan Portugis terhadap wilayah Timor Timur semakin meluas sejak akhir abad ke-19. Mula-mula kekuasaannya di beberapa

wilayah hanya terbatas di pantai. Di pedalaman secara efektif masih dikuasai oleh raja-raja pribumi, seperti Dom Boaventura.

Walaupun Portugis telah menjadi negara berbentuk republik, kebijaksanaan pemerintah yang dirasakan oleh rakyat Timor Timur sebagai penindasan, tidak juga berubah. Perundingan-perundingan untuk menentukan nasib Pulau Timor dengan warganya memang diadakan, tetapi itu dilakukan tanpa pernah mengajak pemimpin-pemimpin pribumi setempat. Menghadapi kenyataan yang demikian ini, salah seorang raja pribumi yang kuat, Dom Boaventura melakukan perjuangan melalui pemberontakan yang sangat besar artinya bagi rakyat Timor Timur. Perlawanan itu dikenal dengan Perang Manufahi.

Sampai tahun 1912 bagi Portugis, jajahannya di Timor masih merupakan daerah yang berbahaya. Ancaman yang datang dalam bentuk pemberontakan digerakkan oleh seorang raja pribumi yang paling besar pengaruhnya, yakni Dom Boaventura. Yang menarik di sini hampir semua kerajaan pribumi ikut serta dalam perjuangan. Faktor utama pendorong terjadinya perjuangan ini ialah tekanan pajak yang harus dibayar rakyat. Ketika itu pemerintah Portugis menaikkan pajak yang harus dipungut oleh *liurai* dari rakyatnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Portugis. Dom Boaventura Raja Manufahi, yang berpendidikan ini mampu menyatukan suku-suku di Timor Timur dan menggerakkan perlawanan berdarah terhadap Portugis yang baru berakhir setelah 17 tahun. Raja itu juga berhasil mengajak rekan-rekannya untuk menolak kewajiban membayar pajak yang memberatkan itu dan sebaliknya melakukan perlawanan menentang sistem itu.

Selain itu, hal lain yang menarik dari perjuangan Manufahi ialah cara penyelesaiannya. Perjuangan ini berjalan dengan keras dan amat menyulitkan kedudukan pemerintah kolonial. Para pemberontak berhasil menguasai ibukota dan istana gubernur kolonial dan mendirikan perangkat pemerintahan di wilayah Manufahi. Akan tetapi, dengan bantuan pasukan Mozambique yang termasuk tentara Portugis dan dengan kekuatan persenjataan Eropa yang unggul, Dom

Boaventura akhirnya dapat ditaklukkan. Ratusan pengikutnya gugur dan 3.000 anggota pasukan yang lain dipenjarakan oleh Portugis.

Untuk mengatasi agar tidak ada lagi perlawanan maka Portugis menggunakan cara tradisional yang amat berarti dalam kehidupan penduduk pribumi, yang dikenal dengan istilah *Sumpah darah*. *Sumpah darah* merupakan cara untuk mengakhiri perang di antara kerajaan-kerajaan pribumi setempat atau dilakukan antar suku. Kalau sumpah darah dilakukan, berakhirlah pertentangan dan terjalinlah hubungan persaudaraan yang erat dan saling menghormati.

Cara tradisional yang tidak dengan kekerasan inilah yang ditempuh. Cara ini sebenarnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Gubernur Filomeno da Camara yang telah melakukan sumpah darah ketika menghadapi pemberontakan di Same. Karena *Sumpah darah* ini, *liurai-liurai* tidak lagi melanjutkan serangannya kepada pasukan-pasukan Portugis.

Dari sekian banyak perlawanan terhadap Portugis, perlawanan Dom Boaventura pantaslah disebut yang paling besar. Kekalahan Dom Boaventura merupakan tanda dimulainya masa tenang bagi wilayah jajahan Timor Timur. Kekalahan Dom Boaventura juga berarti mulainya penguasaan Portugis dan penetrasi kekuasaan Portugis jauh ke daerah pedalaman. Itu juga berarti bahwa penguasaan secara ekonomis terhadap produk kopi, tanaman yang telah diperkenalkan sejak 1815, semakin besar. Saat itu kopi adalah satu jenis komoditi ekspor paling penting yakni sebesar 80% jumlah ekspor dari Timor Timur.

Sampai dengan meletusnya Perang Manufahi, sejarah Timor Timur telah diisi dengan begitu banyak kisah penumpasan yang kejam terhadap pemberontakan oleh Portugis. Cara-cara itu dilakukan sebagai upaya untuk mendirikan, menetapkan, melindungi kepentingan dan keuntungan Portugis di jajahannya di Timor. Dengan berakhirnya perang Boaventura, wilayah Timor Timur dianggap benar-benar telah aman dan tenang. Sejumlah perlawanan itu membuktikan bahwa selalu ada pemberontakan terhadap penjajahan Portugis. Dengan demikian tidaklah seluruhnya benar

bahwa penguasaan atas Timor Timur dilakukan dengan cara penyebaran agama, akan tetapi dengan kekerasan, jadi tidak benar jika dikatakan penguasaan itu "dengan salib dan bukan dengan pedang".

5. Perlawanan di Los Palos

Setelah Jepang menyerah kepada tentara Sekutu tahun 1945, Portugis datang untuk menjajah kembali rakyat Timor. Kedatangan Portugis di Timor Timur tidak disambut baik oleh rakyat dan raja (*liurai*) di Los Palos. Pada waktu itu para liurai ada yang ingin merdeka seperti yang telah terjadi di wilayah jajahan Belanda dan Jepang dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Dorongan untuk merdeka dari para liurai di Los Palos karena kesengsaraan selama $3 \frac{1}{2}$ tahun dijajah Jepang dan penjajahan Portugis yang sudah ratusan tahun. Sayangnya rencana para liurai segera diketahui tentara Portugis, sehingga para liurai ditangkap, disiksa dan dibunuh. Untuk menakuti raja dan rakyat Los Palos Portugis melakukan penangkapan dan penyiksaan di depan umum. Peristiwa itu dikenal dengan "*Massacro Los Palos*". Untuk menghindarkan diri dari kekejaman itu, banyak penduduk Los Palos melarikan diri ke Pulau Leisar di Maluku. Usaha rakyat dan liurai pernah dicoba lagi tetapi dapat ditumpas oleh Portugis pada tahun 1949.

6. Perlawanan Viqueque, 1959

Dapat dikatakan bahwa perjuangan Manufahi merupakan perlawanan terbesar terhadap pemerintahan kolonial Portugis yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Namun, bukan berarti tidak ada lagi penindasan terhadap Timor Timur sehingga tidak menimbulkan perlawanan rakyat. Penerapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh rakyat pribumi tetap dilanjutkan dan sangat menekan mereka. Keadaan ini terus berlangsung sampai saat selesainya Perang Dunia II.

Setelah Perang Dunia II selesai, bangsa Indonesia yang berada di bawah penindasan kolonial Belanda menyatakan kemerdekaannya.

Proklamasi kemerdekaan itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia ini tentu tersebar ke seluruh dunia dan tentu juga akhirnya sampai ke Timor Timur. Berita itu agak lambat diketahui karena diisolasi dari dunia luar oleh pemerintah kolonial. Tentu saja pemerintah kolonial Portugis tidak menghendaki tersebarnya berita kemerdekaan itu kepada warga Timor Timur.

Pada tahun 1953 beberapa tokoh Timor Timur mendengar kemerdekaan yang telah terjadi atas diri saudara-saudaranya yang menetap di Timor-Barat (Kupang, Indonesia). Berita itu berasal dari Ciko Lopes dari Atambua (sekarang NTT). Mereka juga mendengar bahwa pemerintah negara Republik Indonesia telah menyelenggarakan suatu Konperensi bangsa-bangsa Asia-Afrika di sebuah kota, yaitu Bandung, pada tahun 1955. Mereka mendengar berita bahwa dari Konperensi Asia-Afrika itu telah lahir keputusan-keputusan yang mendukung kemerdekaan dari penindasan kolonial bagi setiap bangsa.

Pada tahun 1955 itu juga sebenarnya sudah ada rencana pemberontakan dari pemuda-pemuda di Dili. Para pemuda itu lalu menyebarluaskan rencananya ke kabupaten-kabupaten.

Pada tahun 1958, sebanyak 14 orang pemuda dari Timor Barat (Kupang) yang merupakan wilayah Republik Indonesia telah menyeberang ke wilayah Timor Timur yang masih dijajah oleh pemerintah kolonial Portugis. Mereka berhasil melakukan kontak dengan pemuda-pemuda Timor Timur, yaitu Jose Peirera da Costa, Abel Belo, Ricardo, dan Germano Pereira da Costa.

Adanya faktor-faktor di atas secara berangsur-angsur melahirkan perasaan nasionalisme yang lebih besar di kalangan pemuda-pemuda Timor Timur. Di antara pemuda-pemuda yang datang dari Kupang itu, ada yang pindah ke Viqueque. Mereka melakukan kontak dengan pemuda-pemuda di Viqueque dan memberitakan situasi wilayah NTT yang telah merdeka. Adanya berita itu, secara berangsur menumbuhkan semangat untuk merdeka bagi pemuda-

pemuda Viqueque itu. Bahkan, semangat dan dorongan untuk bergabung atau berintegrasi ke dalam wilayah Indonesia, yang telah merdeka, juga bertambah besar. Selain semangat nasionalisme, menurut Duarte salah seorang pejuang Viqueque, mereka juga memperoleh pengetahuan strategi militer dari pemuda-pemuda Kupang.

Pada tahun 1959, semangat untuk melepaskan diri dari kaum kolonial makin kuat di Viqueque. Ini terlihat dari berkembangnya rencana untuk melakukan perjuangan pada akhir tahun 1959. Dukungan terhadap rencana itu makin kuat dan tersebar ke Aileu, Same, Ermera, Baucau, dan lain-lain.

Untuk mematangkan rencana itu, diadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan cara pelaksanaan pemberontakan. Hasil pertemuan itu telah memutuskan pelaksanaan perjuangan akan jatuh pada tanggal 31 Desember 1959. Tanggal 31 Desember dipilih berdasarkan pengalaman bahwa pada setiap malam tahun baru, orang-orang dan tentara Portugis selalu berpesta pora. Dengan keyakinan bahwa mereka lengah dan penjagaan tidak seketat seperti hari-hari lain, serangan dapat dilakukan.

Untuk melakukan perlawanan itu, yang amat diperlukan ialah senjata. Para perencana pemberontakan itu berusaha memperoleh senjata sebanyak-banyaknya. Untuk memperoleh senjata terlebih dahulu dilakukan serangan ke kantor kabupaten. Dengan persenjataan sederhana seperti golok, pedang, tombak, dan hanya Duarte yang membawa senjata berburu, mereka dapat merampas sejumlah senjata. Pada akhirnya mereka berhasil mengumpulkan sebanyak 71 pucuk senjata, yaitu 47 pucuk di Viqueque, 12 pucuk di Uatocarabao, dan 12 pucuk dari Uatolari. Semua senjata itu bermerek "*Crapache*".

Walaupun pemberontakan itu direncanakan secara *rahasia* dan tertutup, dapat tercium oleh mata-mata pemerintah kolonial Portugis. Mereka segera melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai, khususnya di ibu kota Dili, yang memang sebenarnya menjadi pusat gerakan.

Mendengar berita penangkapan di Dili, para perencana perjuangan menyadari bahwa mereka harus melakukan tindakan di Viqueque. Jose Duarte, Gerson Pello, Robet Monsago, Jeremias Pello, Airearo de Aranfo, dan A. Amaral bersama keluarganya berangkat ke Uato Lari. Sementara itu kantor kecamatan sudah direbut oleh Antonio da Costa Soares bersama teman-teman dan pengikutnya. Selanjutnya, Jose Duarte, Gerson Pello, Jeremias Pello, dan Antelmo Amaral melakukan perjalanan ke Carabao-Uato Carabao yang sudah direbut oleh Fernando Pinto didukung oleh pasukannya. Di dua kecamatan ini dapat dirampas 12 pucuk senjata "*Crapache*".

Para pemimpin dan rakyat yang ikut dalam pemberontakan itu diharuskan memakai *kalung pita merah putih, lambang merah putih*. Setelah berada di Uato Carabao selama 3 hari Jose Duarte, Berson Pello, dan Jeremias Pello, melanjutkan perjalanannya ke kecamatan Bagia, yang ternyata sudah diduduki tentara Portugis. Di tempat ini pecahlah pertempuran selama 2 jam. Karena persenjataan tidak seimbang, pasukan Duarte terpaksa mundur dari medan pertempuran. Ketika mereka kembali ke Uato Lari, Gerson dan Jeremias ditangkap pada tanggal 15 Juni 1959. Jose Duarte dan Fernando Pinto bersembunyi lalu mencoba melanjutkan gerakannya ke Maubero. Penjagaan yang ketat dari tentara Portugis dan siksaan yang diderita rakyat menyebabkan Duarte dan Pinto tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menyerahkan diri di Oggu, pada tanggal 1 Juli 1959. Di sana mereka disiksa dan kemudian dibawa ke Dili.

Selain Jose Duarte, tokoh-tokoh pejuang Viqueque yang lain adalah Fernando de Pinto, Luis Raja dari Dili, Amaro de Araujo; Joao Pereira da Silva "Chiquito", Joaoquin dos Santos; Crispin Borges, Germano Pereira da Silva, Duarte Soares, Antonio da Costa Soares, dan Joao Bissoh dari Viqueque.

Akibat pemberontakan itu, penangkapan dan penyiksaan terus dilakukan terhadap Jose Manuel Duarte dan kawan-kawan seperjuangannya. Kemudian mereka dibuang ke Angola, daerah jajahan Portugis di Afrika. Mereka yang dibuang ke Angola berjumlah

68 orang. Akibat yang paling menyedihkan dari pemberontakan tahun 1959 ialah dilakukannya pembunuhan terhadap ratusan orang rakyat yang dituduh mempunyai hubungan dengan pemberontak itu.

Perlawanan rakyat yang digerakkan dari Viqueque merupakan pemberontakan terakhir sebelum Timor Timur berintegrasi ke dalam negara Republik Indonesia. Nilai perjuangan pemberontakan Viqueque dapat disejajarkan dengan perjuangan di Angola dan Mozambique untuk menggulingkan pemerintah kolonial Portugis.

RANGKUMAN

Kedatangan bangsa kolonial Portugis tidak sepenuhnya diterima oleh penduduk pribumi setempat. Dari penduduk pribumi setempat itu lahir pelbagai reaksi. Dari reaksi yang diam sampai reaksi yang tampil kepermukaan dan menjadi sebuah perlawanan dalam bentuk kekerasan.

Ini semua menunjukkan bahwa persentuhan sifat-sifat dan tingkah laku serta budaya yang dibawa oleh bangsa kolonial Portugis tidak melahirkan kehidupan yang damai, seperti yang digambarkan oleh bangsa kolonial itu. Dilaksanakannya sistem pemerintahan kolonial, apalagi yang dilakukan secara "paksa" telah melahirkan keresahan dan ketidaksenangan masyarakat pribumi. Ini semua telah melahirkan beberapa pemberontakan atau perlawanan rakyat Timor Timur selama kekuasaan bangsa Portugis.

Pertanyaan

1. Telah terjadi perlawanan rakyat Oekusi pada tahun 1765-1768. Mengapa perlawanan itu terjadi?
Terangkan dengan jelas.
2. Perlawanan Raja Luca pada tahun 1779 mempunyai beberapa ciri khas yang menarik. Sebutkan dan terangkan secara jelas ciri-ciri yang dimaksud.

3. Perlawanan Raja Manufahi, Dom Boaventura berhasil diselesaikan dengan cara adat *Sumpah darah*. Bagaimanakah adat itu dilaksanakan. Terangkan secara jelas.
4. Pada tahun 1945 di Los Palos telah pula terjadi perlawanan rakyat terhadap kekuasaan bangsa Portugis. Mengapa? Terangkan dengan jelas.
5. Perlawanan Viqueque pada tahun 1959 merupakan perlawanan awal menuju integrasi dengan Republik Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Terangkan dengan jelas!

BAB IV

DEKOLONISASI

1. "Revolucao dos Cravos" atau "Revolusi Bunga"

Menurut konstitusi Portugal sebelum 1974, Timor Timur masih disebut sebagai "Propinsi seberang lautan" sama seperti propinsi-propinsi lain yang membentuk wilayah (kontinental) Portugis. Propinsi-propinsi itu termasuk juga Angola, Cabeverde, Guinea, Mozambique, Sao Tome, dan Principe di Afrika; Macao di Cina dan Goa di India yang melalui serangan militer pada tahun 1960 masuk menjadi bagian negara itu.

Pada tahun 1970-an, di bawah tekanan internasional dan meningkatnya perang gerilya. Angola dan Mozambique dapat terangkat statusnya ke dalam perhimpunan negara-negara di bawah pengaruh Portugal, meskipun kekuasaan yang nyata diatur oleh gubernur jenderal yang diangkat oleh Lisboa.

Timor Timur berada dalam teks geografi Portugis sebagai posisi tertinggi dalam "kemaharajaan Portugis" yang terlihat dalam beberapa acuan sejarah. Dom Aleixo Corte Real, yang bertempur melawan Jepang dengan penuh penderitaan, bukan karena ia cinta kepada Portugis, ia digambarkan sebagai "seorang martir untuk Ibu Pertiwi" yang dimaksud adalah Portugal. Perjuangan itu tidak dianggap untuk Timor Timur atau bahkan untuk daerahnya sendiri, yakni Ainaro.

Setelah ratusan tahun berada di bawah penjajahan kolonial Portugal, masyarakat Timor Timur masih berada dalam keadaan yang terisolasi dari komunikasi dengan dunia luar. Isolasi yang demikian itu juga dilakukan di dalam hubungannya dengan wilayah tetangganya. Bahkan, saudaranya sendiri, Republik Indonesia, yang telah merdeka sejak tahun 1945. Membuka komunikasi dengan

bangsa Indonesia memang cukup mengkhawatirkan pemerintah kolonial Portugis, karena hal itu akan membuka kemungkinan bagi kesadaran berbangsa ke tengah-tengah warga Timor Timur yang waktu itu berada di bawah kekuasaannya.

Sesuai dengan perkembangan internasional dan nasional di dalam negeri Indonesia dan Portugal pengisolasian Timor Timur itu tidak dapat dipertahankan lagi. Pada 28 Februari – 2 Maret 1974 tibalah saat kontak awal antara kedua pemerintah, yaitu pada waktu Gubernur Nusa Tenggara Timur El Tari, mengunjungi Dili. Kunjungan Gubernur El Tari ini cukup mendapatkan sambutan yang baik dari Gubernur Timor Timur, Aldeia.

Sebulan setelah kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari ke Dili, di Portugal telah terjadi kudeta tak berdarah yang menyebabkan perubahan mendasar di dalam pemerintahan negeri itu. Pada tanggal 25 April 1974, di Ibukota Portugal, Lisboa, telah terjadi kudeta militer. Kudeta ini dikenal juga dengan sebutan: "*Revolucao dos Cravos*" atau "*Revolusi Bunga*". Peristiwa itu menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya di dalam negeri Portugal, tetapi juga keadaan di negeri-negeri wilayah jajahan Portugal di kawasan lain, termasuk keadaan di wilayah Timor Timur.

Koloni-koloni Portugis di Afrika Barat dan Timur memperoleh kemerdekaan pada tahun 1974 dan 1975, yaitu Angola, Mozambique, Capeverde, Guinea-Bissau, Sao Tome, dan Principe. Dalam perjalanan sejarahnya Timor Timur tidak berpengalaman dalam pembebasan nasional. Namun, telah tumbuh perasaan tidak senang terhadap praktek kolonialisme Portugis. Kelompok muda dan kaum terdidik yang kecil jumlahnya menjadi kecewa karena kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan ke arah kemajuan.

Pada awal tahun 1970-an ide untuk membuat organisasi-nasional mulai terwujud. Gubernur "Timor Portugis", Aldeia, tampaknya menyadari kemungkinan-kemungkinan pengaruh perubahan situasi yang baru saja terjadi di Lisboa itu. Hal itu terlihat dengan langkahnya mengirimkan Kepala Staf Angkatan Darat Portugis di

Timor Timur, Mayor Armao Mitello ke Kupang untuk menemui Gubernur El Tari pada 17 Mei 1974. Tujuan kunjungan Mayor Armao Mitelle itu ialah untuk menjelaskan situasi dan pengaruh dari Revolusi Bunga, khususnya yang menyangkut kedudukan koloni-koloni milik Portugal, termasuk kedudukan Propinsi Timor Timur.

Perubahan yang utama di dalam kebijaksanaan politik pemerintahan Portugal yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap koloni jajahannya, ialah dekolonisasi.

2. Pembentukan Partai-Partai Politik

Langkah awal yang dilakukannya ialah memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk membentuk partai-partai politik di koloni ini, untuk membicarakan bentuk, langkah-langkah cara pelaksanaan dari dekolonisasi itu. Kesempatan membentuk partai politik itu disambut para pemimpin dan rakyat Timor Timur; dan partai yang pertama dibentuk mereka ialah *Uniao Democratica Timorensis* atau yang dikenal dengan singkatan UDT. Pembentukan UDT diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 11 Mei 1974. Pemimpin-pemimpin UDT yang terkemuka, antara lain Francisco Xavier Lopes da Cruz (presiden), Augusto Cesar da Costa Monsinho (wakil presiden), dan Domingos de Oliveira, Ir. Mario Viegas Carrascalao (anggota) dan kedua yang disebut belakangan masih berusia muda dan memang mempunyai tingkat pendidikan yang sangat baik. Mario Viegas Carrascalao bahkan seorang tamatan universitas dan menyelesaikan pendidikannya sebagai insinyur dalam bidang kehutanan. Tokoh-tokoh penting UDT yang lain ialah Domingos de Oliveira, seorang pejabat di bea cukai; Caesar Augusto da Costa Mousinho, *residente da Camara Municipal* (walikota) Dili dan Joao Carrascalao, saudara dari Ir. Mario Carrascalao.

Di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh partai politik UDT diketahui bahwa partai ini tidak ingin melepaskan diri dari pemerintahan Portugal. UDT mendesak untuk memperoleh otonomi yang seluas-luasnya bagi rakyat Timor Timur untuk mengelola berbagai

sektor dan dalam berbagai tingkatan kehidupan, tetapi tetap di bawah naungan Portugal.

Karena itu pula partai ini mempunyai penamaan sebagai "partai pro-Portugis". Para pendukungnya pada umumnya berasal dari pegawai tinggi pemerintah, para pemimpin penduduk pribumi dan beberapa pedagang-pedagang Cina; dan tentu saja partai ini didukung oleh orang-orang Portugis yang menetap di Timor Timur.

Sikap pro-Portugis yang menjadi pegangan UDT dapat diketahui melalui keterangan dari seorang pendirinya, Ir. Mario Carrascalao. Dari wawancaranya dengan wartawan majalah *Tempo* pada tahun 1974 tokoh ini mengatakan alasannya mengapa ia dan partainya menghendaki untuk tetap berada di bawah pemerintahan Portugis, yaitu karena belum punya cukup tenaga terdidik untuk memimpin Timor Timur.

Sembilan hari kemudian, yaitu 20 Mei 1974 lahir partai kedua dengan nama: *Associação Populer Democrática de Timor* atau dengan nama singkatan ASDT. Tetapi kemudian partai ini pada bulan September 1974 mengganti nama menjadi : *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* dan partai ini kemudian lebih dikenal dengan *Fretilin*. Dari namanya dapat diketahui bahwa partai ini berasaskan sosialisme dan demokrasi dengan tujuan akhir kemerdekaan.

Akan tetapi, unsur-unsur ideologi komunisme sangat mewarnai kegiatan-kegiatan dan perkembangan Fretilin selanjutnya. Penggantian nama itu dipengaruhi oleh lima orang mahasiswa yang berhaluan komunisme yang datang dari Lisboa. Mereka dipengaruhi oleh ideologi dan gerakan komunisme khususnya *Frelimo di Mocambique* (*Frente da Libertacao de Mocambique*) dan MPLA di Angola (*Movimento Popular de Libertacao de Angola*).

Pemimpin tertinggi Fretilin adalah Francisco Xavier do Amaral (Ketua), Nicolau Lobato (Wakil Ketua), Jose Ramos Horta (Sekretaris Urusan Luar Negeri) dan Antonio Carvarino (Sekretaris Urusan Pendidikan). Jose Ramos Horta, salah seorang pemimpinnya,

menyebarkan isu-isu di luar negeri untuk menentang integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Bahkan dengan melalui pemerintah Portugal, Ramos Horta mencoba menggunakan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang pemerintah Republik Indonesia, yang dikatakannya "menduduki" wilayah Timor Timur.

Fretilin terutama mendapat dukungan dari pegawai-pegawai pemerintah tingkat rendah, guru-guru, para pelajar dan para pendatang yang telah menetap di kota-kota Timor pantai utara. Sebagaimana biasanya yang dilakukan oleh partai-partai berideologi Sosialis-Komunistis, Fretilin menuntut kemerdekaan dan perubahan secara cepat dan mendasar dari susunan pemerintahan kolonial. Karena itu, di mata golongan konservatif dan golongan Cina, partai ini dianggap sebagai partai yang radikal.

Beberapa hari setelah kedua partai tersebut di atas terbentuk, tepatnya pada 27 Mei 1974, lahir pula partai yang ketiga dengan nama *Associação Popular Democrática Timorese* atau yang lebih dikenal dengan singkatan APODETI. Partai ini mempunyai perbedaan tujuan dengan kedua partai yang mendahului kelahirannya karena Apodeti menghendaki Timor Timur untuk bergabung (berintegrasi) ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tokoh-tokoh Apodeti yang terkemuka, antara lain Jose Osorio Soares, Guiherme Maria Goncalves raja Atsabe; dan tokoh tertua di antara mereka dan amat dihormati ialah Arnaldo Dos Reis Araujo. Ia kemudian diangkat sebagai Ketua Apodeti. Pada masa pendudukan Jepang, Arnaldo Araujo dianggap memihak kepada Jepang. Karena itu ia pernah dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Portugis. Tokoh lain yang terkemuka ialah Hermenegildo Martius yang kemudian dipilih sebagai wakil ketua. Tokoh ini terkenal sebagai orang kaya karena memiliki perkebunan kopi yang luas. Tokoh yang lain Casmiro dos Reis Araujo, anak kandung dari Arnaldo Araujo yang kemudian juga disepakati untuk duduk dalam pengurus APODETI.

Partai ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemuka-pemuka agama Katolik dan penduduk pribumi yang merasa mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penduduk Nusa Tenggara Timur.

Partai ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kelompok keluarga Arab yang menetap di Timor Timur. Keluarga Arab ini memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi terhadap Indonesia, karena rasa keterikatan hubungan keagamaan, yaitu Islam.

Selain ketiga partai itu, yang memang paling besar pengaruhnya, masih terdapat beberapa partai lain seperti partai *Klibur Oan Timur Aswain* (Kelompok orang Timor yang berani) atau disingkat KOTA. Juga ada partai *Trabalhista*. KOTA bertujuan untuk menempatkan Timor Timur di bawah protektorat tiga negara, Portugal-Indonesia-Australia. *Trabalhista* mempunyai sifat khas dilihat dari segi hubungan kekerabatan, yaitu partai ini didirikan dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang mempunyai hubungan keluarga-kekerabatan; Partai *Trabalhista* ini dipimpin oleh tokoh terkemukanya, Domingos C. Pereira.

Keberadaan partai-partai di tengah masyarakat Timor Timur, merupakan hal baru, karena kegiatan politik yang terorganisasi, bagi rakyat merupakan hal yang baru. Karena itu, tentu saja terdapat kesulitan-kesulitan untuk mengorganisasi rakyat; apalagi mengajak rakyat yang pada umumnya masih buta huruf untuk ikut dalam kegiatan politik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin partai itu ialah memperlebar kawasan pengaruhnya dengan membentuk cabang-cabang partai mereka masing-masing di daerah seluruh Timor Timur.

Berubahnya situasi di Timor Timur yang membuka peranan bagi pemimpin-pemimpinnya untuk mengambil peranan yang lebih bebas dan terbuka itu, membuka pula kesempatan bagi mereka untuk berhubungan dengan negara-negara yang berdekatan dengannya. Hal itu terlihat dari langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin dari ketiga partai terkemuka di daerah koloni ini. Ketiga partai itu mengirim utusan-utusan mereka ke negara-negara tetangga terdekat, Indonesia dan Australia. Francisco Xavier Lopes da Cruz, ketua umum UDT dan Ramos Horta, sekretaris urusan luar negeri Fretilin pernah mengunjungi Indonesia untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia.

3. Sikap Indonesia, Portugal, dan Australia

Dalam menghadapi perubahan situasi di Portugis dan perkembangan baru di Timor Timur, pemerintah Indonesia sejak awal kelihatan cukup hati-hati. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai ada pendapat bahwa Indonesia berniat untuk memperluas wilayah negaranya.

Pada tingkat pertama peninjauan dilakukan melalui jalur diplomatik. Umpamanya, dalam rangka menghadiri sidang-sidang PBB, menteri luar negeri yang waktu itu dijabat oleh Adam Malik, telah mengadakan pertemuan-pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri Portugal, Mario Soares, yang dilakukan pada tanggal 21 September 1974. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari pendekatan kedua menteri luar negeri itu memberikan angin baru bahwa kedua menteri luar negeri akan mengadakan kerja sama dan konsultasi dalam rangka penentuan nasib sendiri Timor Timur. Juga ditegaskan bahwa hubungan diplomatik perlu dipulihkan sehingga konsultasi antara kedua belah pihak dapat lebih mudah dilakukan. Karena itu, disepakati bahwa kedua kepala perwakilan tetap kedua negara di PBB merupakan diplomat yang mewakili menteri luar negeri. Disinggung juga kemungkinan dikirimnya seorang utusan khusus Presiden Republik Indonesia yang akan datang ke Lisboa untuk menjelaskan sikap Indonesia terhadap Timor Timur.

Kelihatannya, Indonesia bersikap sangat hati-hati dalam menghadapi masalah Timor Timur. Karena itu, pada jalur resmi, khususnya jalur diplomatik, terlihat bahwa Indonesia ingin meyakinkan dunia bahwa Indonesia sama sekali tidak memiliki ambisi memperluas wilayah negara. Hal itu perlu dijelaskan karena sejak Indonesia merebut kembali daerah Irian Barat (Irian Jaya) ke dalam wilayah negaranya dan kemudian muncul proyek "ganyang Malaysia", timbul kekhawatiran bahwa Indonesia cenderung agresif. Padahal, masalah Irian Barat dan Malaysia jauh berbeda. Karena itulah, pemerintah Indonesia pertama-tama menjelaskan sikapnya yang tidak bermaksud memperluas wilayah negaranya.

Sikap tidak memiliki ambisi perluasan wilayah negaranya itu, di pihak lain juga tidak menutup usaha-usaha yang dilakukan

Apodeti untuk berintegrasi dengan Indonesia. Jadi, sikap Indonesia di pihak lain tidak berambisi memperluas wilayah negara dan pada waktu bersamaan memberi angin pada kampanye-kampanye yang dilancarkan Apodeti yang ingin membawa rakyat Timor bergabung dengan Indonesia.

Sikap resmi pemerintah Indonesia pertama kali diumumkan sesuai dengan hasil rumusan sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 1974. Pernyataan sikap itu pada dasarnya berisi:

- a. bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial;
- b. bahwa Indonesia menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri;
- c. bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, penggabungan itu tidak bisa dilakukan atas dua negara, tetapi Timor harus menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Sikap dasar pemerintah Indonesia rupanya sudah dirumuskan beberapa waktu sebelum sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan tersebut dilangsungkan. Hal itu terbukti dengan keterangan pers Menteri Luar Negeri, Adam Malik setelah berkonsultasi dengan Soares di New York dan rencana pemerintah Indonesia untuk mengirim Ali Murtopo ke Lisboa beberapa hari sebelum sidang tersebut diadakan. Bagaimana rencana dan maksud Ali Murtopo ini juga termasuk masalah yang dijelaskan Adam Malik kepada Soares.

Misi Ali Murtopo bersifat resmi sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Karena itu, selain surat mandat dari Presiden, Ali Murtopo juga dibekali surat-surat pribadi Presiden yang harus diserahkan langsung kepada Presiden Portugal, Francisco da Costa Gomes, pengganti Presiden Spínola yang mengundurkan diri sebagai Presiden sejak tanggal 30 September 1974, dan kepada Perdana Menteri Vasco Goncalves.

Sebelum Ali Murtopo datang ke Lisboa telah dikirim pula dua penghubung: Mohammad dan Soeharto untuk merintis jalan dan

mempersiapkan agenda pembicaraan. Tugas kedua penghubung ini dipermudah dengan bantuan dan peranan khusus yang dijalankan Duta Besar Republik Indonesia di Belgia, Drs. Frans Seda, dan Duta Besar RI di Prancis, A. Tahir. Bahkan, Drs. Frans Seda mempunyai kontak pribadi dengan bekas teman sekelasnya dulu, Prof. George Campinos. Ketika itu Prof. George Campinos menjadi guru besar di sebuah Universitas terkemuka di Lisboa, yang kebetulan sedang menjadi salah seorang pejabat kunci di Kementerian Luar Negeri Portugal. Karena itu, dalam misi Ali Murtopo ke Lisboa, selain disebut nama A. Tahir, juga Drs. Frans Seda. Keduanya ditugaskan Presiden sebagai anggota delegasi.

Dalam perundingan yang berlangsung selama dua hari di Lisboa telah ditemui beberapa pejabat tinggi Portugal. Mulai tanggal 14 Oktober 1974 berturut-turut telah ditemui Prof. George Campinos (wakil Menteri Luar Negeri Portugal), Francisco da Costa Gomes (Presiden) dan Vasco Goncalves (Perdana Menteri). Di samping menjelaskan posisi masing-masing, pembicaraan dengan tokoh-tokoh Portugal itu membicarakan kemungkinan masa depan Timor Timur setelah referendum dilaksanakan. Kemungkinan pertama yang didiskusikan adalah merdeka di bawah payung Portugal. Bagi Portugal kemungkinan pertama ini juga berat, karena hal itu hampir tidak ada bedanya dengan atau sebagai koloni Portugis. Bagi Portugis cukup sulit karena dalam kenyataannya Timor tidak menghasilkan, tetapi malah memberatkan anggaran belanja mereka. Alternatif kedua, adalah merdeka dan berdiri sendiri. Alternatif ini kecil sekali kemungkinannya karena Timor tidak memiliki potensi ekonomi yang cukup yang memungkinkan wilayah ini bisa membiayai kegiatannya sendiri. Alternatif ketiga adalah bergabung dengan Indonesia.

Apa pun pilihannya, yang pasti hal itu harus sesuai dengan kehendak rakyat Timor Timur. Karena itu, mereka perlu diberi waktu untuk merenungkan dan memutuskan masa depan mereka sendiri.

Beberapa kesimpulan umum yang dihasilkan dari pembicaraan dengan pejabat-pejabat Portugal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Portugal cukup serius dengan rencana dan kebijaksanaan dekolonisasi mereka. Cuma saja Portugal ketika itu belum atau tidak memiliki konsepsi yang tepat, yang bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi Timor Timur.
2. Portugal dapat mengerti posisi dan sikap Indonesia tentang Timor.
3. Alternatif yang rasional, khususnya jika dilihat dari sudut masa depan rapat Timor Timur dan stabilitasi kawasan sekitarnya.
4. Kedua belah pihak menyadari perlunya kerja sama antara kedua pemerintah dalam menyelesaikan masa depan Timor Timur. Untuk maksud itu disadari perlunya dicairkan kembali hubungan diplomatik antara Pemerintah Portugal dengan Pemerintah Indonesia.
5. Pemerintah Portugal sangat menghargai usaha-usaha pemerintah Indonesia untuk bertemu dengan Presiden dan Pemerintah Portugal, karena Indonesia adalah negara pertama yang diterima Portugal sejak perubahan pemerintahan di Lisboa.

Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan Lisboa itu, Pemerintah Portugal kemudian mengirim Dr. Antonio de Almeida Santos (yang kemudian menjadi Menteri Seberang Lautan) untuk datang ke Indonesia. Ia sampai di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1974, atau hanya sehari setelah berakhirnya pertemuan Lisboa.

Di bandar udara Halim Perdanakusumah, ia memberi keterangan kepada para wartawan tentang masa depan Timor Timur. Dikatakannya bahwa suatu negara Timor yang merdeka dan berdiri sendiri tidaklah realistis. Menurut pejabat pemerintah Portugal ini, kemerdekaan politik harus didukung oleh kekuatan ekonomi. Hal itu kurang dimiliki oleh Timor Timur. Ditekankannya apa yang menjadi keinginan rakyat Timor, Pemerintah Portugal akan menghormatinya. Untuk itu katanya, pemerintahnya menyiapkan undang-undang yang mengatur kehidupan kepartaian di Timor Timur. Pernyataan Almeida Santos yang terakhir ini bisa diartikan dari berbagai segi, salah satu di antaranya adalah bahwa partai politik yang sudah berdiri di Timor

Timor baru bersifat *de facto* karena belum ada undang-undang yang mengatur tata cara kehidupan mereka.

Selama empat hari di Jakarta, Menteri Almeida Santos antara lain bertemu dengan Presiden Soeharto dan Menteri Luar Negeri Adam Malik. Dengan demikian, ia memperoleh keterangan langsung dari sumber utama tentang sikap dasar Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi masalah Timor Timur. Pada dasarnya apa yang dijelaskan Presiden Soeharto dan Menteri Luar Negeri Adam Malik tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang disampaikan misi Ali Murtopo kepada pejabat-pejabat tinggi di Lisboa.

Dari Jakarta Menteri Almeida Santos melanjutkan perjalanannya ke Timor Timur. Di Dili, ia mengeluarkan pernyataan lagi bahwa di Timor Timur tidak segera akan diadakan referendum. Sebelum referendum itu dilaksanakan, rakyat Timor Timur memilih dulu wakil-wakil mereka yang duduk dalam satu dewan yang disebutnya sebagai *Dewan Konstituante*. Menurut pengertian Almeida Santos dewan konstituante itulah yang menentukan segala sesuatu mengenai pemilihan umum di Timor Timur.

Pernyataan Menteri Almeida Santos ini agak membingungkan pembicaraan antara Portugal dan Indonesia, karena *Dewan Konstituante* belum pernah disinggung dan disiapkan oleh staf gubernur Portugis di Timor Timur dan mendesak Menteri Almeida Santos untuk menerimanya.

Sekembali Menteri Almeida Santos ke Lisboa, pemerintah Portugis membuat kebijaksanaan baru mengenai Timor Timur. Hal ini seirama dengan perubahan pemerintahan di Portugal sejak akhir September 1974, yakni ketika Spínola mengundurkan diri sebagai Presiden dan naiknya Francisco de Costa Gomes sebagai Presiden yang baru. Para analis menilai perubahan ini merupakan pertanda makin menguatnya kekuatan radikal dalam pemerintahan Portugal yang berwujud melalui kelompok yang disebut *Movimento*. Khususnya untuk Timor Timur, perubahan itu ditandai dengan penarikan Fernando Aldes Aldeia sebagai Gubernur Portugis di Timor dan digantikan oleh pejabat baru Letnan Kolonel Lemos Pires

tanggal 18 November 1974. Kejadian itu merupakan indikasi makin kuatnya pengaruh Movimento karena Lemos Pires dianggap sebagai perwira yang masuk dalam kelompok ini.

Pandangan dan sikap Australia terhadap proses integrasi Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia memperlihatkan perkembangan yang menarik. Ada perbedaan pendapat, antara lain pihak pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat di Australia. Pada bulan September 1974, pemerintah Partai Buruh Australia di bawah Perdana Menteri E.G. Whitlam mengatakan bahwa kemerdekaan Timor Timur merupakan negara yang lemah dan merupakan ancaman yang potensial bagi stabilitas regional. Tetapi, masyarakat Timor Timur harus menentukan sendiri masa depannya.

Bagi kelompok-kelompok di dalam masyarakat Australia yang tidak sependapat dengan pemerintahannya itu, integrasi menurut mereka bukan merupakan pemecahan masalah terbaik. Pendapat mereka itu terutama yang sejalan dengan perjuangan Fretilin, yang mengatakan bahwa pernyataan pemerintah Australia telah "merampas" kebebasan masyarakat Timor Timur.

Masyarakat Australia meminta kepada pemerintahnya agar dikirim delegasi Australia untuk mengadakan kunjungan delegasi ke Timor Timur. Kunjungan delegasi Australia yang ketiga dilaksanakan pada bulan September 1975, ketika kancah perang saudara sedang berkecamuk.

Delegasi ini mendesak kepada pemerintah agar pemerintah Australia mencegah campur tangan militer Indonesia ke Timor Timur. Meskipun demikian kebijaksanaan pemerintah di bawah Perdana Menteri E.G. Whitlam tetap pada pendiriannya. Whitlam juga tidak menginginkan keterlibatan Australia, baik secara sipil maupun militer dalam kemelut di Timor Timur. Masalah di Timor Timur harus diselesaikan oleh pemerintah Portugis dan masyarakat Timor Timur. Dan, jika Indonesia terlibat juga dalam masalah tersebut karena Indonesia mempunyai kepentingan langsung dengan situasi di Timor Timur.

Kebijaksanaan pemerintah Australia ada dua hal. Pertama, masalah Timor Timur dipecahkan berdasarkan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, Australia mendukung hak menentukan nasib sendiri untuk seluruh masyarakat kolonial.

Meskipun timbul banyak reaksi dan kritik masyarakat, pada akhirnya pemerintah Australia tidak dapat menunggu lama menghadapi kenyataan berintegrasinya Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 1978, dengan ditandatangani batas laut antara Australia dan Timor Timur, secara *de jure* Australia mengakui integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.

RANGKUMAN

Revolucao dos Cravos (''Revolusi Bunga'') merupakan peristiwa amat penting yang terjadi di negara Portugis karena revolusi ini telah memberikan dampak bagi terjadinya dekolonisasi. Revolusi ini telah mendorong pemerintah Portugis untuk membuka jalan bagi koloni-koloninya memperoleh kebebasan berpolitik. Salah satu kebijaksanaan pemerintah Portugis ialah mengizinkan penduduk pribumi untuk membentuk partai-partai politik sebagai alat untuk menyatukan aspirasi dan pendapat mereka. Hal itu juga dilakukan di Timor Timur sebagai wilayah (koloni) propinsi seberang laut Portugis.

Sejalan dengan itu terbentuklah tiga partai utama dengan tujuannya masing-masing. Partai UDT merupakan partai yang bertujuan untuk tetap mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari Negara Portugis tetapi dengan status dasar otonomi yang seluas-luasnya. Fretilin adalah partai yang bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan penuh dari Portugis. Artinya mereka akan mendirikan pemerintahan sendiri sepenuhnya lepas dari pemerintah negara koloni Portugis. Kemudian lahir pula partai Apodeti yang bertujuan untuk berintegrasi dengan negara Republik Indonesia.

Ketiga kekuatan itulah yang akan bersaing di dalam proses dekolonisasi dari daerah Timor Timur.

Pertanyaan

1. Di Portugis telah terjadi Revolucáo dos Cravos. Apa arti kejadian ini bagi Timor Timur? Terangkan dengan jelas!
2. Partai-partai yang dibentuk oleh penduduk Timor Timur mempunyai tujuannya masing-masing. Apa tujuan partai-partai tersebut? Terangkan dengan jelas!
3. Pemerintah Indonesia mempunyai sikap terhadap rencana dekolonisasi daerah Timor Timur itu. Bagaimanakah sikap Pemerintah Indonesia itu. Terangkan dengan jelas!
4. Pemerintah Australia mempunyai sikap terhadap rencana dekolonisasi daerah Timor Timur itu. Bagaimanakah sikap Pemerintah Australia itu. Terangkan dengan jelas!

BAB V

PROSES PENENTUAN NASIB SENDIRI

1. Pendekatan Melalui Perundingan

Tugas Lemos Pires tidaklah ringan. Ia harus mengamankan kebijaksanaan dekolonisasi, tetapi juga harus menyingkirkan orang-orang yang tidak seialan dengan pemerintah, penguasa baru di Portugal. Untuk itu, ia melakukan pelbagai tindakan, yaitu menggantikan sebagian besar pejabat-pejabat di Timor Timur dengan pejabat-pejabat yang akan memberikan dukungan kepadanya. Mereka yang diangkat itu ialah Mayor Koelha sebagai Kepala (Chief) Kabinet, Mayor Francisco de Mota sebagai Kepala Urusan Politik, Mayor Jonatas sebagai Kepala Urusan Sosial, Mayor Barrento sebagai Kepala Staf dan Kapten Ramos sebagai Perwira intelijen.

Untuk melaksanakan rencana dekolonisasi, kantor gubernur mempersiapkan rincian kebijaksanaan yang akan dijalankannya. Tujuan ini merupakan bidang yang ditangani oleh Mayor Mota. Salah satu kebijaksanaan itu ialah pemerintah akan membentuk *Pemerintah Peralihan di Timor Timur* yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 1975. Langkah itu merupakan perwujudan dari pernyataan pemerintah tentang *hak untuk merdeka* bagi rakyat Timor Timur.

Untuk menunjang pelaksanaan rencana pembentukan pemerintah peralihan itu, akan dibentuk Dewan Konsultatif yang anggota-anggotanya terdiri atas unsur-unsur pemerintah dan wakil-wakil dari partai-partai yang ada dan dipilih.

Tugas dewan ini ialah:

1. membicarakan dan mempersiapkan undang-undang kepartaian;
2. mengatur pembagian kedudukan bagi partai-partai politik, di luar kursi-kursi/kedudukan yang disediakan bagi pemerintah Portugal;
3. mengatur pemilihan anggota Dewan Konstituante Timor Timur yang akan menentukan tata cara pemilihan umum di wilayah koloni;

4. proklamasi kemerdekaan Timor Timur baru akan dilakukan setelah rapat-rapat Dewan Konstituante menghasilkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

Rencana Mayor Mota, Kepala Urusan Politik ini, melahirkan situasi yang cukup rumit, karena rencana ini sebenarnya bertentangan dengan rencana semula dari Pemerintah Portugal, yaitu akan mengadakan suatu *referendum* (pemilihan untuk meminta pendapat rakyat) pada tahun 1975. Rencana Mayor Mota berarti menggagalkan pelaksanaan referendum yang direncanakan pemerintah itu.

Untuk melaksanakan gagasan barunya itu, dirumuskan sebuah tata cara pemilihan anggota Dewan Konstituante. Dalam rencana Mayor Mota, Dewan Konstituante ini akan beranggotakan sepuluh orang, dengan perincian:

1. setiap partai (UDT, Fretilin, Apodeti) akan diberi satu kursi;
2. satu orang wakil swasta;
3. satu orang wakil pegawai pemerintah;
4. satu orang ahli masalah-masalah Portugis;
5. satu orang yang mewakili pemerintah.

Sedangkan tiga orang yang tersisa akan ditunjuk oleh pemerintah.

Komposisi seperti yang direncanakan oleh Mayor Mota tidak mendapat persetujuan dari partai-partai karena dianggap tidak adil dan tidak demokratis. Fretilin mengajukan protes dengan menyatakan bahwa rencana Mayor Mota untuk keanggotaan Dewan Konstituante itu tidak demokratis, karena anggota-anggotanya tidak dipilih, tetapi diangkat. Keberatannya juga disebabkan oleh perkiraan, rencana komposisi itu lebih menguntungkan UDT.

Rencana Mayor Mota itu juga amat menyulitkan partai-partai politik karena selama ini rencana perjuangan yang disiapkan ialah memenangkan pendapat rakyat melalui referendum.

Kalau rencana Mayor Mota itu dilaksanakan, perjuangannya harus dialihkan untuk memperoleh dukungan di dalam Dewan Konstituante. Mereka harus mengatur strategi baru untuk menguasai suara di dalam dewan konstituante.

Demikianlah, situasi Timor Timur makin rumit. Kerumitan itu makin bertambah karena ternyata orang-orang pribumi yang aktif di

dalam pasukan militer Portugis juga ikut memberikan suaranya. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas rencana dekolonisasi itu. Setelah melakukan serangkaian pertemuan di antara mereka, pada 18 Januari 1975 terbentuklah apa yang dikenal dengan: *Komisi Sersan Timor*. Komisi ini dipimpin oleh Sersan Inacio Dos Santos dengan mendapat dukungan dari rekan-rekan sersan yang bertugas di dalam pasukan Portugis. Tetapi, kekuatan mereka terpecah karena sesuai dengan orientasi politik mereka, mereka memberikan dukungan terhadap salah satu partai, yaitu UDT, Fretilin, atau Apodeti.

Sementara situasi politik dan kepartaian dalam negeri Timor Timur berjalan lebih rumit, Apodeti yang mendukung integrasi dengan Indonesia harus menghadapi dua partai yang lain yaitu UDT dan Fretilin yang pada satu waktu bahkan bekerjasama. Berlangsung pula langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Portugal. Hal yang dilakukan ialah berusaha menemukan rumusan baru untuk memperbaiki hubungan pemerintah Portugal dengan Pemerintah Indonesia. Ada kesadaran yang kuat bahwa di dalam menyelesaikan masalah di Timor Timur, negara Republik Indonesia tidak dapat diabaikan. Hal itu tidak hanya karena Republik Indonesia berbatasan/bertetangga dengan Australia, tetapi juga adanya kenyataan bahwa di antara partai yang ada itu, ada juga partai Apodeti hanya memberi dukungan untuk berintegrasi ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 9 Maret 1975, Pemerintah Portugal mengundang Pemerintah Indonesia untuk berunding di London. Ajakan itu disetujui oleh pemerintah Indonesia dan dikirim suatu delegasi yang diketuai Ali Murtopo. Setelah melalui pembicaraan yang lama dan amat sulit, akhirnya disetujuilah beberapa kesimpulan umum.

1. Badan penasihat yang diusulkan delegasi Indonesia dianggap tidak perlu karena Badan tersebut menurut delegasi Portugal secara de facto sudah ada, yaitu dengan adanya pertemuan-pertemuan di Lisboa tahun yang lalu dan di London serta pertemuan lain bilamana dianggap perlu.
2. Ide pembentukan *provisional government* setelah mendengarkan penjelasan delegasi Indonesia, dapat mereka lepaskan dan diganti dengan pembentukan suatu *Consultative Body* yang terdiri atas

tiga partai politik Timor Timur yang diperbantukan kepada Gubernur Portugis.

3. Delegasi Portugal menerima bahkan tidak akan menghambat proses integrasi Timor Timur dengan Indonesia, tetapi dengan cara yang tidak bertentangan dengan konsitusi mereka dan tidak sampai mengundang campur tangan internasional.
4. Delegasi Portugal sehubungan dengan hal tersebut di atas.
 - a. memberikan kebebasan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembinaan terhadap Apodeti secara tertutup dan tidak mencolok;
 - b. menyarankan diadakan perbaikan pandangan Indonesia di Timor Timur dengan jalan, antara lain membantu pembangunan ekonomi setempat dan memperbanyak arus wisatawan.
5. Delegasi Portugal mengharapkan pengaruh Indonesia untuk mendorong Apodeti ikut dalam Consultative Body yang akan dibentuk Portugal dalam suatu pertemuan yang akan diadakan dengan ketiga partai di Macao. Portugal mengharapkan pemerintah Indonesia agar mengirimkan delegasi tingkat tingginya ke Hongkong untuk dapat memantau jalannya pertemuan Macao itu, dan bila perlu dapat menghubungi Portugal untuk dimintakan pendapat-pendapatnya.

Bagaimana pun apa yang diperoleh dari pertemuan di London itu merupakan langkah maju. Memang pelaksanaan isinya tidak mudah. Salah satu hal yang agak rumit dari kesepakatan itu, ialah bagaimana mengajak dan membawa ketiga partai agar bersedia ikut dalam pertemuan lanjutan, yang direncanakan akan diadakan di Macao. Tugas Indonesia ialah mempengaruhi Apodeti agar mau ikut dalam pertemuan yang akan diadakan di Macao itu. Untuk membujuk Apodeti, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirim tim khusus ke Timor Timur dan anggota tim ini dipilih sendiri oleh Ali Murtopo, yaitu:

1. A. Sugianto,
2. Pitut Soeharto,
3. Soekanto, dan
4. Louis Taolin.

2. Perang Saudara

Walaupun telah diambil pelbagai langkah perundingan-perundingan, situasi yang rumit tetap berkembang. Pertentangan di antara partai-partai makin meruncing. Bahkan pada akhirnya melahirkan pertempuran yang tidak dapat dihindarkan. Apalagi setelah Gubernur Timor Portugis, Lemos Pires melarikan diri ke Pulau Atauro untuk menyelamatkan diri dari kekacauan yang tengah berlangsung di ibukota, Dili.

Dalam memperebutkan kekuasaan di Dili, setelah Portugis tidak lagi mengatur dan memerintah, partai UDT dan Fretilin melakukan kegiatan-kegiatan untuk merebut kekuasaan. Selain UDT dan Fretilin, Apodeti juga menyatakan pihak yang berkuasa di wilayah Timor Timur. UDT dan Fretilin bahkan telah mengirimkan telegram kepada komisi dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang ada usaha untuk menggabungkan UDT dan Fretilin dalam satu wadah koalisi pada tanggal 20 Januari 1975. Akan tetapi karena dasar kerja sama tidak kuat, maka koalisi bubar. Pada tanggal 27 Mei 1975, Ketua UDT, F.X. Lopes da Cruz secara sepihak menyatakan pembubaran koalisi itu. Akibatnya, kekacauan di Timor Timur tambah memuncak.

Dalam kenyataan Fretilin mendapat dukungan dari Pemerintah Portugis dan bahkan memperoleh bantuan senjata dari Tropas (angkatan bersenjata Portugis), sebelum mereka kembali ke Portugal. Dengan fasilitas-fasilitas itu orang-orang Fretilin dapat memperluas kekuasaannya dengan cara-cara teror dan pembunuhan terhadap orang-orang UDT, Apodeti, Kota dan Trabalhista.

Apodeti paling banyak mengalami penderitaan dalam Perang Saudara yang membawa kekacauan di Timor Timur. Apodeti mendapat tekanan baik dari UDT maupun dari Fretilin. Pada tanggal 27 Juli 1975 di Kabupaten Ainaro, bendera Apodeti diturunkan oleh sekelompok orang Fretilin dan UDT.

Pada tanggal 1 Agustus 1975, UDT berhasil merebut kantor-kantor pemerintah di Dili, seperti kantor pos, kantor telepon, telegram, dan stasiun radio. UDT melakukan penangkapan bukan saja terhadap orang-orang Fretilin melainkan juga terhadap anggota Apodeti.

Pada tanggal 21 Agustus 1975, pasukan Fretilin dengan persenjataan paling lengkap di antara kekuatan-kekuatan lain mengambil alih serangan. Tindakan balas dendam Fretilin tidak saja ditujukan kepada UDT tetapi juga terhadap Apodeti. Sudah sejak bulan September, Oktober dan November 1975, banyak pengikut Apodeti meninggalkan wilayahnya menuju daerah yang berada di bawah kontrol Indonesia. Ini sebagai bukti ketidakmampuan mereka melawan keganasan Fretilin.

Pada tanggal 11 November 1975 pimpinan UDT, Lopes da Cruz, Ir. Mario Viegas Carrascalao, Joao Carrascalao dan Nascimento, memberikan keterangan pers di Batugede. Dalam konferensi pers ini dijelaskan bahwa partai Apodeti, UDT, Kota, dan Tralabista, sudah membuat sebuah petisi dan deklarasi penggabungan Timor Timur dengan Indonesia.

Sikap politik keempat partai Timor ini (UDT, Apodeti, Kota dan Tralabista) seiring dengan persiapan yang terus mereka lakukan untuk mengadakan serangan balik terhadap Fretilin. Cara yang mereka lakukan mengambil tenaga sebagian besar dari para pengungsi yang saat itu telah membanjiri wilayah negara Republik Indonesia. Jumlahnya saat itu sudah mencapai sekitar 40.000 orang. Para pengungsi ini telah mulai memasuki wilayah Indonesia sejak UDT disudutkan oleh Fretilin. Bagi pemerintah Republik Indonesia, pengungsi ini telah menjadi persoalan yang sangat rumit. Hal itu karena Indonesia harus mengeluarkan sekitar *enam juta rupiah* sehari untuk menampung para pengungsi ini. Jumlah tersebut untuk ukuran nilai uang pada tahun 1975 adalah jumlah yang tidak sedikit.

Bagi pemerintah Republik Indonesia, persoalan yang dihadapinya tidak hanya bagaimana harus mengurus para pengungsi, tetapi juga gangguan keamanan, baik karena arus pengungsi ini maupun oleh kesengajaan pasukan Fretilin yang mencoba mengejar para pengungsi sampai jauh melewati perbatasan Indonesia.

Sebagian dari pengungsi ini, khususnya para pemuda yang berbadan sehat diambil oleh UDT, Apodeti, Kota, dan Tralabista ke dalam pasukan gabungan setelah mereka menjalankan latihan kemiliteran secara cepat. Kekuatan pasukan gabungan ini makin bertambah setelah adanya sejumlah sukarelawan dari propinsi lain yang

kemudian secara bersama-sama memberikan serangan balik kepada Fretilin. Pasukan gabungan ini sejak awal September 1975 terus bertambah dengan sukarelawan baru dan ternyata gerakan mereka melawan Fretilin mulai memberikan hasil yang menggembirakan.

Dari perbatasan Indonesia, pasukan gabungan ini menyusup kembali memasuki wilayah Timor Timur. Selama bulan September 1975 pelan-pelan sifat serangan gerilya mulai berubah menjadi serangan serentak. Bahkan, tanggal 3 Oktober 1975 pasukan gabungan ini berhasil merebut Batugede. Penguasaan kota kecil di ujung wilayah Timor Timur ini, bagaimana pun banyak membantu mengangkat moral pasukan gabungan. Hal ini merupakan modal bagi mereka mempersiapkan serangan-serangan berikutnya.

Sementara itu, Fretilin yang "merasa" sudah menguasai sebagian besar wilayah Timor Timur ingin berbuat lebih jauh dalam usaha memperkuat kedudukan mereka. Tanggal 7 Oktober Komite Sentral Fretilin mengadakan rapat partai guna membicarakan kemungkinan mempersiapkan rancangan struktur organisasi ketatanegaraan. Bahkan, tanggal 13 Oktober 1975 Xavier do Amaral, pimpinan Fretilin meresmikan apa yang disebutnya sebagai Administrasi Pemerintahan Sementara Timor Timur. Sampai dengan awal tahun 1976, Fretilin terus melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap orang Apodeti dan UDT. Di Aileu, pada bulan Februari 1976 dalam kegiatan untuk mencari korban kekejaman Fretilin, telah ditemukan sebanyak kira-kira 50 orang mayat, yang sebagian besar anggota UDT. Dari sebuah lobang penggalian yang lain lagi, ditemukan 60 mayat di antaranya anggota Apodeti.

Dalam kegiatan pencarian korban Fretilin, pada tanggal 17 Februari 1976 di Same ditemukan sebuah lobang berisi sejumlah mayat yang tidak semua dikenali lagi. Dari seorang saksi, dari kejahatan Fretilin yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 1976 terdapat nama-nama: Critova Perai Santos, Joaquein Fernandes, Muarino, Soares, Sebastian Soares, dan Carlos Lemboh, semuanya adalah tokoh-tokoh yang gigih menghadapi Fretilin.

Salah seorang korban pembunuhan Fretilin adalah Osorio Soares, Sekretaris Jenderal Apodeti dan merupakan tokoh yang terkenal. Ia

mengikuti pendidikan filsafat di seminari di Macao, jajahan Portugis. Pada usia 35 tahun, Soares telah menjadi tokoh yang sangat penting dalam mendukung penuh integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia. Ia dibantai oleh teroris Fretilin pada tanggal 28 Januari 1976 di desa Holorus beserta kedua adik dan 4 pengikutnya.

RANGKUMAN

Dalam rangkaian dengan proses dekolonisasi seperti yang telah direncanakan oleh pemerintah Portugal, berkembanglah situasi yang mendorong ke proses penentuan nasib sendiri.

Dalam situasi yang cukup rumit telah ditempuh pelbagai cara di antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk saling mendekati. Akhirnya disepakati melalui proses perundingan.

Tampaknya perundingan itu tidak mencapai hasil yang diharapkan. Sementara itu, kekuatan-kekuatan politik di Timor Timur saling bertentangan di dalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya masing-masing.

Pertentangan makin meruncing dan tidak dapat dipertemukan untuk berdamai. Bahkan, berkembang menjadi perang saudara. Artinya, terjadi perang dan di dalam perang yang saling membunuh itu, yang berhadapan ialah penduduk Timor Timur sendiri. Dalam kasus Timor Timur ini yang berhadapan dan saling membunuh itu adalah saudara dalam arti keluarga.

Pertanyaan

1. Pemerintah Portugis di Timor Timur telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama *Dewan Konsultatif*. Apakah tugas Dewan ini? Terangkan dengan jelas!
2. Pada tanggal 9 Maret 1975 pemerintah Portugal mengundang Pemerintah Indonesia untuk berunding di London. Apakah hasil persetujuan di London itu. Sebutkan!
3. Sepeninggal Gubernur Lemos Pires yang melarikan diri ke Pulau Atauro, keadaan di Timor Timur makin kacau. Bahkan kemudian terjadi perang saudara. Apa sebab-sebab terjadi perang saudara itu? Terangkan dengan jelas!

BAB VI

KEMBALI KE PANGKUAN IBU PERTIWI

1. Proklamasi Balibo

Dalam pada itu pemerintah Portugis mencoba membuat langkah baru. Pada tanggal 13 Oktober Menteri Victor Crespo memanggil Dubes RI di Lisboa dan menyatakan bahwa Portugis ingin mengadakan pertemuan lagi dengan pemerintah Republik Indonesia. Ajakan pemerintah Portugis ini makin memperjelas bahwa Portugis ingin melibatkan Indonesia lebih jauh dalam masalah Timor Timur. Tampaknya pemerintah Portugis ingin keluar dari Timor Timur dengan bantuan Indonesia. Kenyataannya, Portugis tidak lagi berdaya untuk mengatasi persoalan Timor Timur. Mereka tidak lagi menguasai pulau itu. Agar tidak memperoleh rasa malu, diambil langkah siasat melibatkan pemerintah Republik Indonesia lebih jauh. Dengan cara itu akan dapat dibangun kesan internasional bahwa Indonesia membantu sepenuhnya. Di pihak lain Indonesia dihadapkan pada dua pilihan membiarkan Timor Timur menjadi ajang perang saudara, yang berarti memberikan kesempatan pada pihak-pihak lain untuk mempergunakan Timor Timur sebagai basis yang satu saat mungkin akan membahayakan keamanan Indonesia atau menerima desakan masyarakat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia dengan akibat bahwa Indonesia akan dipersoalkan di forum internasional oleh pemerintah Portugal. Apa pun pilihan pemerintah Republik Indonesia, keduanya menguntungkan Portugal, karena itulah mereka berhasrat sekali untuk kembali bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia.

Hasrat untuk bertemu kembali dengan pemerintah Republik Indonesia terus dimatangkan, khususnya melalui kesempatan-kesempatan di PBB, tepat Menlu Portugal Artunes menyatakan ajakannya untuk bertemu dengan Menlu Adam Malik.

Pihak pemerintah Republik Indonesia menerima baik ajakan itu, karena sudah terdesak pada pilihan harus menerima keinginan para pihak di Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia adalah dapat atau baru bisa mempertimbangkan keinginan itu bilamana sesuai dengan prosedur hukum internasional. Dengan demikian, ada titik temu antara keduanya, tetapi dari sudut kepentingan yang berbeda.

Pertemuan yang dimaksud akhirnya terselenggara juga di Roma tanggal 2-3 November 1975.

Pada permulaan pertemuan, perundingan berjalan dengan amat sulit. Pengalaman Indonesia berunding dengan Dr. Santos di Jakarta pada Minggu kedua bulan September 1975 membuat perundingan kurang lancar. Tetapi, akhirnya kesulitan dapat diatasi. Pada akhir pertemuan berhasil ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU). Beberapa masalah yang menonjol dari hasil pertemuan Roma ini adalah sebagai berikut.

- a. Kedua belah pihak menyadari bahwa tanggung jawab mengenai dekolonisasi Timor Timur terletak di tangan Portugis. Pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan Portugis di Timor sampai masyarakat Timor berhasil melaksanakan hak penentuan nasib sendiri (the right of self determination).

Untuk maksud itu kedua belah pihak berusaha menghindari adanya campur tangan luar terhadap proses dekolonisasi tersebut.

- b. Dalam pelaksanaan dekolonisasi itu kedua belah pihak bersepakat untuk mengusahakan ketertiban dan keamanan yang memungkinkan masyarakat Timor untuk menentukan masa depan mereka.
- c. Kedua belah pihak akan berusaha dengan sekuat tenaga meyakinkan pihak yang bersengketa di Timor untuk segera maju ke meja perundingan dengan pihak Portugal guna mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyat Timor.
- d. Pemerintah Portugal menyadari bahwa Indonesia adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam masalah Timor, karena itu

pemerintah Portugal akan berusaha terus menerus untuk berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia dalam setiap usaha dan tahapan dekolonisasi.

- e. Pemerintah Portugal menyadari kesulitan yang dihadapi pihak Indonesia sehubungan dengan banyaknya pengungsi yang membanjiri Indonesia. Karena itu, masalah ini termasuk yang harus diselesaikan secepat mungkin, bersamaan dengan masalah-masalah lain yang mendesak, seperti perlunya penciptaan dan pemeliharaan *Cease fire* di Timor, pemecahan masalah tahanan orang Portugis yang berada di tangan UDT dan masalah lain.
- f. Pemerintah Portugal tidak berniat untuk menginternasionalkan masalah Timor Timur.

Seperti juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya (di Lisboa, London, dan Macao), hasil pertemuan Roma ini sangat sedikit pengaruhnya terhadap Timor Timur. Fretilin sama sekali tidak mau mengakuinya. Mereka masih terpesona dengan kemenangan semu yang mereka peroleh dari UDT dan merasa dapat berbuat sebagaimana yang dikehendakinya.

Karena itu, pada tanggal 28 November 1975 Komite Sentral Fretilin mengumumkan apa yang mereka sebut "*Republik Demokrasi Timor*" dengan Xavier do Amaral sebagai presidennya. Selanjutnya, beberapa hari kemudian mereka mengumumkan nama-nama pejabat dalam "negara" yang mereka bentuk. Dalam pengumuman itu disebutkan, antara lain nama Jose Ramos Horta sebagai "Menteri Luar Negeri" dan Nicolau Lobato sebagai "perdana menteri".

Pernyataan sepihak Fretilin ini tentu saja segera mendapat reaksi berbagai pihak. Pemerintah Indonesia misalnya, menanggapi pernyataan itu melalui Menteri Penerangan, Mashuri yang menjelaskan bahwa Indonesia menyesalkan tindakan sepihak Fretilin itu. Tindakan Fretilin itu bertentangan dengan usaha yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia ke arah tercapainya penentuan nasib sendiri dari rakyat Timor Timur. Penyesalan Indonesia juga ditujukan kepada pemerintah Portugal yang membenarkan tindakan Fretilin itu. Pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa

masa depan Timor Timur harus ditetapkan oleh seluruh rakyat Timor Timur sendiri. Karena itu, pihak Portugal harus terus berusaha untuk menghubungi semua pihak yang bersengketa agar bersedia melakukan perundingan.

Kekhawatiran pemerintah Indonesia sebagai akibat adanya pernyataan Fretilin tertanggal 28 November itu, pada akhirnya menjadi kenyataan. Jika Fretilin bisa menyatakan bahwa Timor Timur berada di bawah kekuasaannya, tentu pihak lain bisa berbuat seperti yang dilakukannya dan sekaligus menolak pernyataan proklamasi yang dikeluarkan oleh Fretilin itu. Kekuatan gabungan dari partai Apodeti, UDT, Kota, dan Tralabalista membuktikan hal itu. Dua hari kemudian setelah Fretilin mengumumkan pernyataan, kekuatan gabungan ini mengeluarkan pula sebuah proklamasi tandingan. Pernyataan ini dikeluarkan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 dan pernyataan ini kemudian lebih terkenal dengan Proklamasi Balibo. Adapun bunyi Proklamasi tersebut adalah sebagai berikut.

PROKLAMASI

Kami, rakyat Timor Timur, yang diwakili oleh APODETI – Associação Popular Democrática Timorese, UDT – Uniao Democrática Timorese, Kota – Klibur Oan Timur Aswain and Partido Tralabalista, setelah mempertimbangkan dengan seksama aksi sepihak Fretilin yang terwujud melalui "Proklamasi kemerdekaan" mengenai wilayah Timor Timur, yang dinyatakan disetujui oleh Pemerintah Portugis., kenyataan semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Timur.

Menimbang, bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri secara bebas dari rakyat Timor Timur tidak sesuai dengan tindakan tersebut.

Mengingat kenyataan, bahwa beberapa inisiatif telah ditempuh untuk memperoleh penyelesaian politik secara damai dalam masalah Timor, terutama:

- a. pertemuan Macao, yang dengan sengaja Fretilin tidak hadir walaupun pemerintah Portugis mengundang wakil mereka;

- b. kesediaan pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya.
- c. pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara Menteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia, yang telah menghasilkan memorandum saling pengertian di antara kedua negara.
- d. usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan kedatangan Menlu Adam Malik ke daerah perbatasan menyampaikan semangat pertemuan Roma.

Akibatnya tercapailah kesimpulan bahwa Fretilin dengan sengaja tidak mau tahu semua usaha-usaha tersebut.

Tambahan lagi Fretilin telah mempertunjukkan sikap salah, bahwa dengan tindakan kriminalitasnya telah menghalangi rakyat Timor Timur untuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang sah.

Mengingat suasana yang disebabkan oleh Fretilin dengan pernyataan sepihak kemerdekaan Timor Timur telah menggagalkan segala kemungkinan ke arah pemecahan damai seperti yang diinginkan oleh rakyat;

Merasakan, bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda yang selama hampir lima ratus tahun telah memisahkan hubungan darah, ikatan moral bangsa dan kebudayaan antara bangsa Indonesia dengan Timor Timur;

Mengingat, bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling baik menyambungkan secara kokoh hubungan tradisi dengan bangsa Indonesia;

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan-alasan di atas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan Indonesia; Proklamasi ini pernyataan paling sungguh dari keinginan rakyat Timor Timur.

Berhubungan dengan isi dari Proklamasi penyatuan ini pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat, yang ingin menjadi bagian bangsa Indonesia, yang berada di bawah teror dan fasis yang dilakukan oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis.

Balibo, 3 November 1975

Atas nama APODETI	Atas nama UDT
ttd	ttd
Guilherme Maria Goncalves	Francisco X. Lopes da Cruz
Anggota Presidium	Presiden
ttd	ttd
Alexandrino Borromeu	Domingus de Oliverira
Anggota Presidium	Sekretaris Jenderal
Atas nama KOTA	Atas nama PARTIDO TRABALHISTA
ttd	ttd
Jose Matins	Domingos C. Pereira
Presiden	Anggota Direktur

Adanya Proklamasi Balibo ini, berarti sudah ada dua jenis Proklamasi yang menyatakan status Timor Timur. Terhadap kedua Proklamasi tersebut (Fretilin dan gabungan kekuatan empat partai), pemerintah Portugal segera mengeluarkan pernyataan pula bahwa mereka masih tetap sebagai pengusaha yang sah di Timor Timur. Menurut Lisboa, Portugal tidak dapat menerima Proklamasi Fretilin dan Proklamasi tandingan (Proklamasi Balibo) yang dikeluarkan oleh gabungan empat partai lainnya.

Sekarang semua "rahasia" telah terbuka. Pernyataan Portugal yang terakhir tentu saja tidak banyak berpengaruh lagi. Kenyataannya, Portugal tidak lagi berkuasa di daratan Timor, bahkan Gubernur Lemos Pires sudah lari ke Atauro. Ketidakberdayaan Portugallah yang menyebabkan suasana di Timor Timur jadi tidak menentu,

rawan dan penuh gejolak. Indonesia sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah yang bergolak ikut merasakan akibatnya.

Bagi Pemerintah Republik Indonesia perkembangan baru di Timor Timur membuat posisinya sulit. Kalau Pemerintah Republik Indonesia menerima Proklamasi Balibo, dunia dengan gampang menyebutnya sebagai negara yang punya ambisi memperluas wilayah. Tidak menerima keinginan Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralalhista, berarti membiarkan mereka dihancurkan oleh Fretilin yang oleh sementara pihak sudah melihat kecenderungannya terhadap komunisme. Karena itu, reaksi pertama Indonesia adalah sangat hati-hati dalam menghadapi Proklamasi Balibo. Menlu Adam Malik dalam pernyataannya tanggal 1 Desember 1975 menyatakan bahwa ia sangat terharu mendengar adanya Proklamasi Balibo itu.

Walaupun Proklamasi Balibo tertanggal 30 November 1975 dapat dikatakan sebagai reaksi dari partai-partai politik gabungan Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralalhista terhadap proklamasi sepihak dari Fretilin, proklamasi itu mempunyai nilai sejarah yang amat penting bagi kelangsungan ketata negaraan dan hukum tata negara yang baru bagi Timor Timur. Proklamasi Balibo pada hakikatnya merupakan sumber dan landasan tata hukum baru yang telah diciptakan oleh kekuatan gabungan partai-partai politik di Timor Timur, atas nama rakyat mereka.

2. Pemerintah Sementara Timor Timur

Dengan berdasarkan pada kekuatan tata negara yang lahir dari Proklamasi Balibo itu, suatu hal yang wajar jika kemudian kekuatan gabungan partai politik itu mengambil langkah lanjut dengan membentuk suatu pemerintahan baru, yang dikenal dengan Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) pada 17 Desember 1975. Langkah pembentukan PSTT ini kemudian dilanjutkan dengan membentuk lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wilayah Timor Timur pada awal tahun 1976.

PSTT dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo (tokoh Apodeti) dengan Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakilnya,

sedangkan DPR Timor Timur diketuai oleh Guelherme Maria Goncalves.

Adapun susunan personalia pemerintah Timor Timur yang lain ialah sebagai berikut.

	Kedudukan	Nama	Partai
1.	Kepala Dewan Pertimbangan	Guilherme Maria Goncalves	Apodeti
2.	Kepala Staf Ahli	Ir. Mario Vigas Carrascalao	UDT
3.	Kepala Sekretariat	Jose Antonio Bonifacio (Jeka) Dos Reis Arajuo	Apodeti
4.	a. Kepala Komunikasi Sosial	Jose Martins	Kota
	b. Kepala Dinas Pen. Rakyat	Antonio Quintao	UDT
	c. Kepala Dinas Radio dan Film	Mariano Lopez da Cruz	UDT
	d. Kepala Dinas Percetakan/ Penerbitan	Jose Catarino de Melo	Apodeti
5.	a. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat	Isaac dos Reis	Apodeti
	b. Kepala Dinas Kesehatan	Bonifacio dos Reis	Apodeti
	c. Kepala Dinas Pertanian	Abilio Martins	Apodeti
	d. Kepala Dinas Perikanan	Miguel Ribeiro	UDT
	e. Kepala Dinas Spiritual	Pastor Apolonario	
	f. Kepala Dinas Kehutanan	Mouzinho Dasilva Baros	Apodeti
	g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum	J. Carrascalau	UDT
	h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jose Antonio	Pastor, SH
	i. Kepala Dinas Perkebunan	Albano Rebelo da Costa e Silva	Trabalhista
6.	Anggota-anggota Dewan Pertimbangan akan ditunjuk lebih lanjut antara lain:	a. Tomas Dias Ximenes b. Domingos C. Pereira c. Dr. Jose Gonqalves d. Jaao Tavares e. Thomas Gonqalves dan sebagainya	Kota Trabalhista Ex. Menteri Fretilin UDT Apodeti Menyusul

Selanjutnya untuk menegaskan kembali tekad proklamasi Balibo, pada 31 Mei 1976, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat serta wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun bunyi lengkap petisi itu adalah seperti di bawah ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WILAYAH TIMOR TIMUR

PETISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KAMI ATAS NAMA SELURUH RAKYAT TIMOR TIMUR, SETELAH MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAS KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA TERBUKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WILAYAH TIMOR TIMUR PADA TANGGAL 31 MEI 1976 DI DILI, YANG PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI KEHENDAK RAKYAT SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PROKLAMASI INTEGRASI TIMOR TIMUR PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 1975 DI BALIBO, DENGAN INI MENDESAK KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA AGAR DALAM WAKTU SESINGKAT-SINGKATNYA MENERIMA DAN MENGESAHKAN INTERGRASI RAKYAT SERTA WILAYAH TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEPENUHNYA TANPA REFERENDUM.

DILI, 31 Mei 1976

KEPADA PEMERINTAH SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TIMOR TIMUR TIMOR TIMUR

KETUA

KETUA

ttd

ttd

ARNALDO DOS REIS ARAUJO

GUILHERME MARIA GONCALVES

Selanjutnya untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana yang dikehendaki, setelah pembentukan PSTT pada bulan Desember 1975 itu ditetapkan pula pejabat-pejabat yang menjadi bupati-bupati di Timor Timur. Mereka itu ialah sebagai berikut.

Nama Kabupaten	Nama Bupati	Nama Partai dari Pejabat Bupati
1. Dili	Mario Sances da Costa	Mantan Anggota Fretilin
2. Baucau	Abel da Costa Belo	Mantan Anggota Apodeti
3. Manatuto	Luis Maria da Silva	Mantan Anggota Apodeti
4. Oekusi	Jaime dos Remedios de Oliveira	Mantan Anggota Fretilin
5. Viqueque	Jaime de Carvalho	Mantan Anggota Apodeti
6. Lautem	Claudio Vieira	Mantan Anggota Partisan
7. Babonaro	Joao Tavares	Mantan Anggota UDT
8. Ainaro	Mises da Silva Barres	Mantan Anggota Apodeti
9. Ermera	Thomas de Aquino Gonqalues	Mantan Anggota Panglima Partisan
10. Covalima	Americo da Costa Munes	Mantan Anggota Apodeti
11. Liquisa	Francisco Rebeiro	Mantan Anggota Apodeti
12. Ailue	Ebel dos Santos Fatima	Mantan Anggota UDT
13. Same	Alexandrino Borromeu Duarte	Mantan Anggota Apodeti

Sementara itu, Presiden Soeharto kemudian memanggil sejumlah pejabat tinggi Indonesia untuk mengetahui perkembangan terakhir situasi di Timor Timur. Mereka yang dipanggil ialah Menteri Pertahanan Keamanan, Kepala Bakin, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Operasi Hankam, Asisten I Hankam dan Asisten Operasi Hankam. Sebelum itu Presiden juga telah menerima Menteri Luar Negeri, Adam Malik, yang menyerahkan kepada Presiden naskah Proklamasi Balibo. Keesokan harinya tanggal 4 Desember, Menteri Penerangan Mashuri, atas nama pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Pemerintah Republik Indonesia menghargai hak bersumpah dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan partai-partai UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalhista yang atas nama

rakyat Timor Timur menyatakan menyatukan diri ke dalam negara Republik Indonesia. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang menjamin keamanan wilayah nasional, menjaga kedaulatan negara, melindungi penduduk terhadap gangguan dari luar serta berdasar atas asas anti kolonialisme dan asas perikemanusiaan. Pemerintah bersama rakyat Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk melindungi rakyat di wilayah Timor agar proses dekolonisasi terwujud sesuai dengan cita-cita keinginan seluruh rakyat Timor Timur.

Pada bagian awal pernyataan itu Pemerintah Indonesia mengulangi sikap resmi yang pernah diambil Indonesia yang tercermin dari berbagai pernyataan dan tindakannya. Selain itu, ditegaskan juga penyesalannya atas tindakan Fretilin yang menurut Indonesia tidak mendorong tercapainya proses dekolonisasi yang direncanakan Pemerintah Portugal.

Memperhatikan pernyataan ini, sudah jelaslah pendirian Pemerintah Indonesia dan tindakan apa yang dilakukan dalam menghadapi situasi yang rumit tersebut. Agar kebijaksanaan dalam negeri Indonesia sejajar dengan usaha diplomasi, pada hari yang bersamaan wakil tetap Indonesia di PBB, Anwar Sani, menyerukan kepada PBB agar bekerja sama dengan Portugal, menjamin hak rakyat Timor Timur menentukan masa depan politik mereka sendiri.

Sementara tokoh-tokoh Apodeti, UDT, Kota, dan Tralabista terus meyakinkan Pemerintah Indonesia tentang maksud Proklamasi Balibo dan penjelasan yang mereka berikan kepada dunia melalui telegram dan konperensi pers, keempat kekuatan itu terus melakukan pengaturan pasukan mereka. Jika sejak pertengahan Agustus sampai akhir September Fretilin berkuasa di Timor Timur, sejak awal Oktober Pasukan Gabungan Apodeti, UDT, Kota, Tralabista, dan sukarelawan mulai merambat. Dan, satu demi satu kota-kota kecil di Timor Timur jatuh ke tangan mereka. Sampai awal Desember 1975 beberapa kota sudah jatuh. Fretilin memusatkan pertahanan mereka di Kota Dili.

Serangan menentukan terhadap Dili dilakukan pasukan gabungan partai politik dan sukarelawan lewat tengah malam tanggal 7 Desember 1975. Mereka memulai serangan dengan menghancurkan

kan meriam artileri Fretilin di timur dan barat kota Dili. Kemudian diarahkan ke lapangan terbang Dili.

Dili akhirnya jatuh, pasukan Fretilin kucar-kacir dan melarikan diri ke luar kota Dili. Pasukan gabungan partai-partai politik segera melepaskan para tahanan. Salah seorang di antara tahanan itu adalah tokoh utama Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo.

Setelah kota Dili jatuh, Fretilin pada mulanya mundur ke Baucau, kota kedua terbesar setelah Dili, tetapi pertahanan Fretilin juga dapat dibobolkan pasukan gabungan karena 10 Desember 1975 Baucau pun jatuh. Jatuhnya Baucau ini memungkinkan untuk segera membuka jalur penerbangan dari dan ke Timor Timur.

Jatuhnya kota Dili dan Baucau berarti memukul Fretilin yang diperkirakan saat itu berkekuatan sekitar 20.000 orang (2.500 di antaranya terdiri dari tentara reguler eks Portugis dan 7.000 orang yang telah mendapat latihan militer dari tentara Portugis). Mereka mundur ke berbagai arah seperti Aileu, Ermera, Maubara, Liquica, Ainaro, dan Lospalos. Kota-kota itu juga tidak bertahan dan akhirnya juga jatuh ke tangan pasukan gabungan partai-partai politik. Karena sudah tidak dapat lagi bertahan di dalam kota, kemudian Fretilin dan sejumlah pengikutnya melarikan diri ke daerah-daerah pegunungan.

Setelah kota Dili jatuh dan Fretilin melarikan diri ke gunung, lembaran baru kehidupan bekas jajahan Portugis ini terbuka. Tugas utama pasukan gabungan ini adalah mengembalikan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah Timor Timur. Sejalan dengan itu dipikirkan pula tentang masa depan Timor Timur sesuai dengan isi dan makna Proklamasi Balibo, yakni bergabung dengan Republik Indonesia. Setelah itu selesai, usaha meyakinkan dunia bahwa kehendak para tokoh Timor Timur bukan hanya kehendak mereka sendiri, melainkan kehendak segenap masyarakat Timor Timur, usaha itu harus dilanjutkan.

Bagaimana proses penggabungan itu harus dilakukan. Seperti sudah digariskan sejak awal oleh Pemerintah Indonesia, bahwa jika "Timor Portugis" ingin bergabung dengan Indonesia, penggabungan itu tidak mungkin dilakukan antara dua negara, tetapi Timor Timur harus melebur diri ke dalam Republik Indonesia. Untuk maksud itu

tokoh-tokoh Timor Timur mengadakan persiapan-persiapan dan penahapan, seperti membentuk pemerintah sementara kemudian baru menentukan langkah berikutnya. Hal ini penting untuk memenuhi keinginan PBB tentang integrasi Timor Timur kepada suatu negara lain. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) sesuai dengan keinginan PBB yang bersifat otonom. Setelah itu dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur yang anggota-anggotanya terdiri dari para liurai di seluruh Timor Timur.

Seminggu kemudian, 7 Juni 1976, para pemimpin eksekutif dan legislatif PSTT menyerahkan Petisi Rakyat Timor Timur tersebut kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Adapun tokoh yang memimpin dan yang menjadi anggota utusan rakyat Timor Timur yang datang ke Jakarta untuk menyampaikan Petisi itu kepada Presiden berjumlah 44 orang, yaitu :

1. Arnaldo dos Rei Araujo
2. Francisco Lopes da Cruz
3. Guiherme Maria Goncalves
4. Gaspar Correia da Silva Nunes
5. Thomas Dias Ximenes
6. Pe. Jose Antonio da Costa
7. Ny. Maria Anuncia de Jesus Osorio Soares
8. Ny. Elsa Olinda Osorio Pinto
9. Daniel Joao Baptista
10. Albuquerque Mario Borges
11. Joaquim da Fonseca
12. Januario dos Reis Costa
13. Louis Gonzaga Soares
14. Antonio Bras
15. Vicente Paula Tilman
16. Joaquim dos Santos Marios
17. Jaime da Costa
18. Mateus de Carvalho
19. Alipio Maris de Fatima

20. **Guilherme dos Santos**
21. **Afonso Henriques**
22. **Apolinario dos Santos**
23. **Jose Hermenegildo da Costa**
24. **Paulus Mau Cardoso**
25. **Claudio Vieira**
26. **Abel da Costa Belo**
27. **Jaime dos Santos Carvalho**
28. **Luis Maria da Silva**
29. **Matio Sanches da Costa**
30. **Abel de Fatima Gomes**
31. **Alexandrino Borromeu**
32. **Moises da Silva**
33. **Tomas Goncalves**
34. **Joao Tavares**
35. **Francisco dos Santos Ribeiro**
36. **Jaime de Oliveira**
37. **Americo da Costa Nunes**
38. **Jose Alberto de Carvalho**
39. **Jose Raimundo Sarmento**
40. **Herminio da Costa**
41. **Domingos de Oliveira**
42. **Tito dos Santos Babtista**
43. **Joao Corbao Matins**
44. **Ir. Mario Veigas Carrascalao**

Untuk mengetahui keinginan rakyat Timor Timur itu, dibentuk delegasi Pemerintah Indonesia ke Timor Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/LN, Tahun 1976. Delegasi ini bertugas untuk menyaksikan serta memperoleh gambaran secara langsung tentang kehendak rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan rakyat Indonesia. Delegasi berangkat ke Timor Timur pada minggu ketiga Juni 1976, dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (waktu itu Amir Mahmud). Bersama rombongan delegasi tersebut, juga turut beberapa duta besar asing, wartawan dalam dan luar negeri.

Dalam tugasnya, delegasi Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok C yang dipimpin oleh R. Ng Domo Pranoto mengunjungi Ermera, Balibo, dan Bobonaro.

Pada tanggal 24 Juni 1976 rombongan delegasi Indonesia disambut dengan upacara pembacaan Petisi di Balibo yang berisi keinginan dan tekad rakyat Timor Timur untuk berintegrasi ke dalam negara Republik Indonesia.

Dalam upacara yang dihadiri kira-kira 30.000 orang itu, dibacakan oleh Rafinus Manek.

Dalam upacara itu, selain Petisi Balibo diserahkan pula satu keranjang tanah dari Bumi Timor Timur oleh Manek Aman Asuten tokoh Adat Balibo, kepada R. Ng. Domo Pranoto, wakil ketua DPR Republik Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia. Tanah yang ditempatkan dalam keranjang yang dialasi dan ditutup lempengan emas itu merupakan pernyataan simbolik dari maksud berintegrasi dengan Republik Indonesia.

Keberhasilan penyerahan Petisi dan tanah yang didukung rakyat Balibo secara luas adalah berkat peranan Rafael dos Santos. Ia adalah tokoh teladan dan panutan masyarakat setempat, yang juga seorang guru agama. Rafael dos Santos sangat berpengaruh dalam masyarakatnya. Dalam usianya yang ke-89 ia masih mengabdikan dirinya kepada gereja Balibo. Dan, boleh dikatakan sebagian besar hidupnya untuk gereja. Itulah sebabnya sampai-sampai ia dianggap sebagai "Tuhan yang turun ke bumi".

Setelah mengadakan peninjauan ke berbagai wilayah Timor Timur tanggal 26 Juni 1976, delegasi tersebut melaporkan tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia. Laporan itu menguraikan kenyataan sebenarnya mengenai keinginan rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Indonesia, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Dengan demikian, Petisi Rakyat Timor Timur itu telah mempunyai kekuatan yuridis yang tidak perlu diragukan lagi.

Berdasarkan hasil peninjauan delegasi tersebut, kemudian Petisi Rakyat Timor Timur tertanggal 31 Mei 1976, dibahas dalam sidang Kabinet Republik Indonesia, pada tanggal 29 Juni 1976.

Kemudian, 30 Juni 1976 Pemerintah Indonesia mengajukan rancangan undang-undang tentang pernyataan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada sidang pleno DPR-RI, 15 Juli 1976, secara aklamasi pimpinan dan anggota Dewan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah untuk dijadikan undang-undang.

Keputusan DPR-RI itu segera memiliki kekuatan hukum, setelah Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Dalam undang-undang tersebut dimuat penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus pembentukan Timor Timur sebagai propinsi ke-27.

Secara simbolis kemudian Presiden RI menyerahkan kepada Arnaldo dos Reis Araujo, duplikat bendera pusaka untuk dikibarkan di Timor Timur; dan kepada F.X. Lopes da Cruz diserahkan salinan teks Proklamasi RI 17 Agustus 1945.



Upacara Penyampaian Petisi Penggabungan Wilayah Timor Timur Kepada Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta

Sebagai tindak lanjut dari proses integrasi tersebut dan untuk menjalankan mekanisme pemerintahan di propinsi termuda ini,

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1976. Peraturan ini mengatur status Pemerintah Propinsi Timor Timur menjadi 13 kabupaten dan 62 kecamatan. Selain itu ditetapkan pula wewenang Propinsi Timor Timur sebagai daerah otonom yang berhak mengurus daerahnya sendiri dan kebijaksanaan pembiayaan Pemerintah Daerah didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian, sejak 17 Juli 1976, wilayah Timor Timur secara resmi dan sah telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua urusan Timor Timur sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan masalah dalam negeri pemerintah dan bangsa Indonesia.

Tekad rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Republik Indonesia dikukuhkan lagi pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ketetapan Nomor VI/MPR/ 1978, tanggal 22 Maret 1978.

3. Pembentukan Propinsi ke-27

Usaha awal pemerintah untuk menjalani roda pemerintahan di Timor Timur dilakukan dengan mengadakan aparatur pemerintahan serta penyempurnaan aparatur dan administrasi pemerintahan daerah. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976, Timor Timur berstatus sebagai propinsi/daerah tingkat I, yang dipimpin oleh seorang gubernur/kepala daerah. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1976 yang mengatur kedudukan dan susunan Pemerintahan Daerah Tingkat I Timor Timur. Propinsi ini dibagi atas 13 kabupaten/Daerah Tingkat II dan 62 kecamatan. Setiap kabupaten dipimpin oleh seorang bupati/ kepala daerah. Pada setiap kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan terdiri dari beberapa desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa.

Pada tahap permulaan permasalahan yang dihadapi menyangkut personalia dan fasilitas. Untuk itu diadakan pendidikan, pelatihan dan penataan aparatur pemerintahan yang berlaku di Republik Indonesia dapat diketahui dan dihayati serta dilaksanakan secara efektif di Timor Timur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal

itu dirasa perlu karena sistem pemerintahan kolonial Portugis jauh berbeda dengan sistem pemerintah Republik Indonesia.

Selama proses penyesuaian berlangsung ditempuh beberapa kebijaksanaan melalui penahapan-penahapan pembangunan (rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama penahapan tersebut dititik beratkan pada peletakan dasar-dasar organisasi Pemerintahan Daerah, program pembangunan fisik, pengisian jabatan, dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah.

4. Gubernur Pertama dan Aparat Pemerintahan

Selama proses penyesuaian tersebut telah diambil pula kebijaksanaan memperlakukan tenaga-tenaga pendamping dari pemerintah pusat. Hal ini diperlukan sampai aparat daerah sanggup melaksanakannya sendiri. Arnaldo dos Reis Araujo diangkat menjadi gubernur pertama Timor Timur berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 92/M/1976. Bersamaan dengan itu diangkat pula Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakil gubernur dengan Keputusan Presiden No. 93/M/1976.

Kemudian jabatan gubernur diduduki Guilherme Maria Goncalves berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 164/M/1978. Empat tahun kemudian, yakni sejak 18 September 1982, Ir. Mario Viegas Carrascalao diangkat menjadi Gubernur Timor Timur yang ketiga dan Francisco Xavier Lopes da Cruz diberhentikan dengan hormat sebagai wakil gubernur. Demikian pula untuk setiap kabupaten telah diangkat seorang bupati/kepala daerah tingkat II dan setiap kecamatan diangkat seorang camat.

Kebijaksanaan pola pembentukan desa di propinsi ini dilakukan dengan menetapkan *suco* pada masa Portugis sebagai desa. Pada masa yang lampau terdapat 408 *suco* dan tahun 1980/1981 diadakan studi mengenai struktur dan lembaga-lembaga pemerintahan desa tradisional. Dari hasil studi tersebut ditentukan 442 desa.

Dalam rangka menunjang kelancaran roda pemerintahan di Timor Timur, pada tahun 1987-an terdapat 10.527 pegawai negeri yang bekerja di pelbagai instansi. Khusus bagi putra-putri daerah,

diberikan kemudahan-kemudahan persyaratan untuk diangkat sebagai pegawai negeri, sedangkan kepada para pegawai bekas pemerintah kolonial Portugis diadakan penyesuaian kepangkatan dengan sistem yang berlaku. Pemerintah juga memberikan subsidi kepada para pensiunan bekas pegawai kolonial.



Kantor Gubernur Timor Timur

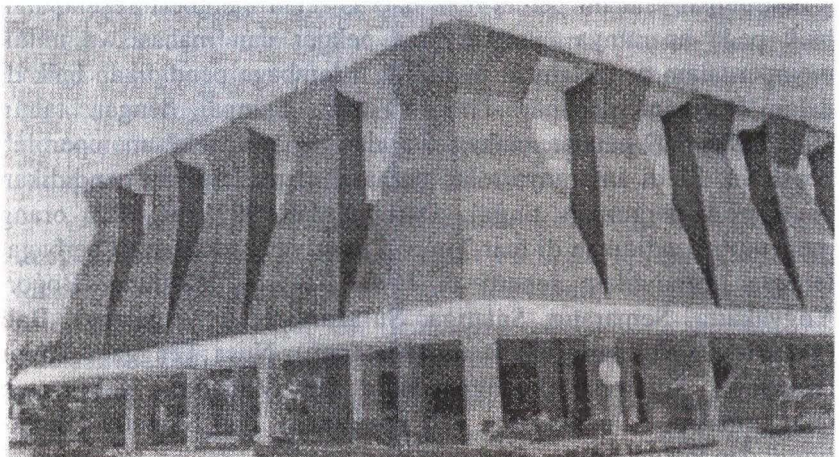
Sampai saat ini pemerintah daerah telah memberi kesempatan baik pada aparatnya maupun para pelajar dan mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan di berbagai lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar Timor Timur. Sampai dengan tahun 1985/1986, 909 pelajar, mahasiswa, dan pegawai telah memperoleh beasiswa; 51 di antaranya telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Dari jumlah 909 itu, 429 orang mengikuti pendidikan di luar Timor Timur yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan seperti di Jawa (Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Salatiga, Surakarta, dan Magelang), Bali (Denpasar), Nusatenggara Barat (Mataram), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Sulawesi (Ujungpandang dan Manado), Kalimantan (Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak), dan Sumatra (Bukittinggi dan Pekanbaru).

Pada tingkat propinsi terdapat beberapa perangkat pemerintah daerah, antara lain Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan beberapa dinas otonom, seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesejahteraan Rakyat. Sebagai perwakilan dari departemen-departemen di pusat (Jakarta), terdapat instansi-instansi vertikal, antara lain Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Penerangan, dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.

Di tingkat kabupaten terdapat Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II, Kantor Agraria, Kantor Sosial Politik, dan sebagainya.

Sejalan dengan konsolidasi aparatur pemerintah daerah, di propinsi ke-27 ini juga dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat, (DPRD) baik ditingkat propinsi (DPRD Tingkat I) maupun di tingkat kabupaten (DPRD Tingkat II).

Pada Pemilihan Umum tahun 1982, besarnya partisipasi masyarakat tercermin dalam masa kampanye. Ribuan rakyat hadir pada setiap kampanye yang dilakukan ketiga peserta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).



Kantor DPRD Tk. I Timor Timur

Pemungutan suara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia tanggal 4 Mei 1982 dan di Timor Timur diikuti oleh 311.375 penduduk yang memiliki hak pilih. Peristiwa ini merupakan pengalaman baru bagi rakyat Timor Timur. Hal semacam ini belum pernah diperoleh di masa pemerintahan kolonial Portugis.

Pada tanggal 26 Juni 1982 dilantik 40 orang anggota DPRD Tingkat I hasil pemilihan umum tanggal 4 Mei 1982. Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia pada bulan Maret 1983 terdapat 8 orang anggota majelis yang berasal Timor Timur.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1982 ini hanya memilih wakil-wakil rakyat untuk tingkat pusat dan propinsi saja. Mereka belum memilih wakil-wakil rakyat untuk kabupaten. Namun pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1987 telah ditetapkan untuk wakil-wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II. Peranan DPRD Tingkat I di Propinsi ini cukup menonjol. Selain ikut memberikan persetujuan kepada gubernur/kepala daerah mengenai Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) juga telah menetapkan beberapa peraturan daerah, seperti peraturan daerah tentang lambang daerah Propinsi Timor Timur (1982), pembentukan dinas-dinas otonom, Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Timor Timur, dan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor.

RANGKUMAN

Proses terjadinya integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh perkembangan politik di dalam negeri Portugal yang berakibat pada perkembangan di dalam daerah Timor Timur pada waktu itu. Ketika itu di negara Portugal telah terjadi apa yang dikenal dengan istilah *Revolucao dos Cravos* (Revolusi Bunga).

Revolusi Bunga yang menyebabkan berkuasanya kelompok militer pimpinan Jenderal Spínola membuka jalan bagi terjadinya perubahan-perubahan politik amat penting di Timor Timur, yaitu

lahirnya partai-partai politik yang dibentuk oleh para pemimpin Timor Timur sendiri; partai-partai politik itu ialah UDT, Apodeti bertujuan mencapai kemerdekaannya dengan berintegrasi ke dalam wilayah Pemerintah Negara Republik Indonesia, sedangkan Fretilin yang berideologi sosialis-Komunis itu bertujuan untuk menjadi "Negara" merdeka yang berdiri sendiri.

Setelah melalui perjuangan yang di dalamnya terdapat juga pelbagai perbedaan dan pertentangan pendapat, akibatnya partai-partai politik itu, *terkecuali* Fretilin, telah menciptakan Proklamasi Balibo pada tanggal 3 November 1975. Inilah yang menjadi kekuatan hukum yang mendorong para pemimpin daerah Timor Timur membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSST) untuk mengatur kehidupan berpemerintahan di daerah ini.

PSST kemudian mengambil langkah untuk merumuskan suatu Petisi yang menuntut segera bergabungnya daerah Timor Timur ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PERTANYAAN

1. Apakah pengaruh Revolusi Bunga di Portugal pada tahun 1974? Terangkan dengan jelas!
2. Apakah akibat Revolusi Bunga itu terhadap perkembangan politik di wilayah Timor Timur pada wilayah itu? Terangkan dengan jelas!
3. Adakah perbedaan-perbedaan tujuan di antara partai-partai politik yang dibentuk oleh pemimpin-pemimpin rakyat Timor Timur? Terangkan dengan jelas!
4. Proklamasi Balibo dicetuskan pada tanggal 3 November 1975. Apakah arti penting proklamasi ini bagi kemerdekaan rakyat Timor Timur dari penjajahan Portugis? Terangkan dengan jelas!
5. Apakah maksud dari Petisi yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat wilayah Timor Timur? Terangkan dengan jelas!

BAB VII

MASA PEMBANGUNAN

Menurut gubernur keempat Timor Timur, Abilio Jose Osorio Soares, pembangunan Timor Timur secara nyata baru dilaksanakan sejak tahun 1976, yakni ketika Timor Timur berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan, hak dan kewajiban rakyat Timor Timur yang merupakan propinsi termuda negara Republik Indonesia, adalah sama dengan propinsi-propinsi yang lain. Bahkan, pada aspek-aspek tertentu, propinsi termuda ini mendapatkan prioritas dan kemudahan-kemudahan, dibanding dengan propinsi-propinsi yang lain, yang lebih dahulu terbentuk sebagai propinsi di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pemberian "kemudahan" itu didasari oleh kenyataan bahwa propinsi ini telah mengalami keterbelakangan yang tidak mudah diatasi sebagai akibat penjajahan Portugis selama ± 450 tahun. Keterbelakangan itu mencakup pada semua aspek kehidupan, antara lain terlihat pada tingginya tingkat jumlah buta huruf (aksara), sistem pertanian yang masih amat sederhana, mobilitas penduduk yang amat rendah, serta letak daerah pemukiman penduduk di daerah-daerah yang masih terpencil.

1. Anggaran Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan, biaya merupakan faktor yang amat menentukan bagi berhasil tidaknya proses tersebut. Sejak awal integrasi Timor Timur ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran pembangunan untuk Propinsi Timor Timur. Anggaran pembangunan yang disediakan pemerintah pusat itu terus menaik jumlahnya pada setiap tahap pembangunan (1976-1988). Hal itu dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tahun	Besarnya dana (dalam ribuan rupiah)
1976-1981	66.963.069
1982-1983	87.344.030
1984-1988	257.822.383

Kalau diperhatikan angka-angka di atas, peningkatan jumlah anggaran pembangunan itu cukup tajam. Dari anggaran tahap pertama (1976-1981) dan tahap ke dua (1982-1983) saja sudah terdapat selisih lebih besar Rp. 20.000.000,00. Perbedaan semakin mencolok jika dibandingkan dengan anggaran tahap kedua dan tahap ketiga (1984-1988). Ini berarti kalau kedua tahun anggaran yang disebut terdahulu, yaitu tahun 1976-1981 dan tahun 1982-1983, jumlah anggarannya digabung menjadi satu, maka jumlah biaya pembangunan untuk tahun anggaran 1984-1988, jauh lebih besar, yaitu menjadi dua kali lipat jumlahnya.

Anggaran pembangunan yang jumlahnya selalu ditingkatkan itu, tidak hanya karena latar belakang politik, tetapi juga karena kondisi objektif dari propinsi ke-27 ini. Yang dimaksud di sini ialah keadaan ekonomi selama penjajahan Portugis yang sangat menyedihkan. Selama penjajahan Portugis itu, keadaan kehidupan rakyat Timor Timur terus mengalami kemerosotan. Untuk meningkatkan kembali taraf hidup rakyat Timor Timur, antara lain melalui peningkatan produksi bahan makanan di daerah ini tentu diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Sehubungan dengan anggaran pembangunan daerah Timor Timur itu, perlu diberikan catatan bahwa peranan anggaran pembangunan daerah masih belum berarti dibandingkan dengan anggaran khusus yang disediakan pemerintah pusat untuk daerah ini. Namun, telah diusahakan langkah-langkah ke arah peningkatan penerimaan daerah, seiring dengan semakin membaiknya keadaan keamanan.

Anggaran pembangunan seperti yang disebutkan di atas digunakan untuk melaksanakan pembangunan melalui tahap-tahap yang telah direncanakan sesuai dengan keadaan propinsi termuda ini. Adapun tahap-tahap itu adalah sebagai berikut.

1. *Tahap Rehabilitasi*, Oktober 1976-Maret 1977, dengan sasaran utama merehabilitasi seluruh prasarana dan sarana umum, seperti rumah sakit, balai pengobatan, sekolah, telekomunikasi, dan perhubungan. Di samping itu, diadakan peningkatan keterampilan para pegawai agar mereka dapat memahami sistem administrasi pemerintah yang berlaku.
2. *Tahap Konsolidasi*, April 1977-Maret 1978, dengan sasaran utama melanjutkan serta meningkatkan langkah-langkah pembangunan sebelumnya sehingga menjangkau penataan dan perbaikan yang lebih luas. Misalnya, pemantapan aparatur pemerintah, peningkatan pengembangan ekonomi rakyat, serta peningkatan pra- sarana dan sarana pendidikan.
3. *Tahap Stabilisasi*, April 1978 – Maret 1982, dengan sasaran utama pemantapan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat pemerintah secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Timor Timur siap menyongsong tahapan pembangunan jangka pendek (1982-1984) serta Rencana Pembangunan Lima Tahun IV (1984-1989) bersama-sama dengan propinsi yang lain di Indonesia. Prioritas pembangunan ditentukan sebagai berikut:

- Pertama : meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan kehutanan;
- Kedua : melakukan perbaikan dan pemeliharaan prasarana perhubungan secara merata dan meluas guna membuka daerah-daerah terisolasi;
- Ketiga : meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- Keempat : meningkatkan pendidikan di dalam dan di luar sekolah untuk memberantas "tiga buta" yaitu buta aksara, buta bahasa, dan buta pengetahuan dasar;

Kelima : meningkatkan sarana dan prasarana fisik pemerintahan serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

a. Pertanian, Perdagangan dan Koperasi

Sejak sebelum penjajahan Portugis, penduduk Timor Timur telah bekerja di bidang pertanian. Walaupun masih dikerjakan secara sederhana, hasil pertanian sangat penting artinya dan karena itu perlu langkah-langkah untuk mengembangkannya.

Menurut hasil sensus Pertanian 1983, sekitar 113 dari 122 rumah tangga terlibat dalam usaha tani tanaman pangan yang sekaligus merupakan sumber pendapatan pokok mereka. Di Kabupaten Bobonaro telah dibangun sistem pengairan persawahan penduduk yang diperkirakan mampu mengairi sekitar 4.000 hektar (ha). Pemerintah juga telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan teknis kepada para petani, menyediakan perlengkapan pertanian, seperti alat-alat untuk pengolahan tanah, bibit, pupuk, dan perlengkapan pemberantasan hama. Di samping itu, para petani juga diberi kredit dengan persyaratan lunak oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program Bimbingan Massal (Bimas).

Program intensifikasi pertanian sudah dilaksanakan sejak tahun 1981, dengan luas areal sekitar 4.000 ha. Lokasi areal intensifikasi pertanian ini tersebar di beberapa kabupaten seperti Bobonaro, Baucau, dan Manatuto.

Di beberapa lokasi seperti di Manatuto, Manufahi, Aileu, Maliana, dan Baucau, dibangun depot demonstrasi plot (demplot) tanaman pangan. Dengan adanya demplot ini diharapkan para petani dapat tertarik untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Sejak Desember 1982, di Maliana telah ditempatkan 50 kepala keluarga petani teladan asal Propinsi Bali yang dimaksudkan untuk dapat memberikan contoh kepada para petani setempat dalam menerapkan

sistem pertanian yang efektif. Selain itu, sejumlah petani asal Timor Timur dikirim ke Yogyakarta (Jawa) untuk menambah pengetahuan di bidang yang sama.



Bendung Ceical hulu Kabupaten Baucau

Produksi pertanian tanaman pangan dari tahun ke tahun terus meningkat. Produksi padi pada tahun 1976 sebanyak 12.432 ton meningkat menjadi 37.882,58 ton pada tahun 1985. Peningkatan itu sejalan dengan perluasan areal persawahan. Pada tahun 1976 luas tanaman padi dari 15.736,71 ha menjadi 21.163,45 ha pada tahun 1985. Produksi jagung pada tahun 1976 dari 12.569,8 ton meningkat menjadi 46.848,25 ton pada tahun 1985. Demikian pula produksi kacang tanah pada tahun 1976 dari 230 ton menjadi 1.409,49 ton pada tahun 1985.

Untuk mendapatkan gambaran tentang produksi tanaman pangan, di bawah ini memberikan tabel sebagai berikut.

PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

	URAIAN	1976	1984	1989
Padi sawah	Luas panen	15.736	20.918,55	22.766,06
	Produksi	12.434	33.843,00	69.492,70
Jagung	Luas panen	45.219	49.673,05	57.008,30
	Produksi	34.888	44.472,00	69.492,34
Ubi Jalar	Luas panen	3.295	3.381,55	3.507,08
	Produksi	4.620	9.093,24	19.100,83
Kacang	Luas panen	12	25,71	184,38
Kedelai	Produksi	27	40,87	158,39
Kacang Tanah	Luas panen	137,6	580,47	795,28
	Produksi	68,5	342,48	681,47
Kacang Hijau	Luas panen	987	1.944,28	2.040,49
	Produksi	442	916,07	1.973,70
Sayur-sayuran	Luas panen	1.255	2.466,53	3.539,65
	Produksi	3.541	5.405,46	9.543,32

Sumber Data: Kanwil Deptan Timor Timur

Selain ditangani oleh pemerintah, usaha rehabilitasi dan pembangunan di sektor pertanian juga dilakukan oleh badan Internasional seperti *Catholic Relief Services* (CRS). Melalui Program Pembangunan Pertanian Timor Timur (*East Timor Agriculture Development Programme* atau ETADEP). CRS melakukan pembukaan kembali areal pertanian penduduk yang terlantar akibat perang saudara yang lalu. Selain itu, juga dibuka areal persawahan baru, sekaligus menyediakan alat-alat produksi pertanian, seperti mesin penebas, pembalik tanah, dan mesin perontok padi.

Pusat kegiatan CRS terletak di Raimate, (perbatasan antara Bobonaro dan Liquica), di sekitar lembah Sungai Lois. CRS juga melakukan program-program pelatihan keterampilan di bidang pertanian termasuk pengetahuan pemasaran hasil-hasil pertanian. Program-program CRS telah berjalan selama 5 tahun.

Produksi tanaman perkebunan terutama kopi pada awal integrasi merosot sekali, karena banyak yang tidak terurus, di samping pohon-pohonnya sudah tua. Pemerintah mengambil langkah untuk merehabilitasi perkebunan kopi rakyat, merawat kembali dan melakukan peremajaan pohon. Sejak tahun 1978, di Lospalos dan Maliana telah dibangun tempat pembibitan tanaman perkebunan kopi, cengkih, dan kelapa.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan produksi tanaman perkebunan, di bawah ini diberikan tabel sebagai berikut.

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERKEBUNAN

	URAIAN	1976	1984	1989
Kopi	Luas panen	44.520	48.648	49.125,50
	Produksi	19.010	8.644,10	9.832,77
Kelapa	Luas panen	47.202	47.889	49.585,77
	Produksi	10.677	171,16	8.706,04
Kemiri	Luas panen	3.470	3.640	5.593,90
	Produksi	560,8	976	705,42
Kayu Manis	Luas panen	2.517	2.363,93	3.890,59
	Produksi	8.569	9.785,5	182,15
Pinang	Luas panen	34.690	25.305	36.362,08
	Produksi	1.370	2.564,90	2.007,75

Sumber Data: Kanwil Deptan Timor Timur

Propinsi Timor Timur sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal peternakan, antara lain di Lautem, Covalima, dan Bobonaro. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah adalah dengan pengadaan bibit ternak unggul, penyiapan padang rumput, dan

peningkatan keterampilan para peternak; program-program pelatihan diadakan secara merata di Timor Timur. Pengadaan bibit sapi dan kerbau didatangkan dari Propinsi Bali dan dari Australia. Kabupaten Bobonaro dijadikan proyek percontohan sub-sektor peternakan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan jenis dan jumlah binatang-binatang ternak, di bawah ini diberikan tabel sebagai berikut.

PERKEMBANGAN POPULASI PETERNAKAN

URAIAN	1976	1984	1989
Sapi	60.527	40.785	63.612
Kerbau	60.011	40.044	43.554
Kuda	43.862	19.673	24.993
Babi	95.497	120.482	256.031
Kambing	83.455	40.482	91.214
Domba	20.126	17.875	31.009
Ayam Buras	535.217	409.485	494.76
Itik	28.243	40.873	60.321
Ayam Ras	10.456	7.168	14.614

Kegiatan di Timor Timur belum banyak menghasilkan, bidang perikanan meskipun potensi laut sangat besar. Di sekeliling Timor Timur, lautnya kaya dengan jenis ikan seperti ikan tongkol, cakalang, bandeng, kakap, belanak, kembung, saung, dan cumi-cumi. Pada tahun 1985 orang Timor Timur yang tercatat hidup dari usaha perikanan adalah 4.664 orang di antaranya sebagai nelayan dan sisanya sebagai petani ikan.

Selain memanfaatkan potensi laut, dibudidayakan juga perikanan darat. Pemerintah melakukan pengembangan pembibitan ikan dengan mendirikan Balai Benih Ikan di Same (Manufahi), yaitu

pembuatan kolam ikan, pembuatan perahu *fibre glass*, rehabilitasi kolam ikan, dan pengadaan ikan mas.

Dalam usaha menciptakan sistem perdagangan yang dinamis, diadakan inventarisasi potensi di setiap kabupaten agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Usaha ini berkaitan erat dengan pendapatan, pemenuhan kebutuhan, dan kesempatan kerja. Menurut sensus tahun 1980, terdapat 109.190 rumah tangga di propinsi ini. 98.166 di antaranya memperoleh sumber pendapatan utama dari produksi pertanian. Selebihnya berpenghasilan lain, seperti perdagangan (866 rumah tangga) dan industri kerajinan.

Dalam usaha mengatur sistem perdagangan, pemerintah melalui Departemen Perdagangan menetapkan peraturan tentang pemberian izin untuk membuka usaha. Setiap lembaga yang bergerak di bidang umum dan jasa harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pemerintah juga memperhatikan peranan pengusaha ekonomi lemah. Kepada mereka diberikan bekal berupa pelatihan keterampilan dan penataran praktis serta konsultasi yang dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, serta instansi lain.

Selama penataran juga diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada pedagang ekonomi lemah, yang dimulai di Dili dan Maliana (Bobonaro). Penyuluhan ini diarahkan pada masalah-masalah yang bersifat praktis dan mudah dimengerti para peserta. Selain usaha-usaha meningkatkan keterampilan pedagang, dibangun pula dasar percontohan di Kabupaten Baucau dan direncanakan akan terus dibangun di daerah-daerah lain.

Untuk mengatasi tingginya harga dan terjaminnya kebutuhan masyarakat, telah dilaksanakan perdagangan perintis oleh Persero Niaga (PT Kerta Niaga) kerja sama antara Departemen Perdagangan dan Departemen Perhubungan. Perdagangan perintis ini mendapatkan fasilitas kapal laut yang khusus membawa barang dari Surabaya dan Ujung Pandang. Keuntungan dari perdagangan perintis ini adalah bahwa harga dapat lebih murah karena ongkos angkut laut mendapat keringanan (subsidi) terhadap barang-barang yang berasal dari produsen atau tangan pertama.



Pasar di Dili

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Timor Timur semakin meningkat. Kebutuhan akan barang-barang tersebut merupakan salah satu indikator bahwa daya beli rakyat di daerah ini semakin meningkat sebagai akibat semakin meningkatnya pendapatan mereka.

Arus kunjungan kapal laut ke pelabuhan Dili setiap tahunnya terus menunjukkan kenaikan. Apabila tahun 1984 berjumlah 166 kapal, pada tahun 1985 meningkat menjadi 269 kapal dengan frekuensi rata-rata per bulannya 22 kapal. Pada tahun 1985 sebanyak 196.221 ton/m³ barang-barang yang diturunkan (dibongkar) dan 10.102 ton/m³ barang-barang yang dimuat, suatu kenaikan masing-masing sebesar 72% dan 14% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil Timor Timur yang diantarpulaukan dan diekspor berjumlah 17 komoditi dan peranannya masih didominasi oleh beberapa komoditi seperti kopi, kopra, kemiri, dan cendana. Peranan ekspor kopi setiap tahun rata-rata mencapai 3.630,26 ton atau 94% total jumlah ekspor. Ekspor terendah sebesar 2.510 ton terjadi pada tahun 1979 dan tertinggi 7.597 ton pada tahun 1980.

Sementara itu impor Timor Timur berupa barang makanan, pakaian jadi, gula pasir, tepung terigu, semen, dan barang-barang elektronik. Pada tahun 1980 jumlah impor sebesar 3.401 ton terus meningkat setiap tahunnya rata-rata 72,48% sehingga pada tahun 1985 mencapai sebesar 36.238 ton.

Untuk mendukung lancarnya roda perekonomian, telah dibuka beberapa bank umum pemerintah dan bank pembangunan seperti Bank Pembangunan Daerah, Kantor Cabang Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sejak Juli 1985, dibuka Cabang Bank Indonesia (BI). Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga telah membuka kantornya di Baucau, dan dalam waktu dekat akan dibuka di tiga kabupaten yang lain. Beberapa tahun yang lalu, juga telah dibuka bank swasta, yaitu Bank Danamon dan Bank Summa.

Peranan koperasi sebagai salah satu unsur penunjang roda perekonomian di Timor Timur dirasakan sangat penting apalagi jika dihubungkan dengan tingkat kehidupan rakyat banyak. Oleh sebab itu, pengenalan koperasi kepada rakyat di daerah ini sudah sejak awal dilakukan, yaitu dengan program-program penyuluhan mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan.

Kegiatan perekonomian itu diarahkan pada (a) perkreditan, (b) peningkatan serta pemasaran produksi rakyat, dan (c) penyaluran bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, terutama 9 bahan pokok seperti, beras, gula, garam, ikan asin, minyak goreng, minyak tanah, tepung terigu, sabun cuci, dan tekstil.

Jumlah koperasi yang telah terbentuk sebanyak 134 buah termasuk 64 Koperasi Unit Desa, 63 Koperasi Pegawai Negeri/ ABRI, dan dua Koperasi Wanita. Pemerintah sangat mendukung kelancaran kegiatan perkoperasian di daerah ini dan kepada setiap Koperasi Unit Desa diberikan sebuah mobil pick-up. Di samping adanya peningkatan jumlah anggota koperasi, simpanan koperasi juga menunjukkan kenaikan.

Sejalan dengan kegiatan perkoperasian di Timor Timur, dilaksanakan juga program penataran/pendidikan mengenai sistem administrasi perkoperasian. Program itu diberikan kepada para pimpinan

pengurus serta kader-kader koperasi dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola pekerjaan masing-masing.

Arah perkembangan perindustrian di Timor Timur pada awalnya dititikberatkan pada usaha pengelolaan hasil-hasil pertanian dan pengembangan barang-barang perhiasan. Di samping itu, sejak tahun 1982, telah mulai dikembangkan juga industri garam rakyat, industri bahan-bahan makanan/minuman, pandai besi dan bahan-bahan bangunan (batu-bata, ubin), dan sebagainya.

Khusus untuk golongan pengusaha ekonomi lemah yang merupakan jumlah terbanyak telah dibentuk Bimbingan Pengembangan Industri Kecil (BIPIK). Melalui program BIPIK, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap 80 peserta yang berasal dari beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aileu, Ainaro, Bobonaro, Liquica, dan Manatuto. Setelah mendapat pendidikan dan pelatihan tersebut, peserta mendapat peralatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Tenaga Kerja

Kondisi masyarakat Timor Timur dikaitkan dengan kebutuhan tenaga-tenaga terampil untuk pembangunan merupakan masalah utama yang harus ditanggulangi.

Berbagai usaha dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di propinsi ini. Usaha itu adalah sebagai berikut.

1. Mengikutsertakan masyarakat (umumnya yang tidak mempunyai keterampilan) dalam proyek-proyek padat karya, seperti pembangunan jalan (desa), pengairan sederhana dan pembangunan saluran air minum. Melalui proyek ini, diusahakan untuk menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin bagi masyarakat yang "sedikit" mempunyai keterampilan. Dengan dibukanya kesempatan-kesempatan tersebut, para penganggur dan petani yang tidak bekerja dimanfaatkan tenaganya dalam proyek-proyek yang banyak menyerap tenaga kerja. Mereka yang terlibat tentu mempunyai penghasilan tambahan dan hal ini tentu membawa pengaruh terhadap keadaan sosial ekonominya. Salah satu usaha untuk mengatasi ketenagakerjaan adalah dengan

mengadakan proyek Padat Karya Gaya Baru (PKGB) yang ditujukan untuk mengatasi masalah kekurangan lapangan kerja. Proyek ini dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang padat penduduknya dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang sering dilanda bencana alam dan kegiatan ekonominya menurun. Proyek padat karya ini, misalnya, dilakukan dalam rangka pembangunan desa Baucau, Lospalos dan pembangunan irigasi sederhana di Kabupaten Lautem.

2. Mengadakan kursus-kursus keterampilan tertentu melalui Proyek Peningkatan Mobile Training Unit. Kursus-kursus keterampilan ini meliputi kursus menyetik, menjahit, tukang kayu, pandai besi, montir radio, tukang batu, dan sebagainya. Lama kursus sekitar 2 sampai 3 bulan. Kepada setiap angkatan yang telah selesai mengikuti kursus keterampilan tertentu diberikan suatu paket peralatan, sesuai dengan jenis keterampilannya. Paket peralatan tersebut merupakan modal awal dan diharapkan bisa membuka usaha tertentu, misalnya membuka bengkel radio, dan menjahit. Selain itu, mereka juga disalurkan untuk bekerja pada kantor yang membutuhkan.

c. *Pembangunan Desa*

Pembangunan desa merupakan salah satu dari enam sektor skala prioritas pembangunan di Timor Timur. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan desa dan hasil lain menuju pertumbuhan ekonomi pedesaan yang cukup tinggi dan stabilitas wilayah yang sehat dan dinamis. Kebijakan pembangunan desa di Propinsi Timor Timur bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk daerah pedesaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut.

1. Memberikan bantuan langsung kepada desa untuk melaksanakan pembangunan desanya masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat desa yang bersangkutan, jenis dan macam proyek direncanakan oleh LKMD.
2. Meningkatkan pembangunan dan pembinaan perencanaan di wilayah kecamatan melalui Unit Kerja Daerah Pembangunan (UDKP).

3. Meningkatkan prakarsa dan peranan swadaya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan melalui LKMD.

Secara umum sasaran pembangunan desa di Propinsi Timor Timur adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan desa swakarya menjadi desa swasembada.

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI TIMOR TIMUR

No.	Kabupaten	Desa Swadaya	Desa Swakarya	Desa Swasembada
		86 - 87	87 - 88	88 - 89
1.	Manatuto	29 - 29	1 - 4	- 1
2.	Baucau	- 49	- 8	- 1
3.	Lautem	- 32	- 1	- 1
4.	Viqueque	- 32	- 1	- 1
5.	Dili	- 6	21 - 8	4 - 19
6.	Liquica	- 21	1 - 1	- 1
7.	Ermera	- 42	6 - 8	- 2
8.	Aileu	31 30	- 1	- -
9.	Manufahi	29 26	- 3	- -
10.	Ainaro	29 19	- 1	- 1
11.	Bobonaro	45 42	6 8	- 1
12.	Covalima	21 20	- 8	- 1
13.	Ambeno	17 13	1 4	- 1

Sumber Data: Dir. Bangdes Propinsi Timor Timur

3. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

Pada masa penjajahan Portugis pendidikan rakyat Timor Timur amat kurang mendapat perhatian. Setelah sekian ratus tahun menjajah Timor Timur, pemerintah kolonial Portugis menyediakan fasilitas pendidikan di Timor Timur baru pada tahun 1950-an. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan itu pun terbatas pada penduduk tertentu, sehingga sangat terbatas sifatnya. Tetapi, setelah Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia, masalah pendidikan ini justru memperoleh perhatian yang sangat besar dari pemerintah.

Selama pelaksanaan pembangunan, hasil yang paling menonjol seperti diakui oleh Gubernur Mario Viegas Carrascalao, ialah di bidang pendidikan. Pertumbuhan pendidikan tingkat dasar (taman kanak-kanak dan sekolah dasar) di Timor Timur secara kuantitatif berkembang pesat. Peningkatan itu juga didorong oleh keinginan belajar yang kuat dari anak-anak di Timor Timur sendiri.



Gedung STM Bekora Dili

Pada tahun 1976, terdapat 47 sekolah dasar (SD) dengan 13.501 murid dan 2 SLTP dengan 315 murid. Sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1982 telah dibangun 984 ruang kelas SD di samping merehabilitasi 342 ruang kelas lama. Persentase anak usia sekolah (7 sampai 12 tahun) yang menempuh pendidikan SD dari 50 persen meningkat menjadi 90 persen.

Masalah utama yang dihadapi di sektor pendidikan pada masa awal adalah pengadaan tenaga guru. Dirasakan perlunya jenis sekolah yang mengajar keterampilan, mengingat anak didik yang berada di daerah-daerah terpencil sulit untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk mengatasi kekurangan guru SD, didirikan lembaga pendidikan guru, yaitu Sekolah Pendidikan Guru

(SPG) Negeri di Kota Dili, SPG Katolik di Dili, SPG Katolik di Maliana, Sekolah Guru Olahraga (SGO) di Baucau.

Di tingkat sekolah menengah tingkat pertama (SMTP), sejumlah sekolah swasta juga dibina, seperti Sekolah Teknik Fatumaca, Baucau. Kalau pada awal hanya ada 2 SMTP dengan 315 murid, pada tahun 1984 meningkat menjadi 35 buah dengan 8.202 murid. Sekolah menengah tingkat atas (SMTA = SMU sekarang) juga terus meningkat perkembangannya baik dari segi penambahan gedung sekolah maupun jumlah muridnya.



Balai Latihan Kerja Siswa

Bertitik tolak dari pelaksanaan pembangunan daerah Timor Timur, masalah penyediaan tenaga kerja yang terampil merupakan hal yang mendesak. Meskipun penyediaan sarana sekolah kejuruan memerlukan biaya mahal, pemerintah berhasil mendirikan sekolah menengah ekonomi atas (SMEA), sekolah teknik menengah (STM), sekolah menengah kesejahteraan keluarga (SMKK), sekolah menengah pekerja sosial (SMPS) yang tersebar di Dili, Oekusi, Manatuto, Aileu, dan Liquica.

TABEL :
JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU SD, SLTP, SLTA
NEGERI DAN SWASTA 1976 – 1986

JENIS SEKOLAH	1976	1977	1978	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84
Jumlah Sekolah								
SD	47	107	202	208	293	339	276	400
SLTP	2	9	9	15	19	23	28	35
SLTA	-	-	-	2	3	4	5	7
Jumlah Murid								
SD	13.501	23.041	41.543	59.072	68.709	77.658	90.437	99.430
SLTP	315	926	1.041	1.248	2.474	3.810	5.622	8.202
SLTA	-	-	-	122	286	572	1.047	1.707
Jumlah Guru								
SD	499	614	959	1.610	1.515	1.821	226	2.646
SLTP	10	17	36	148	191	256	289	415
SLTA	-	-	-	7	7	11	15	40

Sumber: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Timor Timur

Sebelum tahun 1986, para lulusan SLTA yang hendak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi harus dilakukan di luar Propinsi Timor Timur. Sebagian besar putra Timor Timur belajar di berbagai perguruan tinggi dengan mendapat bea siswa dari pemerintah daerah dan banyak yang sudah berhasil terutama di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Kota-kota yang menjadi tempat putra-putra Timor Timur untuk meneruskan pendidikan tingginya, antara lain Kupang, Mataram, Denpasar, Ujung Pandang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bogor, Jakarta, Medan, Banjarmasin, dan Samarinda.

Pada tahun 1986/87 di Timor Timur telah dibuka sebuah perguruan tinggi, yakni Universitas Timor Timur (Untim) dengan tiga fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, dan Fakultas Sosial-Politik. Perguruan tinggi ini masih berstatus swasta dibangun sebagai upaya untuk menunjang pemerintah daerah. Perguruan tinggi telah memberikan kesempatan kepada para lulusan SMTA untuk menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi.



Universitas Timor Timur

Kesempatan ini dirasakan membantu pemerintah daerah yang terbatas kemampuannya dalam memberikan beasiswa bagi lulusan SMTA untuk belajar di daerah lain.

Selain pembangunan di bidang pendidikan formal, kegiatan di bidang pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah tidak kurang mendapatkan perhatian, bahkan kegiatan tersebut dilakukan sampai ke tingkat desa. Secara garis besar kegiatan tersebut meliputi empat macam (a) Kejar pendidikan dasar (Paket A); (b) Kejar; (c) Kejar Keterampilan (kejuruan); (d) Kejar Usaha. Program ini

terutama ditujukan kepada mereka yang tidak sempat memasuki pendidikan pada zaman kolonial Portugis.

Dalam rangka memberikan pengetahuan seluas-luasnya melalui buku-buku bacaan bagi rakyat Timor Timur, sejak tahun 1983, dibuka sebuah Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Dili. Selain memiliki buku, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan unit kendaraan Perpustakaan Keliling. Dengan tersedianya fasilitas perpustakaan mobil (berjalan) ini, pelayanan buku-buku bacaan dapat lebih diperluas.



Gedung Perpustakaan Dili

Pembinaan generasi muda dijalankan melalui kegiatan olahraga, musik dan tari-tarian, organisasi-organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, Pramuka, kegemaran kaum muda. Semuanya itu ditangani cukup seksama. Beberapa nama kaum muda Timor Timur telah tampil pada berbagai kegiatan di tingkat nasional.



Kunjungan Presiden Soeharto di Dili

b. Pelayanan Sosial

Kemiskinan dan keterbelakangan rakyat Timor Timur selama masa penjajahan Portugis mempunyai akibat yang parah terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Jenis penyakit yang diidap oleh rata-rata masyarakat Timor Timur adalah malaria, TBC, influenza, penyakit kulit (SCABIES), diare, anemia, penyakit mata, karries gigi, infeksi kulit dan jaringan di bawah kulit, juga *conjungtivitas*, infeksi akut, saluran pernafasan, frambosia, penyakit gigi, mulut, telinga, sendi otot, gangguan penyakit karena kurang gizi, dan lain-lain.

Langkah pertama yang dilakukan untuk menanggulangi penyakit dan meningkatkan kesehatan rakyat ialah merehabilitasi pusat-pusat kesehatan, membangun rumah sakit umum di Dili, dan memperbaiki pabrik farmasi serta pengadaan alat-alat kesehatan. Selain itu dibangun pula Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas pembantu di seluruh propinsi agar dapat menjangkau rakyat sebanyak-banyaknya. Selama dasawarsa ini sudah banyak dibangun sarana fisik kesehatan di Timor Timur dibandingkan dengan masa sebelumnya.



Prasarana Kesehatan di Dili

Demikian pula jumlah tenaga medis, para medis maupun administrasi selalu diusahakan agar dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya. Namun jumlah tenaga yang tersedia masih kurang memadai bila dibandingkan dengan masalah yang dihadapi. Usaha mendorong agar para dokter bersedia untuk ditempatkan di Timor Timur terus dilakukan.

Selain itu dilakukan pula program perbaikan gizi yang terutama ditujukan kepada bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu yang sedang menyusui. Program ini mendapat bantuan dari Unicef yang meliputi Kecamatan Luro, Iliomar, Ilatorali, Dilor, Natabora, Laclubar, dan Turiskai. Untuk pencegahan gondok endemik, dilakukan penyuntikan Lipiodol kepada penduduk, sedangkan pemberian vitamin A dosis tinggi untuk mencegah penyakit rabun senja.

Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dibangun tempat penyediaan air bersih pedesaan, jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah. Untuk itu dibangun unit perpipaan, sumur artesis, unit perlindungan mata air, unit penampungan air hujan

sumur pompa tangan dangkal, jamban keluarga, unit sumur pompa tangan dalam, unit sumur gali, unit sarana pembuangan air limbah dan unit sarana mandi, serta cuci, dan kakus.

Untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan menurunkan fertilitas, menuju terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), telah dilaksanakan program terpadu yang terdiri dari Program Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA); juga Program Perbaikan Gizi, Program Imunisasi, Program Penanggulangan Diare, dan Program Keluarga Berencana (KB).

Perlu dijelaskan bahwa program KB di Timor Timur bertujuan bukan semata-mata menekan angka kelahiran, melainkan juga menitikberatkan pada usaha peningkatan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengatur jarak kelahiran.

Mengingat pengenalan Program KB Nasional di Propinsi Timor Timur baru dimulai pada Pelita III, dasar pertimbangan dan melaksanakan program ini adalah dengan penyuluhan tentang maksud, tujuan, dan manfaat pelaksanaan program bagi peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan pada umumnya. Dengan merencanakan kelahiran anak secara bertanggung jawab akan lebih mudah tercapai taraf kehidupan keluarga yang lebih bermutu daripada sebelumnya.

Pelaksanaan Program KB diusahakan berjalan secara sukarela dan penuh kesadaran oleh pasangan suami istri yang masih subur. Usaha ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a) Pemberian penyuluhan oleh para motivator/penyuluh, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari unsur masyarakat. Penyuluhan dilakukan secara massal, secara kelompok, atau secara tatap muka, tergantung pada situasi yang dihadapi di lapangan. Penyuluhan tatap muka dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah, dialog bebas antara petugas penyuluhan dengan para calon akseptor. Apabila diingat, bahwa para penyuluh itu adalah penduduk setempat, mudah dipahami betapa akrabnya suasana yang timbul dalam proses penyuluhan tersebut.

- b) Bila penyuluhan itu mengakibatkan para calon akseptor bersedia untuk menjadi peserta KB, kemudian mereka diajak untuk datang ke Puskesmas terdekat guna mendapat pelayanan selanjutnya.



Puskesmas Comoro di Kecamatan Dili Barat

Apabila para calon belum bersedia menjadi peserta KB, para penyuluhan tidak dapat berbuat sesuatu, selain meninggalkan pesan agar direnungkan kembali secara matang mengenai masalah yang pernah mereka perbincangkan. Sering terjadi, setelah lewat beberapa waktu, sang calon tadi ternyata mengambil keputusan untuk mencoba menjadi peserta KB. Andaikata calon tetap tidak menjadi peserta KB, tidak ada satu pun hukuman yang dapat dijatuhkan kepadanya. Memang tidak ada hukuman untuk hal seperti itu.

Meskipun di bidang kesehatan kemajuan telah banyak dicapai, masih terdapat beberapa hambatan:

1. keterbatasan tenaga medis dan paramedis;
2. fasilitas seperti alat transportasi, komunikasi yang belum memadai, lebih-lebih mengingat kondisi lingkungan alam yang kurang menguntungkan;

3. tingkat pendidikan masyarakat yang masih sederhana sehingga sering sekali rakyat lebih percaya kepada dukun dari dokter atau tenaga medis.

Mengingat hambatan-hambatan yang dihadapi, selanjutnya disusun rencana untuk meningkatkan jumlah tenaga medis dan paramedis serta sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan keterampilan/pengetahuan petugas kesehatan, meningkatkan pemberantasan penyakit menular, dan meningkatkan kesehatan lingkungan.

Sisa-sisa pergolakan sosial politik yang lalu sampai dengan beberapa tahun belakangan ini masih terasa akibatnya. Kenyataan ini dapat diketahui dari besarnya orang-orang yang kehilangan suami/istri, anak-anak yang kehilangan orang tua, penderita cacat tubuh, dan sebagainya.

Sejalan dengan pemberian amnesti Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus 1977, serta tertembaknya seorang yang menamakan dirinya "Presiden Fretilin", Nicolau Lobato, Januari 1979, lebih dari 20.000 penduduk – termasuk pengikut Fretilin – keluar dari hutan untuk menerima pengampunan tersebut dengan fisik yang sangat menyedihkan. Usaha-usaha untuk menanggulangi masalah ini dilakukan dengan membangun barak-barak penampungan sementara, pengadaan sandang dan pangan serta penyediaan obat-obatan. Selanjutnya, mereka dimukimkan ke beberapa lokasi yang baru dibangun dalam bentuk lingkaran pondok sosial (Liposos) agar mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Setiap Liposos dilengkapi dengan alat-alat pertanian beserta pengadaan bibit, dan alat-alat pertukangan. Di samping itu, setiap Liposos dilengkapi dengan sarana peribadatan, balai pengobatan, air bersih, dan sekolah dasar. Lokasi Liposos terdapat di beberapa kabupaten, yaitu Dili, Liquica, Manatuto, Ermera, dan Baucau. Pemerintah melalui Departemen Sosial, telah melakukan beberapa program untuk menanggulangi atau paling tidak meringankan penderitaan mereka.

Program Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Masyarakat ditujukan untuk menimbulkan kesadaran, kemauan masyarakat dalam menangani permasalahan sosialnya, baik secara pribadi maupun

secara kelompok. Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan kegairahan bekerja secara gotong-royong, timbul rasa kebersamaan, disiplin dan tanggung jawab sosial menuju tercapainya swadaya, swakarya, dan swasembada masyarakat.

Kemudian merehabilitasi dan memberi pelayanan dengan sistem nonpanti kepada penyandang cacat dan penyantunan di dalam panti. Mereka yang disantun dikirim ke panti-panti Latihan Penderita Cacat Tubuh seperti Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh (LPRPCT) "*Prof. Dr. Soeharso*" di Surakarta dan Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (PRPCT) di Ujung Pandang. Kepada mereka diberikan juga pelayanan medis, yaitu perbaikan dan pemasangan protese. Dengan adanya pemasangan protese ini, para penyandang cacat tersebut dapat berusaha untuk membiayai hidupnya, seperti membuka usaha jahit-menjahit, usaha sol sepatu dan sebagainya.

Penyantunan dan pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan melalui panti dan nonpanti dengan tujuan menumbuhkan rasa percaya diri sendiri sehingga lambat laun mereka dapat mandiri. Penyantunan dan pemeliharaan bagi anak terlantar melalui panti dilaksanakan sejak tahun 1981, seperti di Panti Penyantunan Anak Bambu Apus, Jakarta dan di "*Sasana Serba Guna*" Bemori, Dili. Kepada mereka diberikan latihan keterampilan, antara lain keterampilan pertukangan kayu, pertukangan batu, montir radio, mobil, motor, elektronika, las, jahit-menjahit, pertanian, dan peternakan. Dari hasil pelaksanaan penyantunan tersebut sebagian dari mereka telah mampu mandiri, berwiraswasta, menjadi karyawan perusahaan, pegawai negeri, dan lain-lain.

Penyantunan dan pemeliharaan bagi fakir miskin seperti di Kabupaten Ermera dan Baucau dengan memberikan pelatihan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, pertukangan kayu dan batu, serta bidang perkiosan. Pada umumnya para keluarga tersebut telah mampu mandiri dan memperoleh keterampilan.

Kepada mereka diberikan pula modal kerja kelompok dan perseorangan seperti peralatan tukang kayu, peralatan tukang batu, peralatan/paket ternak, serta perkiosan.

Propinsi Timor Timur terdiri dari ratusan desa yang tersebar di 62 kecamatan. Sudah sejak masa penjajahan Portugis, banyak penduduk yang bermukim di daerah-daerah pegunungan dan kurang memenuhi syarat sebagai tempat tinggal. Pemukiman penduduk tidak terarah sehingga sangat sulit untuk menyusun pola pembinaan dan peningkatan kesejahteraannya.



Perumahan Perumnas

Untuk mengubah keadaan tersebut, pemerintah mengadakan penataan kembali sistem pemukiman secara perlahan-lahan guna menghilangkan kebiasaan hidup di daerah pegunungan dengan sistem perladangan. Penataan pemukiman penduduk ini erat hubungannya dengan program peningkatan produksi pangan, seperti menyangkut faktor-faktor produksi, distribusi, dan pemasaran hasilnya.

Selain itu, penataan pemukiman ini juga sejalan dengan program mempersatukan kembali anggota keluarga yang selama masa pergolakan banyak bercerai-berai. Selama itu banyak harta benda penduduk bahkan rumah mereka yang musnah. Dengan

mendapatkan ancaman-ancaman, banyak penduduk yang mengungsi dengan meninggalkan ladang, rumah, dan harta bendanya. Bahkan, banyak di antara keluarga batih (ayah, ibu dan anak) yang terpisah-pisah hidupnya.

Kepada penduduk yang menetap di daerah perkotaan juga dibangun perumahan yang harganya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Pada akhir bulan Agustus 1982, di Dili diresmikan pemakaian sejumlah rumah sederhana. Pembangunan rumah sederhana ini diperuntukkan bagi masyarakat umum terutama yang berpenghasilan sedang dan rendah. Pembayaran untuk memiliki rumah tersebut dilakukan dengan angsuran yang ringan dan berjangka waktu antara 5 sampai dengan 20 tahun.

Sementara itu pembangunan rumah sederhana dan rumah inti dilaksanakan di Dili, bersama dengan pemugaran pemukiman di 80 desa. Sejalan dengan pembangunan perumahan tersebut, diperbaiki pula instalasi dan pipa air bersih serta perluasan air limbah di Dili, Baucau, dan Maliana. Di beberapa kota lain seperti di Viqueque dan Aileu usaha peningkatan penyediaan air bersih juga dilakukan.

Seiring dengan pesatnya pelayanan kepada masyarakat, pembangunan di bidang kelistrikan juga menunjukkan peningkatan. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang dibangun selama masa pembangunan telah menerangi berbagai kabupaten dan kecamatan seperti: Kabupaten Liquica (20 Juni 1983); Kecamatan Maubara (15 Juni 1983); Kabupaten Ermera/Gleno (1 Oktober 1983); Kabupaten Covalima/Suai (2 Oktober 1983); Kabupaten Manatuto (5 Agustus 1983); Kabupaten Aileu (20 Agustus 1983); Kabupaten Bobonaro/Maliana (19 Maret 1984); Kabupaten Ambeno/Oecusi (15 April 1984); Kabupaten Baucau (29 Februari 1984); Kabupaten Manufahi/Same (8 September 1984); Kabupaten Ainaro (30 Agustus 1984); Kabupaten Lautem (1 Agustus 1984); Kabupaten Viqueque (7 Agustus 1984); Kecamatan Railako (7 Juli 1985); Kecamatan Hera (2 Agustus 1985); Kecamatan Metinaro (1 Agustus 1985); Kecamatan Maubisse (17 Agustus 1985); Kecamatan Ossu (11 September 1985); dan Kecamatan Balibo (4 Januari 1986). Sedang

Kecamatan Vemasse, Venilale, Laga, Uatolari, Bobonaro, dan Atsabe menyusul kemudian.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk membina pemukiman adalah dengan menyelenggarakan program transmigrasi dengan mendatangkan petani teladan dari daerah lain, khususnya dari Pulau Jawa dan Bali. Program tersebut diarahkan pada daerah-daerah dengan ketentuan dalam jangka waktu 15 tahun berkepadatan maksimal 50 jiwa per km². Daerah yang potensial untuk pertanian dengan areal yang luas serta mampu mendukung pola pemukiman serta daerah yang termasuk dalam kawasan pengembangan wilayah dalam rangka menunjang program pembangunan lintas sektoral.

Khusus untuk propinsi ini pola pemukiman transmigrasi yang diberlakukan adalah pola 50% : 50%, yaitu 50% pemukiman berasal dari daerah pengirim dan 50% yang lain berasal dari penduduk setempat. Pola pemukiman 50% : 50% tersebut dilakukan, antara lain dengan tujuan menata kembali pemukiman penduduk setempat menjadi pemukiman yang memungkinkan berkembang lebih baik, serta membentuk pemukiman baru dengan penggabungan dan keterampilan serta adaptasi kebudayaan.

c. *Kehidupan Beragama*

Sejak bersatunya wilayah Timor Timur ke dalam Republik Indonesia, kegiatan pembinaan kehidupan beragama di Timor Timur terus ditingkatkan. Untuk itu pada tahap permulaan direhabilitasikan sejumlah tempat peribadatan (gereja) Katolik, yang selama masa pergolakan banyak mengalami kerusakan. Selanjutnya, dilaksanakan pembangunan-pembangunan tempat peribadatan, baik untuk pemeluk Katolik maupun untuk pemeluk Protestan, Islam, dan Hindu.

Pemerintah juga memberikan tunjangan kepada rohaniawan dan rohaniawati. Sejalan dengan itu disebarakan ribuan Kitab Suci, seperti Injil untuk umat Katolik dan Protestan, serta Al-Qur'an untuk umat Islam. Tentu saja penyebaran kitab suci itu dengan sangat memperhatikan keadaan Propinsi Timor Timur yang mayoritas penduduknya memeluk agama Katolik.



Suasana arak-arakan Bunda Maria



Uskup Belo

Pembinaan keagamaan selain dilakukan melalui media massa seperti melalui siaran radio dan penyebaran brosur-brosur juga dilakukan melalui jalur pendidikan; mulai dari tingkat SD sampai SMTA, yang masing-masing memiliki kurikulum pelajaran agama. Kepada mereka yang tertarik untuk memperdalam studi bidang keagamaan

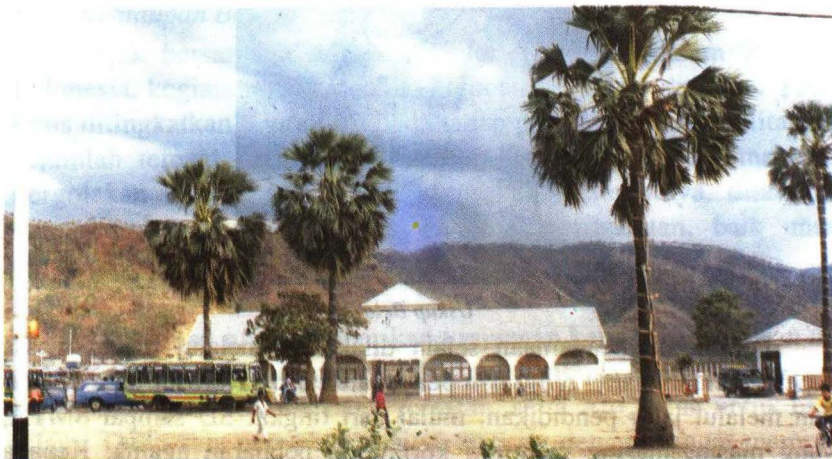
(Katolik) diberi beasiswa serta dikirim ke Seminari Menengah Todabelu – Bajawa dan Seminari Tinggi Ledalero Maumere (Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur), Malang (Jawa Timur), dan Yogyakarta.

Dalam tahun 1985 umat beragama di Timor Timur terdiri dari 474.135 Katolik, 21.443 Protestan, 11.883 Islam, 3.372 Hindu, 14.258 Buddha dan 86.553 menganut kepercayaan lokal, yaitu *animisme*.

4. Perhubungan

a. Transportasi

Keadaan lingkungan Timor Timur yang sebagian besar terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi menjadikan masalah perhubungan harus mendapat perhatian serta penanganan khusus. Hal ini dimaksudkan agar daerah-daerah yang selama ini terisolasi akibat terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan menjadi terbuka dan mudah untuk dikembangkan. Di samping itu segala usaha pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan. Lancarnya sarana perhubungan di Timor Timur berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan di sektor ini merupakan kunci keberhasilan pembangunan di sektor-sektor lain.



Terminal Bus Comoro

1) *Perhubungan Darat*

Sejak awal telah diusahakan membuka jaringan perhubungan darat sampai ke seluruh pelosok Timor Timur. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan merehabilitasi ratusan kilo meter jalan-jalan lama yang rusak akibat erosi, dan sebagainya. Kemudian secara bertahap dibangun ratusan kilo meter jalan-jalan beraspal. Jaringan perhubungan ini telah menghubungkan Dili sebagai ibukota propinsi dengan ibukota-ibukota yang lain. Misalnya, Maliana di sebelah barat sampai ke Lospalos di sebelah timur dan menghubungkan ibukota kabupaten dengan kota-kota di sekitarnya. Walaupun kondisi permukaan jalan tersebut sebagian besar terdiri dari tanah dan kerikil, dibandingkan dengan masa sebelumnya, keadaannya sudah jauh lebih memadai. Bersamaan dengan pembangunan jalan tersebut juga dibangun jembatan. Keadaan seperti ini tentu sangat mempengaruhi arus perekonomian di Timor Timur, misalnya laju pemasaran hasil pertanian dan meningkatnya mobilitas penduduk.



Lalu lintas di Dili

Bertambahnya jaringan transportasi darat diikuti pula dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Sejalan dengan itu bertambahnya prasarana dan sarana perhubungan darat diikuti pula dengan bertambahnya pelayanan angkutan umum. Perusahaan

Negara (PN) Damri, perusahaan milik negara telah mengoperasikan puluhan bus sebagai alat transportasi umum. Sejumlah armada PN Damri secara rutin telah melayani trayek dalam kota Dili, antarkota atau antarpropinsi. Trayek dalam kota Dili mencakup Mercado-Becora pulang pergi (pp): Mercado-Comoro pp. Mercado-Taibesi. Trayek antarkota meliputi Dili-Baucau-Viqueque-Lospalos pp: Dili-Aileu-Mandesse-Same-Aimaro pp. Dili-Liquica-Maubara pp. Dili-Ermera-Maliana pp. Trayek antarpropinsi telah menghubungkan Dili-Kupang (Propinsi Nusa Tenggara Timur) lewat Maliana dan Atambua. Selain PN Damri, beberapa perusahaan swasta telah mengoperasikan juga bus-busnya sebagai alat transportasi umum ke seluruh pelosok Timor Timur.

Khususnya di kabupaten dan kota administratif Dili, mengingat kedudukannya sebagai pusat pemerintahan dan pintu gerbang kegiatan perekonomian ke kabupaten-kabupaten lain, baik sarana maupun prasarana transportasi dan komunikasi relatif baik. Permukaan jalan sudah beraspal baik dalam kota Dili maupun sampai ke ibukota-ibukota kecamatan. Untuk dalam kota tersedia angkutan penumpang berupa taksi dan bus angkutan pedesaan berupa pick-up dan untuk luar kota tersedia pula mobil angkutan barang dan bus penumpang antarkota.

2) *Perhubungan Udara*

Perhubungan udara merupakan sarana perhubungan yang paling efektif dan berperan di Timor Timur baik secara lokal maupun antarpulau propinsi. Pelabuhan udara "Comoro" telah selesai dibangun pada tahun 1981, terletak 7 km dari Dili. Pelabuhan udara ini merupakan pintu gerbang udara Timor Timur yang setiap hari melayani trayek Jakarta-Denpasar-Kupang-Dili pp dan Surabaya-Denpasar-Kupang-Dili pp.

Pada masa sebelumnya lapangan terbang yang terdapat di tengah-tengah kota Dili dengan panjang landasan hanya 790 meter hanya dapat didarati pesawat-pesawat kecil jenis Dove dan DC3.



Bandara Comoro

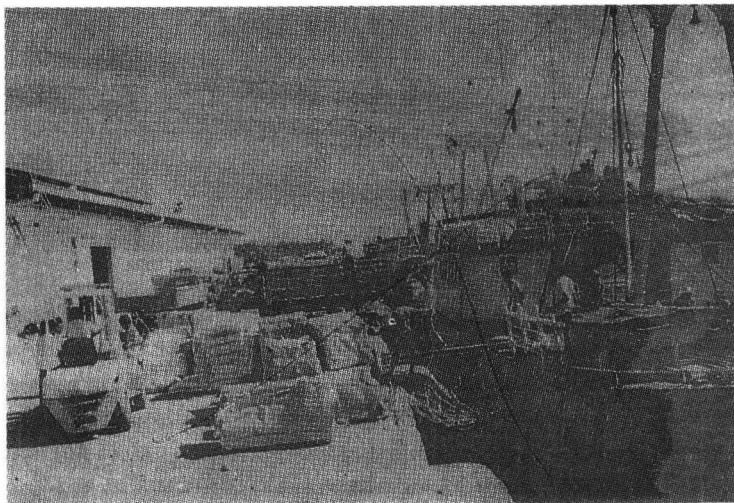
3) *Perhubungan Laut*

Pengembangan di sub sektor perhubungan laut juga tidak lepas dari perhatian. Pelabuhan Dili merupakan pelabuhan terbesar di daerah ini selain berfungsi sebagai pelabuhan antar pulau/propinsi, juga merupakan pintu perdagangan ke luar negeri. Dengan panjang dermaga 180 m dan kedalaman 9 m, pelabuhan ini mampu dirapati kapal berbobot 5.000 ton. Pelabuhan ini telah direhabilitasi, yaitu penambahan fasilitas untuk memperlancar arus bongkar muat barang.

Selain itu, pelabuhan laut Dili disinggahi oleh kapal penumpang mewah KM, "Kelimutu" yang dibangun di Jerman Barat berkapasitas 920 penumpang dan secara rutin akan melayari trayek Dili dengan kota-kota di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa. Dengan adanya pelayaran ini, maka hubungan Timor Timur dengan propinsi-propinsi lain semakin meningkat.

Selain pelabuhan Dili masih terdapat pelabuhan lokal yang menghubungkan beberapa tempat di Timor Timur, seperti Pante

Makassar (Ambeno), Maubara dan Liquica, Manatuto, Laga dan Baucau, Con dan Jeca (Lautem) di pantai utara serta Aleambata dan Be Assu (Viqueque), Betano (Same) dan Suai di pantai selatan.



Pelabuhan Con Lautem

b. Penerangan

Pada awal masuknya Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia timbul masalah baru bagi sistem penerangan di propinsi ini. Masalah ini erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, yang disebabkan beberapa faktor.

- a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang merupakan alat komunikasi seluruh rakyat, belum banyak dikuasai masyarakat Timor Timur, terutama yang tinggal di pedesaan. Menurut sensus 1980, 66,7% penduduk Timor Timur hanya dapat berbahasa daerah dan 76,6% buta huruf. Selama itu mereka hanya mempergunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa Portugis dalam upacara-upacara resmi di kantor-kantor dan di sekolah-sekolah.

- b. Keadaan lingkungan alam dan sarana perhubungan daerah ini sangat membatasi kegiatan operasional penerangan.
- c. Tingkat sosial ekonomi (termasuk pendidikan dan pengetahuan) masyarakat umumnya sangat "rendah"!

Semua faktor ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam kebijaksanaan penerangan untuk mendorong masyarakat agar sebagai warga negara turut membangun daerahnya dalam kaitan dengan pembangunan nasional.

Dengan kondisi sosial masyarakat Timor Timur yang demikian pemerintah berusaha agar peranan penerangan dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Pelaksanaan operasional penerangan pada prinsipnya dilaksanakan dengan (a) penerangan tatap muka, (b) pameran, (c) pertunjukan film dan pertunjukan rakyat, (d) penerbitan (media cetak). Seluruh kegiatan penerangan tersebut mengandung unsur-unsur yang berhubungan dengan kesadaran dan tanggung jawab bernegara, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan sebagainya.

Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI), yang dibangun di Dili tahun 1981, mempunyai daya pancar 1 Kwh. Setiap hari RRI di Dili mengudara 24 jam menjangkau seluruh wilayah Timor Timur. Melalui RRI, disiarkan berita-berita yang dapat memperluas wawasan pengetahuan masyarakat, misalnya program-program pemerintah untuk membangun Timor Timur, siaran keagamaan, siaran pedesaan, siaran untuk wanita, mengenai daerah-daerah di Indonesia, ilmu pengetahuan, dan juga siaran-siaran hiburan berupa nyanyian daerah. Sebagian besar siaran-siaran tersebut menggunakan bahasa Indonesia, pada jam-jam tertentu juga dipergunakan bahasa daerah Tetun.

Agar pelayanan penerangan ini dapat benar-benar dimanfaatkan rakyat banyak, telah disebarkan sarana-sarana yang berkaitan dengan pelayanan tersebut. Radio *cassette* dibagikan kepada para kepala sekolah, kepala dan sekretaris desa di seluruh Timor Timur.

Siaran Televisi Republik Indonesi (TVRI) dari Jakarta mulai diterima pada tanggal 16 Juli 1978, yaitu setelah diresmikannya Stasiun Relay TVRI di Marabia, Dili. Kemudian dibangun Stasiun Relay Maliana, Baucau, Lospalos, Suai, Viqueque, dan Ambeno.

Berkaitan dengan pembangunan-pembangunan Stasiun Relay tersebut disebarkan pula televisi umum. Dengan tersedianya fasilitas seperti ini, melalui stasiun televisi Jakarta, masyarakat Timor Timur dapat mengetahui sekaligus mengikuti perkembangan yang tidak hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa nasional, tetapi juga pada peristiwa-peristiwa internasional. Melalui media elektronika ini dibuka tabir keterasingan mereka mengenai informasi.

Pelayanan penerangan melalui media cetak juga banyak mendapat perhatian pemerintah, yaitu dengan menerbitkan sejumlah brosur, buletin, dan surat kabar. Sehubungan dengan itu, Kantor Wilayah Departemen Penerangan telah menerbitkan buletin yaitu *buletin Penerangan*; juga diterbitkan berkala bulanan *Varia Berita Daerah*. Demikian pula beberapa Daerah Kabupaten tertentu telah menerbitkan media cetak yang sederhana; misalnya Kandep Penerangan Kabupaten Baucau menerbitkan *Nabilan*; juga Kandep Penerangan Kabupaten Babonaro menerbitkan "Bulanan Umum" *Babonaro Membangun* dan Kandep Penerangan Kabupaten Dili menerbitkan bulanan *Ahi Knulu*.

Untuk memberikan penerangan kepada wanita-wanita di pedesaan juga diterbitkan buletin *Penerangan Wanita Pedesaan*.

Semua penerbitan yang disebutkan di atas memang penerbitannya sangat sederhana artinya pencetakannya dengan mesin stensil dan kertasnya kertas stensil buram. Huruf-hurufnya tidak terlalu jelas. Meskipun demikian, tampaknya cukup punya arti untuk menyebarkan berita-berita pembangunan, sebagaimana memang dituju untuk penerbitannya. Dengan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, sarana penerangan melalui media cetak ini akan semakin berperan, terutama pada generasi muda yang duduk di bangku sekolah. Melalui mereka berita-berita dapat disalurkan kepada orang-orang tuanya yang masih buta huruf.

Sejak tahun 1982/1983 mulai terbit sebuah surat kabar mingguan "*Dili Pos*" yang juga terpilih sebagai penerbitan pelaksanaan koran masuk desa (KMD) Propinsi Timor Timur. Karena mengalami berbagai kesulitan teknis surat kabar ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 1985 telah dibentuk Yayasan "TATOLI NARIMAN" dengan tujuan menerbitkan sebuah koran baru "*Suara Timor Timur*".

Untuk lebih meningkatkan pelayanan penerangan, terutama di daerah, dibangun Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas), masing-masing di Dili, Baucau, Ainaro, Maliana, Pante Makassar (Ambeno), Liquica, Gleno (Ermera), dan Suai. Selanjutnya, secara bertahap direncanakan setiap kabupaten akan memiliki Puspenmas.

c. *Pos dan Telekomunikasi*

Setelah integrasi 1975, pemerintah Republik Indonesia, segera merehabilitasi semua bidang aparatur pemerintahan, termasuk rehabilitasi bidang pos dan telekomunikasi (postel) Propinsi Timor Timur.

Untuk tujuan itu pemerintah pusat membentuk tim kerja yang mempunyai tugas pokok menyusun program rehabilitasi dan normalisasi di semua bidang perhubungan. Dalam melaksanakan program-program tim kerja membentuk tim pendamping yang akan mendampingi para pejabat/petugas putra daerah Timor Timur dalam melaksanakan tugas.

Sewaktu zaman penjajahan Portugis, organisasi Postel di Timor Timur mirip dengan organisasi PTT Pemerintah Republik Indonesia dahulu, dengan singkatan CTT (*Correios, Telegrafos, Telefones*), sehingga untuk penyusunan kembali organisasi Postel tidaklah banyak dijumpai kesulitan. Patut dicatat bahwa Kantor Pos di Dili semasa jajahan Portugis tidak mengadakan antaran pos. Mereka yang berkepentingan dipersilakan berlangganan kotak pos yang pada waktu itu berjumlah 500 buah. Kenyataan itu menunjukkan bahwa sebagai bekas daerah jajahan, Timor Timur sangat terbelakang. Agar

dapat mengikuti irama pembangunan dalam REPELITA, khususnya Repelita III untuk masa tahun 1979-1984, program pembangunan diatur dalam tiga tahap yaitu tahap rehabilitasi (1976-1977), tahap konsolidasi (1977-1978), dan tahap stabilisasi (1978-1979) kemudian bersama-sama dengan propinsi-propinsi lain masuk dalam Pelita III (1979-1984) dan seterusnya.

Setelah singgah di Kupang semalam, rombongan tim kerja termasuk bidang Postel, tiba di Dili pada 1 Nopember 1976. Rombongan tim pendamping diberangkatkan secara berangsur-angsur sehubungan dengan terbatasnya transportasi dan akomodasi. Tim pendamping Postel baru lengkap sampai di Dili pada pertengahan bulan November 1976. Jumlah anggota tim pendamping dari setiap direktorat jenderal dalam lingkungan Departemen Perhubungan yang akan bertugas pada tahap pertama selama 3 bulan di Timor Timur ialah sebagai berikut.

Dirjen Perhubungan Darat	:	2 orang
Dirjen Perhubungan Laut	:	10 orang
Dirjen Perhubungan Udara	:	5 orang
Dirjen Pos dan Telekomunikasi	:	20 orang
Pusat Meteorologi & Geofisika	:	3 orang

Selaku koordinator tim pendamping tersebut ialah R. Soetedjo Bc.A.P. dari Ditjen Postel.

Untuk menunjang pekerjaan tim kerja/tim pendamping, berbagai peralatan baik peralatan Pos (stempel pos, kantong pos tromol/peti pos, dan sebagainya) maupun peralatan komunikasi pelancar/penerima, perangkat telegraf, antena, diesel agregaat, dan sebagainya telah dikirim terlebih dahulu ke Dili dengan kapal laut. Untuk tahap pertama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Timor Timur No. 34/tahun 1976 tanggal 10 November 1976, ditetapkan pembukaan kantor pos di Dili dan Pante-Makassar

(Oekussi). Peresmian Pembukaan kembali kantor pos di Dili dilaksanakan pada tanggal 12 November 1976, dihadiri oleh Panglima Komando Daerah Pertahanan Keamanan (Kodahankam) Timor Timur Brigjen Dading Kalbuadi, Gubernur Propinsi Timor Timur, Arnaldo Dos Reis Araujo, serta pejabat-pejabat sipil lain. Pembukaan bidang telekomunikasi terpaksa tidak dapat dilakukan pada saat yang sama karena pemasangan pesawat penerima/pemancar, antena, dan sebagainya memerlukan waktu cukup lama. Percobaan-percobaan perhubungan radio telefoni/telegrafi antara Dili-Kupang dan Dili-Jakarta dengan giat dilakukan oleh Tim Pendamping Telekomunikasi dibantu oleh petugas-petugas putra daerah. Sejak awal Maret 1977 fasilitas telekomunikasi untuk sementara waktu baru dapat digunakan khusus oleh instansi pemerintah.



Jembatan Bekaren Kabupaten Viqueque

Jaringan telepon lokal pun mengalami banyak kerusakan yang perlu direhabilitasi, sedangkan Sentral Telepon Otomat Dili dengan type Pentaconta-32 juga mengalami banyak kerusakan. Untuk diketahui, type Pentaconta-32 tidak dipergunakan di daerah Indonesia lain sehingga sangat sulit untuk mendapat suku cadang-

nya. Adapun data Sentral Telepon Otomat (STO) tersebut ialah Kapasitas 800 LU sistem Crossbar, buatan BTM/Belgia dan dioperasikan sejak bulan Maret 1971. Kalaupun benar kapasitasnya 800 LU, pada akhir zaman penjajahan Portugis hanya terpakai 670 LU. Lokasi instalasi Telekomunikasi di Dili ada di dua tempat, yaitu Sentral Telepon Otomat di Kantor Gubernur Timor Timur dan Stasiun Radio Pemancar di Kampung Alor. Stasiun Radio Pemancar tersebut adalah milik swasta CPRM (Companhia Portuguesa Radio Marconi) yang semasa zaman penjajahan Portugis dapat mengadakan perhubungan khusus dengan luar Timor Timur seperti dengan Lisbon, Macao, Sydney, Bandung, dan daerah jajahan Portugis di Afrika (Angola dan Mozambique).

Pada bulan-bulan pertama sesudah integrasi pekerjaan dinas Pos, dimulai dengan membuka kembali loket penjualan benda-pos/materai dan dinas surat-surat biasa ke dalam dan luar negeri. Karena pada umumnya penduduk Timor Timur belum dapat berbahasa Indonesia, surat-surat untuk luar negeri masih terbatas dalam bentuk terbuka berupa kartu pos ataupun kartu pos bergambar. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan. Bahasa daerah yang banyak dikenal ialah bahasa Tetun, sedangkan penduduk kota banyak yang dapat berbahasa Portugis. Angkutan pos diikutkan pada pesawat-pesawat terbang AURI (Fokker-27 atau Hercules) ataupun dengan kapal Laut Kolinlamil (Komando Lintas Laut Militer) dan untuk daerah pedalaman bekerja sama dengan pos militer.

Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para penguasa daerah, sebagai Kepala Kantor Pos diangkat Salvador Vieira Gomes Rebeiro dan sebagai Kepala Telekomunikasi ditetapkan Arnaldo Ribeiro Moniz, keduanya putra daerah dari Apodeti, yaitu partai rakyat Timor Timur yang gigih memperjuangkan integrasi dengan Negara Republik Indonesia. Perlu dicatat di sini kedudukan Postel secara administratif di bawah gubernur, sedangkan anggarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan termasuk dalam Anggaran Daerah Propinsi Timor Timur. Dengan demikian status pegawai Postel masih merupakan pegawai Propinsi Timor Timur, lengkap dengan penetapan pangkat, gaji, dan

sebagainya. Pada tahun 1980, baik dinas Pos maupun dinas telekomunikasi secara menyeluruh diserahkan kepada masing-masing Perum, ialah Perum Pos dan Giro dan Perum Telekomunikasi yang berpusat di Bandung. Pelaksanaannya tidak akan mengalami kesulitan karena dari semula telah diarahkan sesuai dengan peraturan-peraturan serta cara kerja yang berlaku pada kedua Perum tersebut. Hambatan dalam normalisasi Postel Timor Timur ialah dalam hal penggunaan bahasa Indonesia. Kendala bahasa mempengaruhi kelancaran komunikasi antara Tim Pendamping dan para petugas putra daerah. Untuk mengatasi masalah itu telah ditempuh, antara lain dengan memberikan pelajaran bahasa Indonesia. Di samping itu, Ditjen Postel juga mengirim surat kabar ibukota (Jakarta) sebagai bahan bacaan.

Setelah Tahap Rehabilitasi tim pendamping bidang Pos yang semula terdiri atas tiga orang dikurangi menjadi dua orang karena dasar-dasar pembangunan dianggap telah dapat diselesaikan. Tugas tim pendamping selanjutnya ialah memberikan bimbingan serta bantuan teknis kepada para pejabat daerah yang terdiri atas putra-putra daerah dalam mengaktifkan Dinas Pos di Timor Timur sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perum Pos dan Giro. Di samping itu, diusahakan pengkaderan tenaga putra daerah agar pada saatnya dapat ditugaskan pada kantor-kantor pos pembantu di ibukota kabupaten dan kecamatan. Pada akhir masa penjajahan Portugis di Timor Timur terdapat 18 kantor pos dan kantor pos pembantu. Kantor pos berada di Dili sedangkan kantor pos pembantu berada di Ainaro, Aileu Baucau (Villa Salazar), Ermera, Liquica, Lospalos, Manatuto, Pante Makassar (Oekusi), Same, Suai, Viqueque dan di ibukota Kecamatan Atauro, Bazar Tete, Babonaro, Maubara, Maubisse, dan Ossu. Pada hal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1976 Propinsi Timor Timur terdiri atas 13 kabupaten dan 61 kecamatan sehingga masih banyak kantor pos pembantu yang harus dibuka.

Pada tahun 1977 pelayanan kantor pos di Propinsi Timor Timur makin berkembang luas. Di samping penjualan benda pos/meterai, pengiriman/surat biasa atau tercatat, dan pengiriman paket, sejak 1

Juni 1977 dimulai pengiriman wesel pos. Pada tahap awal pengiriman wesel pos ini hanya untuk ke luar wilayah Timor Timur. Dinas pos kilat juga mulai diperkenalkan terutama karena adanya bantuan beberapa sepeda motor dari Pemda Timor Timur.

Untuk mempercepat putra daerah dalam menunaikan tugas di dinas pos serta sekaligus untuk memperlancar penggunaan bahasa Indonesia, secara bergilir mereka ditugaskan bekerja di beberapa kantor pos di luar Timor Timur, misalnya di Kupang dan Bandung untuk beberapa bulan. Dalam kesempatan itu mereka meninjau kantor pos lain agar dapat menghayati suasana kerja di kantor-kantor pos di lingkungan pemerintah Negara Republik Indonesia. Cara tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi perkembangan dinas Pos di Timor Timur sehingga penggabungan ke dalam Perum Pos dan Giro yang berpusat di Bandung pada waktunya tidak mengalami kesulitan.

Setelah Tahap Rehabilitasi tercapai, tim pendamping bidang telekomunikasi yang semula terdiri atas 17 orang berangsur-angsur diperkecil menjadi 12 orang. Bahkan pada awal tahun 1978 tinggal 7 orang sesuai dengan kebutuhan, seorang bertindak sebagai ketua dan yang lain masing-masing untuk bidang umum, transmisi STO, saluran/kabel, telegraf dan interlokal. Namun demikian masih diperlukan pendamping putra daerah untuk bidang-bidang tersebut, dengan tujuan agar mereka dapat mengikuti pekerjaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada PERUM Telekomunikasi yang berpusat di Bandung. Semasa penjajahan Portugis, di Timor Timur terdapat Kantor Telepon Otomat di Dili, sedangkan di ibukota kabupaten dan kecamatan hanya ada Kantor Telepon Pembantu, kesemuanya masih dengan sistem manual, yaitu di ibukota Kabupaten Ainaro, Aileu, Baucau (Vila Salazar), Ermera, Liquica, Lospalos, Maliana, Manatuto, Pante Makassar (Oekusi), Same, Suai, Viqueque, dan ibukota kecamatan-kecamatan sebanyak 44 tempat.

Adapun stasiun Radio hanya terdapat di Dili, dan tiga tempat lain, yaitu di Atauro, Baucau, dan Pante Makassar (Oekusi), Baucau mempunyai lapangan udara internasional dan Pante Makassar

terletak di daratan terpisah (enclave). Transmisi yang dipakai antar tempat-tempat lainnya ialah fisik (openwire). Seperti pada Dinas Pos, untuk memperoleh tenaga terampil di bidang telekomunikasi dari kalangan putra daerah, pemerintah memberikan pelatihan dengan mengirim mereka secara bergilir bertugas beberapa bulan di Bandung. Hal itu dilakukan selain untuk memperlancar penggunaan bahasa Indonesia juga untuk memperkenalkan alat-alat modern yang telah dipergunakan Perum Telekomunikasi.



Kantor Telkom Dili

Setelah peralatan bidang transmisi selesai dipasang, maka tugas selanjutnya ialah menyempurnakan mutu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa Telekomunikasi. Perlu dicatat bahwa untuk jurusan Dili-Jakarta dipergunakan pesawat radio pemancar ISB/ Kokusai berkekuatan 1 kilowatt, sedangkan untuk jurusan Dili-Kupang dipergunakan pesawat radio pemancar SSB berkekuatan 125 watt, masing-masing dengan antene setinggi 17 meter. Hubungan radio-telegafi Dili-Jakarta dan Dili-Kupang, telah mendekatkan Timor Timur dengan bagian-bagian lain di Indonesia. Pelayanan telegram diupayakan sampai kepada si alamat dalam waktu yang tepat. Untuk itu fasilitas pengantaran telegram pun perlu

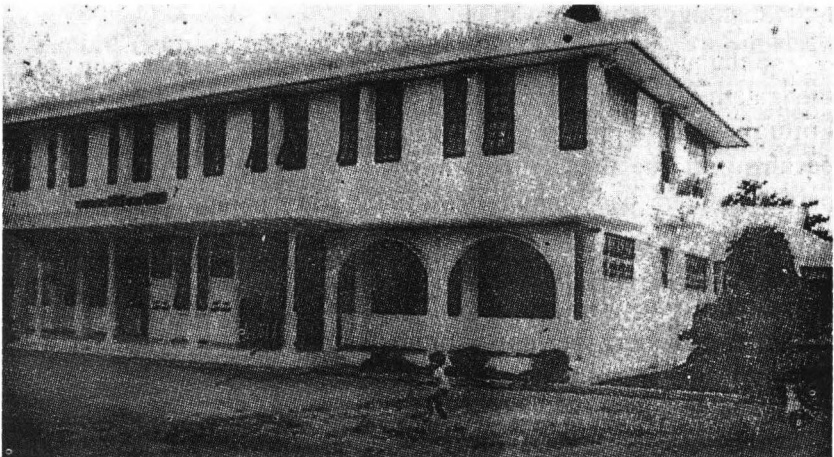
diperhatikan dan untuk itu dipergunakan sejumlah sepeda-motor. Hubungan radio telegram yang semula hanya untuk telegram-telegram dinas/pemerintah, berdasarkan instruksi Gubernur Timor Timur No. 22 Tahun 1978 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1978 berlaku pula untuk telegram-telegram umum. Dengan pesatnya penggunaan radio telegrafi, maka bimbingan kepada para putra daerah dalam administrasi dan pelayanan telegram, antara lain mengenai pentarifan, penghitungan kata, kode telegrap, ekspedisi serta pertanggungjawaban keuangannya, perlu diintensifkan.

Dalam bidang telepon, perbaikan sentral telepon otomatis Dili terus-menerus dilaksanakan, setidaknya dikembalikan pada kapasitas sentral yang memadai sewaktu pada akhir zaman penjajahan Portugis. Perbaikan sentral diimbangi dengan perbaikan jaringan lokal, yaitu mengganti tiang-tiang dari kayu dengan tiang-tiang dari besi, karena telah banyak yang kropok bahkan ada pula yang tumbang. Dalam zaman penjajahan tidak pernah digunakan tiang dari besi, melainkan dari kayu, juga untuk saluran-saluran fisik internasional. Demikian pula kabel-kabel perlu diperbaiki, karena banyak dipergunakan kabel lapangan yang dipasang oleh pihak militer sebagai pengganti kabel-kabel yang rusak/putus.

Hubungan radio telepon dalam negeri, yaitu dengan berbagai tempat di luar Timor Timur makin baik mutunya, berkat ketekunan para petugas, baik dalam pemeliharaan maupun pemeriksaan sentral secara terus-menerus. Sejalan dengan kelancaran mutu sarana, maka segi bimbingan terhadap pelayanan percakapan telepon interlokal pun sangat diperhatikan, demikian pula administrasi keuangan serta pengisian model-model yang bertalian. Penugasan pelatihan ke STO di Bandung telah dilaksanakan guna menambah pengalaman mereka, di samping meninjau beberapa STO di kota yang lain. Akhirnya, dalam bidang transmisi satelit pun tidak ketinggalan dan telah diusahakan dari perlengkapan-perengkapan. Stasiun Bumi yang masih tersedia. Untuk sementara dibangun dahulu Stasiun Bumi kecil dengan maksud pada waktunya akan diganti dengan Stasiun Bumi Lintas Tipis sesuai dengan kedudukan kota Dili sebagai ibukota Propinsi Timor Timur. Setelah diadakan percobaan-

percobaan dengan hasil yang memuaskan, kemudian siap untuk dioperasikan, maka pada tanggal 19 Mei 1979 telah diresmikan penggunaan Setasiun Bumi Kecil di Dili oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Marsekal Roesmin Nurjadin. Dan mulai saat tersebut diperbaiki pula sarana telegrap, khususnya untuk perhubungan Dili-Jakarta telah diadakan penggantian dari sarana morse ke sarana telex. Dengan beroperasinya SKSD di Dili berarti ada perbaikan mutu/kualitas dibandingkan sewaktu masih dipergunakan sistem transmisi radio HF.

Dengan terlaksananya peningkatan sarana telekomunikasi di Dili, tahap berikutnya yang akan ditangani ialah sarana telekomunikasi di daerah pedalaman khususnya daerah kabupaten paling ujung timur, yaitu Baucau. Demikian perkembangan bidang Telekomunikasi sampai dengan awal dimulainya REPELITA ke-III, khususnya di Propinsi Timor Timur. Dengan hasil-hasil yang telah dicapai dalam bidang pos dan telekomunikasi seperti diuraikan di atas, dapat diharapkan keterbelakangan yang dialami semasa zaman penjajahan dapat diatasi.



Kantor Pos dan Giro Dili

Dari gambaran umum yang disajikan terlihat bahwa sejak Timor Timur berintegrasi secara fisik dengan negara Republik Indonesia telah dicapai banyak kemajuan dalam berbagai bidang. Kemajuan itu dicapai berkat adanya semangat masyarakat untuk bekerja sama dalam pembangunan nasional. Tentu saja kemajuan akan terus bertambah seiring dengan partisipasi masyarakat. Selain itu makin meningkatnya investasi memungkinkan peranan yang lebih besar dari wilayah ini dalam pendapatan nasional secara keseluruhan.

Gambaran tentang perjalanan sejarah Timor Timur telah menampakkan pelbagai peristiwa dengan alur menuju ke proses integrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia. Artinya, dalam periode-periode perjalanan sejarah Timor Timur itu nampak bahwa suku-suku bangsa yang mendiami Timor Timur telah terpisahkan dengan suku-suku bangsa saudaranya yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia akibat dari perbuatan kaum kolonial, khususnya bangsa kolonial Belanda dan Portugis.

Perpecahan itu nampak menjadi alat bagi kaum kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya atau setidaknya untuk tetap mempertahankan pengaruhnya walaupun nanti kaum kolonial itu telah meninggalkan wilayah jajahannya.

Sehubungan dengan itu, keadaan Timor Timur pun telah mengalami situasi perpecahan saat-saat pemerintahan kolonial Portugis akan meninggalkan negeri jajahannya ini. Bahkan, perpecahan itu melahirkan pertentangan yang berakibat tumbuhnya perang saudara pada tahun 1974-1975, yaitu perang saudara antara anggota partai-partai Apodeti, UDT, Fretilin, Kota, dan Trabalhista. Atau, di antara pendukung yang bertujuan untuk tetap mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari pemerintah kolonial Portugis dan yang bertujuan untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia serta yang bertujuan untuk berdiri sendiri.

Akibat-akibat, terutama dalam hal masalah-masalah politik-ideologi, dari pertentangan itu sampai sekarang masih ada. Hal itu telah pula diakui oleh Gubernur Timor Timur Abilio Jose Osario

Soares dalam kesempatan menyambut kedatangan rombongan Kursus Reguler Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) baru-baru ini. Di dalam memberikan gambaran beberapa masalah yang dihadapi dewasa ini, Gubernur Abilio Jose Osorio Soares menyebutkan bahwa pemerintahannya harus meningkatkan upaya guna mempersatukan masyarakat Timor Timur yang terpecah-belah akibat penjajahan kolonial Portugis, sehingga menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah melalui perjalanan waktu sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia, pembangunan pun telah direncanakan secara seksama dan dilaksanakan dengan segala kemampuan yang dimiliki. Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan itu dilakukan pemerintah daerah dengan mendapat dukungan dari rakyat Timor Timur. Di dalam pelaksanaan pembangunan itu, tentu masih banyak yang perlu dilakukan. Namun, terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam pelaksanaan pembangunan itu, apalagi kalau dibandingkan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Portugis selama ratusan tahun menjajah, hasil-hasil pembangunan itu tampak amat nyata dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Pengakuan akan adanya hasil nyata keberhasilan pembangunan di Timor Timur setelah menjadi bagian dari wilayah negara Republik Indonesia telah dinyatakan oleh rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro melalui Dewan Perwakilan Rakyat mereka pada tahun 1986. Dalam butir kedua dari pernyataan DPRD Bobonaro itu dikatakan "menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas keberhasilan pembangunan yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro selama 10 tahun berada dalam pangkuan "Ibu Pertiwi Negara Republik Indonesia".

RANGKUMAN

Setelah melalui proses perjuangan, pada akhirnya cita-cita kemerdekaan rakyat Timor Timur sebagaimana yang dituangkan di

dalam Proklamasi Balibo dan petisi yang dikeluarkan oleh DPR Wilayah Timor Timur, tercapai juga. Cita-cita itu diwujudkan melalui suatu kekuatan hukum, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tertanggal 17 Juli 1976. Undang-undang ini memuat keputusan penyatuan (kembali) wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Setelah wilayah Timor Timur resmi menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia dan merupakan propinsi ke-27 di dalam tatanan wilayah negara Republik Indonesia, diadakanlah langkah-langkah konkret untuk merencanakan pembangunan wilayah ini dan kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan-pelaksanaan pembangunannya. Semua aspek kehidupan mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu.

Hasil-hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu telah dinikmati oleh rakyat Timor Timur dari semua lapisan masyarakat. Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, daerah Timor Timur telah melakukan rehabilitasi, konsolidasi serta menciptakan stabilitas pemerintahan untuk kelangsungan hidupnya, suatu kelangsungan hidup yang berproses menuju ketenteraman dan kedamaian hidup dalam tatanan hidup negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PERTANYAAN

1. Apakah landasan hukum bagi penggabungan wilayah Timor Timur ke dalam wilayah negara Republik Indonesia? Terangkan dengan jelas.
2. Apakah yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam rangka pembangunan daerah Timor Timur sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia? Terangkan dengan jelas.
3. Di dalam melakukan pembangunan di daerah Timor Timur, telah ditentukan prioritas-prioritas bidang pembangunan itu. Sebutkan bidang-bidang yang diprioritaskan itu.

4. Apakah yang dimaksud dengan bimbingan pembangunan industri kecil (BIPIK) dan apa tujuannya? Terangkan dengan jelas.
5. Berikanlah pendapatmu tentang hasil-hasil pembangunan di daerah Timor Timur sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia.

SUMBER PENULISAN

I. BUKU

- Bemmelen, R.W. van, *The Geology of Indonesia* Vol. IA. General Geology, The Hague, Martinus Nijhoff, 1970.
- Budhisantoso, S "Kehidupan Ekonomi Penduduk di Timor Timur" dalam *Berita Antropologi* Tahun XI No. 36 Januari-Maret 1980.
- Djened Bale, dkk. *Atlas Indonesia dan Dunia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Diplomasi Tentang Timor Timur*, Jakarta, CSIS, 1984.
- Dua Tahun Propinsi ke-27 Daerah Tingkat I/Propinsi Timor Timur*, Departemen Penerangan R.I.
- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia*, Jilid V Masa Orde Baru.
- Encyclopedia Britanica*, Inc. Britanica Atlas 1979.
- Ensiklopedia Indonesia* Jilid 16. Jakarta, Cipta Adi Pustaka 1991.
- Fretilin Massacres: Festimonies of the survivors From Fretili Massacres, Singapore, n.d.
- Hick, David, *Roh Orang Tetun* (diterjemahkan oleh Tim SH), Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1985.
- Himpunan dokumen tentang Timor Timur, Pusjarah ABRI.
- Hoaddley, J-Stephen, *the Future of Portuguese Timor : Dilemmas opportunities* Occasional Paper No. 27 March 1975, Institute of South East Asian Studies, Singapore.
- Integrasi Timor Timur*, 1976 (I), Jakarta, CSIS, 1983.
- Integrasi Timor Timur*, Departemen Penerangan R.I, 1982.
- Lapian A.B dan Paramita Abdulrachman, "Sejarah Timor Timur" dalam *Berita Antropologi*, Tahun XI No. 36 Januari - Maret 1980.
- Lapian Dr. A.B. Dan JR Chaniago, *Timor Timur dalam Gerak Pembangunan*, Depdikbud, Ditjen Kebudayaan, Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek IDSN, Jakarta, 1988.

Pascoal, Ezequel Eues. A. *Alma de Timor Vista na Sua Fantasia*, Braga, Barbosa & Xavies LDA 1976.

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 15 Agustus 1987. Pelaksanaan Tahun Ketiga Repelita IV (1 April 1968 s/d 31 Maret 1987) Departemen Penerangan RI, 1987.

B. Mangindaan, B. "*Sejarah Timor Timur*" Inaka Baladika, No. XI Tahun 1976, Dep. Hankam, Pusat Pembinaan Mental.

Monografi Daerah Timor Portugis, disusun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Kupang.

Pembangunan Timor Timur 1977 - 1982, Biro Informasi dan Data, CSIS, Jakarta, 1984.

Pembantaian Di Timor Timur, (Brosur) 1976.

Pra Integrasi Timor Timur, CSIS, Jakarta, 1983.

Schulte, Nordholt, H.G., *The Political System of the Atoni of Timor*, Den Haag, 1971.

Sejarah Perkembangan Timor Timur, Diterbitkan oleh staf teritorial KASAS, 1979.

Soares, Abilio Jose Osirio, Perkembangan Timor Timur. Disampaikan dalam rangka menyambut Peserta Kursus Reguler Lemhannas Angkatan III ke Propinsi Timor Timur Juli 1993.

Soekanto, *Integrasi Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*. Yayasan Penerbit, 1976.

Suparlan, Parsudi, "Orang Timor Timur" dalam *Berita Antropologi*. Tahun XI, No. 36 Januari – Maret 1980.

II. MAJALAH/SURAT KABAR/MAKALAH

Joao Da Silva Tavares, "Sambutan: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bobonaro pada tanggal 12 Juli 1986 dalam rangka Sidang Paripurna Istimewa DPRD Tk II Bobonaro dalam memperingati HUT X Propinsi Timor Timur", di dalam Buletin Bobonaro Membangun, No. 3 Tahun 1986/1987. Kandeppen/Puspenmas, Bobonaro, 1986/1987.

Kristianiarsi, "Masalah Timor Timur di Mata Australia 1974–1978, *Makalah* dalam Seminar Sehari Tesis Sejarah 21 Desember 1992, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

"Sambutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bobonaro. Dalam rangka HUT XI Propinsi Timor Timur, dalam Buletin *Bobonaro Membangun*, No. 5, Tahun 1987/1988, Kandeppen/Puspenmas, Bobonaro, 197/1988.

"Presiden Kota Jose Martius Keadilan Sejarah Timor Timur selama 19 tahun Disimpangkan". *Suara Pembangunan*, 22 April 1993.

"Revolusi di Bar & Biara", *Tempo*, 15 Juni 1974.

III. STATISTIK

BPS. Daftar Nama, Kode & Peta Wilayah Administrasi Indonesia 1989, Jakarta, 1990

BPS. Statistik Indonesia 1989 Jakarta 1990

BPS. Statistik Indonesia 1990 Jakarta 1991

BPS. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 1990. Jakarta, 1991

IV. WAWANCARA/SUMBER LISAN

Wawancara dengan Abilo Jose Osorio Soares, Gubernur Prop. Timor Timur, Desember 1992 di Dili.

Wawancara dengan Alexandrino Borromeo, Tokoh Apodeti, November 1992 di Dili.

LAMPIRAN I

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa delegasi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur telah mengajukan petisi kepada Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan kehendaknya secara resmi untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Wilayah Timor Timur telah diperoleh keyakinan bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan bebas menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. bahwa kehendak Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur tersebut dalam huruf a telah diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia dan karena itu perlu ditetapkan undang-undang yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

- Mengingat:**
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Penetapan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di wilayah Timor Timur.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SOEHARTO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1976
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SOEDHARMONO, SH.

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 1976.**

LAMPIRAN 2

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

Umum

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) menegaskan dalam Pembukaannya, "bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan". Oleh karena itu, kehendak rakyat Timor Timur untuk membebaskan diri dari penjajahan Portugis memperoleh simpati dan dukungan dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia.
2. Dalam rangka dekolonisasi wilayah bekas koloni Portugis di Timor itu, Rakyat Timor Timur telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas baik dalam Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 November 1975 maupun dalam Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili tanggal 31 Mei 1976 yang telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta tanggal 7 Juni 1976. Untuk menyaksikan serta memperoleh gambaran secara langsung tentang kenyataan-kenyataan yang sebenarnya di wilayah Timor Timur, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengirim Delegasi ke Timor Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/LN/1976, tanggal 22 Juni 1976 yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan unsur organisasi masyarakat. Hasil peninjauan itu telah memberi keyakinan kepada Pemerintah dan Rakyat Indonesia, bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan yang dinyatakan secara bebas untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah sepantasnya

apabila kehendak Rakyat Timor Timur diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia, sehingga oleh karenanya Presiden Republik Indonesia telah menyetujui dan menerimanya yang didasarkan atas rasa tanggung jawab terhadap perikemajaan, tanggung jawab terhadap sejarah, tanggung jawab terhadap dasar-dasar dan cita-cita kemerdekaan, serta tanggung jawab terhadap hati nurani Rakyat dan Bangsa Indonesia, yang kesemuanya itu didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia, agar supaya penyatuan tersebut menjadi sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dengan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan sendirinya wilayah Timor Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rakyat Timor Timur menjadi Rakyat dan Warganegara Republik Indonesia, dan semua peraturan perundang-undang Republik Indonesia berlaku juga bagi wilayah Timor Timur.
5. Sebagai tindak lanjut dari penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi bekas koloni Portugis di Timor. Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur adalah sesuai dengan sistem tata negara dan tata pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan. Disamping pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berarti memberikan otonomi kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sama halnya dengan Propinsi Daerah Tingkat I di bagian-bagian lain dari wilayah Republik Indonesia.
6. Namun demikian, perlu kiranya disadari, bahwa sebelum penyatuannya dengan Negara Republik Indonesia, Timor Timur selama ini telah mempunyai sejarah dan pertumbuhan yang berlainan dengan wilayah-wilayah lain dalam lingkungan Republik Indonesia. Keadaan masyarakatnya, sistem hukumnya, sistem pemerintahannya, sistem perekonomiannya, sistem pendidikannya, serta

sistem pertahanan dan keamanannya mempunyai latar belakang, sifat dan perkembangan yang berlainan, segera perlu diatur secara khusus. Hal-hal tersebut memerlukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan Republik Indonesia. Usaha penyesuaian ini harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, namun harus pula terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Mengenai pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, perlu diatur lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan yang khusus di Wilayah Timor Timur.

Sambil menunggu penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut, maka aparaturnya pemerintah yang sekarang ada menjalankan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kepala Pemerintahan Sementara Timor Timur menjadi Gubernur Kepala Daerah Timor Timur. Demikian juga badan-badan Perwakilan Rakyat yang ada di Timor Timur menjadi Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3084 TAHUN 1976.

**Perpustakaan
Jember**